



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Papua Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat diperlukan rencana tata ruang wilayah sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan berdasarkan rekomendasi hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Papua Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 sehingga perlu direvisi dan diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan MHA yang penguasaan, penggunaan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai hukum adat
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
23. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
24. Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
26. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Antarwilayah.

27. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di KSNT.
28. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
32. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
33. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.
34. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
35. Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
36. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
37. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
38. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

39. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
41. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari 1 (satu) kabupaten dan kota.
42. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
43. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
44. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
45. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
46. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
47. Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.
48. Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.
49. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
50. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
51. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
52. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
53. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi

- pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpulan regional) atau dalam kabupaten (pengumpulan lokal).
54. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.
 55. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat 7 perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
 56. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang pertahun.
 57. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang pertahun.
 58. Bandar udara pengumpulan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
 59. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
 60. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.
 61. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
 62. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
 63. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
 64. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 65. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
 66. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya di singkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
 67. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
 68. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 69. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

70. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
71. Kawasan lindung gambut adalah daerah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
72. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dgn tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
73. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (*sanctuary reserve*).
74. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. kawasan pelestarian alam ini berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (*nature conservation area*).
75. Kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
76. Taman bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal dan gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
77. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
78. Kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
79. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.
80. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman mangrove di wilayah pesisir/laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai

- dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya pencemaran pantai.
81. Hutan Produksi tetap yang selanjutnya disingkat HP adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
 82. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disingkat HPT adalah merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih.
 83. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.
 84. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
 85. Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
 86. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
 87. Kawasan perkebunan adalah lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.
 88. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
 89. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkit tenaga listrik.
 90. Kawasan industri adalah kawasan peruntukan industri kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan seterusnya.
 91. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
 92. Kawasan permukiman adalah kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan

- ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
93. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instansi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, koramil, dan sebagainya.
 94. Wilayah pertahanan negara yang selanjutnya disebut wilayah pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
 95. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 96. Kawasan strategis provinsi adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.
 97. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
 98. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
 99. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
 100. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah nilai perbandingan dari luasnya lahan dengan luas area yang bisa dibangun.
 101. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang bisa dibangun dengan luas lahan yang ada.
 102. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpekerjaan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 103. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
 104. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

105. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
106. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
107. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
108. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
109. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh MHA tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
110. Pemangku kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
111. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
112. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
113. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok perempuan dan kelompok marginal, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
114. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
115. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
116. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
117. Pembangunan berkelanjutan adalah wilayah pemerintahan administrasi provinsi yang menyelenggarakan pembangunan dengan menerapkan prinsip perlindungan tutupan hutan dan pemanfaatan sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati secara lestari yang terintegrasi didalam ketentuan khusus meliputi kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup terdiri atas:

- a. wilayah perencanaan; dan
- b. substansi.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. wilayah perencanaan;
 - b. batasan wilayah; dan
 - c. wilayah adat.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan koordinat wilayah berada pada posisi geografis di antara 2° - 5° Lintang Selatan dan antara 129° - 136° Bujur Timur, meliputi:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah laut.
- (3) Wilayah Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 9.945.642 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua) hektar, yang meliputi 12 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu:
 - a. Kabupaten Fak Fak;
 - b. Kabupaten Kaimana;
 - c. Kabupaten Teluk Wondama;
 - d. Kabupaten Teluk Bintuni;
 - e. Kabupaten Manokwari;
 - f. Kabupaten Sorong Selatan;
 - g. Kabupaten Sorong;
 - h. Kabupaten Raja Ampat;
 - i. Kabupaten Tambrauw;
 - j. Kabupaten Maybrat;
 - k. Kabupaten Manokwari Selatan;
 - l. Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
 - m. Kota Sorong.
- (4) Wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 10.614.307 (sepuluh juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh) hektar.
- (5) Batas daerah di laut antara Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Maluku Utara mengacu pada ketentuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (6) Penetapan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mempengaruhi luas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Batas Wilayah meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafuru; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram, Laut Halmahera, Provinsi Maluku Utara.
- (8) Wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi 3 (tiga) wilayah adat yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) suku besar dan sub suku yang memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat secara budaya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tersebar di:
 - a. wilayah adat Domberay meliputi:

1. Kabupaten Sorong;
 2. Kabupaten Sorong Selatan;
 3. Kabupaten Teluk Bintuni;
 4. Kabupaten Teluk Wondama;
 5. Kabupaten Raja Ampat;
 6. Kabupaten Manokwari;
 7. Kabupaten Manokwari Selatan;
 8. Kabupaten Tambrauw;
 9. Kabupaten Pegunungan Arfak;
 10. Kabupaten Maybrat; dan
 11. Kota Sorong.
- b. wilayah adat Bomberay, meliputi:
 1. Kabupaten Kaimana; dan
 2. Kabupaten Fak Fak.
 - c. wilayah adat Saireri, meliputi Kabupaten Teluk Wondama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah khusus.
- (10) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Pulau Sain/Pulau Sayang, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas hingga status administrasi pulau-pulau tersebut yang berada di wilayah perbatasan antara Provinsi Papua Barat dan Provinsi Maluku Utara disepakati dan ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (11) Wilayah perencanaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (12) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Substansi

Pasal 4

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- d. kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. peran masyarakat dan kelembagaan;
- h. penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan peralihan;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan penutup;
- m. penjelasan; dan

n. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 5

Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi sebagai pendukung ekonomi nasional yang maju dan berdaya saing dengan mengedepankan pelestarian wilayah daratan dan lautan sesuai dengan nilai kearifan lokal sesuai dengan nilai adat di Provinsi Papua Barat secara aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan yang terdiri atas:

- a. Peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- b. Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal dan perlindungan kepastian hukum mengenai keberadaan dan wilayah kelola masyarakat hukum adat;
- c. Pengembangan struktur ruang yang selaras dengan rencana tata ruang nasional dan rencana rinci tata ruang wilayah nasional;
- d. Pengembangan pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan;
- e. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi antara wilayah darat dan laut secara merata;
- f. Pengembangan kawasan hutan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- g. Peningkatan penyediaan lahan sawah dalam mendukung ketahanan pangan;
- h. Pengelolaan kawasan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
- i. Peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. Pengembangan kawasan budidaya di laut.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. menentukan dan menetapkan kawasan konservasi dan calon kawasan konservasi, untuk diproteksi dan diatur pengelolaannya melalui peraturan daerah;

- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
 - d. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - e. mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
 - f. menguatkan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional; dan
 - g. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di wilayah abrasi dan banjir rob maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang daerah aliran sungai.
- (2) Strategi pengelolaan wilayah-wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal dan perlindungan kepastian hukum mengenai keberadaan dan wilayah kelola MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya;
 - b. mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi di setiap kawasan andalan dan membangun kerjasama dengan pihak swasta;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan pembinaan masyarakat dalam pengembangan kawasan;
 - d. penyediaan sarana prasarana dalam rangka memperluas akses pasar untuk masyarakat yang berada di wilayah kelola hukum adat;
 - e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai rencana pengembangan investasi pada kawasan andalan, dan turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jenis investasinya;
 - f. mempertahankan daya dukung lingkungan kawasan;
 - g. menyusun alokasi ruang dan aturan pemanfaatannya;
 - h. melindungi dan memanfaatkan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. mengendalikan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - j. mengembangkan kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan;
 - k. meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan; dan
 - l. menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengembangan struktur ruang yang selaras dengan rencana tata ruang nasional dan rencana rinci tata ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. memantapkan PKN Kota Sorong yang berperan sebagai pintu masuk Provinsi Papua Barat yaitu kota yang menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah provinsi yang akan berfungsi sebagai pusat

kegiatan industri, pusat perdagangan, permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan, pusat transportasi antar wilayah dan internal wilayah serta pemasaran antar wilayah dan wilayah lain dan dalam beberapa keadaan untuk internasional;

- b. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW, yakni Manokwari, Fak Fak dan Ayamaru agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota di Provinsi Papua Barat dan wilayah Indonesia bagian timur;
 - c. memantapkan kota/kabupaten sebagai PKN dan PKW yang merupakan pusat-pusat regional sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam wilayahnya, juga dalam hubungannya dengan wilayah luar;
 - d. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKL kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, pusat jasa, agro industri, distribusi produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan skala pelayanan intra regional;
 - e. meningkatkan aksesibilitas kota-kota pusat regional dalam lingkup intra regional dan inter-regional melalui pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara yang terpadu;
 - f. mempercepat pengembangan sistem prasarana wilayah darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi pelayanan sosial masyarakat;
 - g. mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, udara dengan mengembangkan sistem terkoneksi antar moda transportasi secara terintegrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang;
 - h. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terpencil dan terisolir;
 - i. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta jaringan tenaga listrik;
 - j. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;
 - k. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan (perkotaan dan perdesaan) dengan hinterland;
 - l. mendorong pengembangan wilayah berbasiskan pada sumberdaya alam, deliniasi ekoregion, sistem kota dan sistem transportasi wilayah;
 - m. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan pusat hierarki serta fungsi pelayanan; dan
 - n. mendukung penetapan kawasan strategis nasional tertentu.
- (4) Strategi pengembangan pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. membangun prasarana sosial yang merata dan sesuai hierarki fungsi pelayanan di seluruh bagian wilayah, terutama di wilayah yang sulit terakses meliputi wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil, dan rawa;
 - b. membangun prasarana ekonomi berskala lokal di wilayah yang sulit terakses transportasi;
 - c. mempercepat pengembangan prasarana ekonomi skala regional di pusat pelayanan ekonomi perkotaan;
 - d. mempercepat pembukaan akses jalur transportasi untuk sarana dasar sosial dan ekonomi perdesaan ke pusat pelayanan sosial dan ekonomi perkotaan;

- e. mengembangkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang fungsi perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya;
 - g. mengembangkan teknologi tepat guna dalam penyediaan prasarana energi dan sumberdaya air perdesaan;
 - h. membangun sarana dan prasarana transportasi terpadu perdesaan;
 - i. meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar transportasi, energi dan sumberdaya air guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dan membuka keterisolasian wilayah;
 - j. mengembangkan berbagai komoditas unggulan pertanian perdesaan;
 - k. mengembangkan riset dan pengembangan produk pertanian;
 - l. mengembangkan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan; dan
 - m. meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha kecil dan menengah guna meningkatkan daya saing produk dengan kebijakan yang kondusif dan perencanaan pembangunan daerah berbasis sumberdaya lokal.
- (5) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi antara wilayah darat dan laut secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat secara multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengembangkan jaringan jalan penghubung antar wilayah untuk mendukung peningkatan jalur distribusi barang dan jasa;
 - c. mengembangkan jejaring infrastruktur transportasi dalam menunjang pemerataan kegiatan ekonomi;
 - d. memprioritaskan pembangunan pada wilayah terisolasi melalui pembukaan jalur transportasi;
 - e. melakukan pemetaan batas ulayat untuk jalur transportasi berupa guna menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan;
 - f. mengembangkan pelabuhan untuk mendorong perekonomian dan mobilitas barang dan penumpang yang ditunjang dengan fasilitas sesuai standar pelabuhan;
 - g. mengembangkan bandar udara dan rute-rute perintis untuk membuka isolasi wilayah guna menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lain;
 - h. pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan mengembangkan energi terbarukan pada daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan;
 - i. meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat dan dunia usaha khususnya di wilayah PKN, PKW, PKSN, PKL dan kawasan strategis;
 - j. membangun sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan terisolasi, kawasan terpencil, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana; dan
 - k. mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya air secara berkelanjutan dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan pertanian khususnya kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

- (6) Strategi pengembangan kawasan hutan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 67% (enam puluh tujuh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung;
 - e. penyelesaian deliniasi batas kawasan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelesaian permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelesaian atau penanganan berbagai kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui upaya konservasi/rehabilitasi tanah, pembatasan perubahan fungsi kawasan, pembebasan/pencabutan hak atas tanah, pemindahan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap diluar kawasan lindung;
 - h. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - i. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - j. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - k. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - l. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - m. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - n. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - o. mengembangkan tindakan mitigasi bencana dan mencegah terjadinya perubahan iklim.
- (7) Strategi peningkatan penyediaan lahan sawah dalam mendukung ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis wilayah untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - e. meningkatkan luas lahan sawah melalui efisiensi penggunaan sumber daya air yang ada dan pembuatan bendung, bendungan/waduk dan embung;
 - f. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
 - g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - h. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - i. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang;
 - j. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - k. membatasi kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya; dan
 - l. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.
- (8) Strategi pengelolaan kawasan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
 - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis;
 - g. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai sosial budaya yang mencerminkan jati diri daerah;
 - h. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung;
 - i. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - j. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - k. membatasi pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya intensif;

- l. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
 - m. merehabilitasi fungsi lindung kawasan lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi;
 - n. melestarikan fungsi dan kemampuan sumber daya alam hayati dan non hayati pada Kawasan Konservasi Raja Ampat dan Kawasan Mangrove Bintuni;
 - o. meningkatkan pelestarian fungsi ekosistem dan mengendalikan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut pada Kawasan Strategis Nasional; dan
 - p. mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan pada kawasan perbatasan.
- (9) Strategi peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:
- a. menetapkan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. menetapkan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan guna lahan lainnya, terutama permukiman;
 - c. mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara ketat;
 - d. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - f. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
 - g. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara; dan
 - h. membangun prasarana dan sarana yang diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional.
- (10) Strategi pengembangan kawasan budidaya di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
- a. mengembangkan zona perikanan tangkap, hutan mangrove, perikanan budidaya, pariwisata, pelabuhan, pertambangan, energi, berbasis kebutuhan, keberlanjutan, serta serasi, selaras dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - b. mengembangkan sinergitas pemanfaatan kawasan budidaya di laut dengan kawasan lainnya, dengan terus mengelola dan menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya di laut dalam meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. mengintensifkan fungsi pengawasan berbasis aparat resmi maupun masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan kawasan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kota Sorong.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
 - a. Kabupaten Manokwari;
 - b. Kabupaten Fak Fak, dan
 - c. Ayamaru di Kabupaten Maybrat.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kota Sorong; dan
 - b. Kabupaten Manokwari.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Perkotaan Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan;
 - b. Perkotaan Aimas di Kabupaten Sorong;
 - c. Perkotaan Kaimana di Kabupaten Kaimana;
 - d. Perkotaan Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - e. Perkotaan Waisai di Kabupaten Raja Ampat;
 - f. Perkotaan Raisei di Kabupaten Teluk Wondama;
 - g. Perkotaan Fef di Kabupaten Tambrauw;
 - h. Perkotaan Aifat di Kabupaten Maybrat;
 - i. Perkotaan Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan; dan
 - j. Perkotaan Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan jalur kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. terminal penumpang; dan
- c. jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Jalan arteri berupa Jalan Arteri Primer (JAP), terdiri atas:
 1. Klamono (Kab. Sorong) - Bts. Kab. Sorong Selatan;
 2. Bts. Kab. Sorong Selatan – Kambuaya (Kab. Maybrat);
 3. Jln. Yos Sudarso (Sorong);
 4. Jln. A. Yani (Sorong);
 5. Jln. Basuki Rahmat (Sorong);
 6. Bts. Kota Sorong - Aimas (Km.18) Kab. Sorong – Klamono (Kab. Sorong);
 7. Kambuaya – Susumuk (Kab. Maybrat);
 8. Susumuk – Kumurkek (Kab. Maybrat);
 9. Kumurkek - Ayamasi – Snopy (Kab. Tambrauw);
 10. Snopy (Kab. Tambrauw) - Kebar (Kab. Tambrauw) – Prafi (Kab. Manokwari);
 11. Prafi - Warmare – Maruni (Kab. Manokwari);
 12. Maruni - Bts. Kota Manokwari;
 13. Jln. Siliwangi (Manokwari);
 14. Jln. Yos Sudarso (Manokwari);
 15. Jln. Merdeka (Manokwari);
 16. Jln. Trikora (Manokwari);
 17. Jln. Drs. Esau Sesa (Manokwari);
 18. Jln. Sudirman (Manokwari);
 19. Maruni (Manokwari) – Oransbari (Mansel);
 20. Oransbari – Ransiki (Mansel);
 21. Ransiki – Mameh (Mansel);
 22. Ambuni – Tandia (Teluk Wondama);
 23. Simpang Goro - Batas Provinsi Papua Barat;
 24. Mameh – Windesi; dan
 25. Windesi – Ambuni.
- b. Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 1. Mameh (Manokwari Selatan) – Bintuni;

2. Bofuer – Warmenu (Kabupaten Kaimana);
3. Warmenu (Kabupaten Kaimana) – Furwata (Kabupaten Teluk Bintuni);
4. Aroba – Furwata (Kabupaten Teluk Bintuni);
5. Bomberay (Fak Fak) – Aroba (Kabupaten Teluk Bintuni);
6. Hurimber - Baham – Bomberai (Kabupaten Fak Fak);
7. Bts. Kota Fak Fak - Huriimber – Kokas (Kabupaten Fak Fak);
8. Jln. Kartini (Kabupaten Fak Fak);
9. Jln. Ahmad Yani (Kabupaten Fak Fak);
10. Wonama – Tanggaromi (Kabupaten Teluk Wondama);
11. Tanggarumi (Kabupaten Teluk Wondama) - Bts. Kota Kaimana;
12. Jln. Raya Kroi (Kabupaten Kaimana);
13. Jln. Trikora (Kabupaten Kaimana);
14. Jln. Batu Putih (Kabupaten Kaimana);
15. Aimas (Km 18) - Pel. Arar (Sorong);
16. Sorong – Makbon (Kabupaten Sorong);
17. Makbon (Kabupaten Sorong) – Mega (Kabupaten Tambrauw).
18. Waisai – Bandara (Kabupaten Raja Ampat);
19. Jln. Arfai – Pami;
20. Jln. Bts Kota Manokwari – Sibuni;
21. Jln. Poros Susweni (Manokwari);
22. Jln. Amban Pantai;
23. Jln. Pasir Putih (Manokwari);
24. Jln. Brawijaya;
25. Jln. Gunung Salju (Manokwari);
26. Jln. Reremi Puncak;
27. Jln. Lingkar RS Provinsi Papua Barat;
28. Jln. Reremi Permai;
29. Jln. Sujarwo Condronegoro;
30. Jln. Pahlawan;
31. Jln. Lingkar Teluk Sawaibu;
32. Jln. Pasir;
33. Jln. Soribo;
34. Jln. Sowi Gunung;
35. Jln. Lingkar Pulau Mansinam;
36. Jln. SP5 - Masni – Sibuni;
37. Jln. SP 5 – Sibuni;
38. Jln. Masni – Wariori;
39. Jln. Maripi - SP 1;
40. Jln. Drs. Dominggus Mandacan - SP1;
41. Jln. Lingkar Danau Anggi Gidji;
42. Jln. Lingkar Danau Anggi Gida;
43. Jln. Prafi (Manokwari) - Kota Pegaf - Ransiki (Mansel);
44. Jln. Surey - Bts Kab Manokwari Selatan – Umousi;
45. Jln. Pelabuhan Oransbari (Mansel);
46. Jln. Isim – Umousi;
47. Jln. Umousi - Bts Kab Teluk Bintuni – Merdey;
48. Jln. Merdey – Mogoi;
49. Jln. Bintuni - Tuhiba - Meyerga – Susumuk;
50. Jln. Tandia - Batas Kota Rasiei;
51. Jln. Poros Rasiei;
52. Jln. Batas Kota Rasiei – Yopenggar;
53. Jln. Werianggi - Windesi;
54. Jln. Kaimana – Kiruru;
55. Jln. Wermura – Sisir;

56. Jln. Bts Kota Fak Fak - Weri – Nusalasi;
57. Jln. SP 2 - SP 1 - Tomage - Tofoi;
58. Jln. Bts Kota Fak Fak - Siboru - Sipatnanam - Teluk Patipi – Kayuni;
59. Jln. Jenderal Sudirman (Kota Sorong);
60. Jln. Danau Tempe;
61. Jln. Arteri Kota Sorong;
62. Jln. Aimas – Klasari;
63. Jln. Yefelio;
64. Jln. Klasari – Seget;
65. Jln. Klamalu - Bandara Segun;
66. Jln. Dermaga Klalin (Kab. Sorong);
67. Jln. Batu Payung - Hobart – Tofot;
68. Bts Sorsel – Sbir;
69. Jln. Tarsa - Wanurian – Klarion;
70. Jln. Sayosa - Sailala – Klaili;
71. Jln. Aimas - Klaili – Dela;
72. Jln. Klomit - Tofot – Teminabuan;
73. Jln. Poros Teminabuan;
74. Jln. Poros Teminabuan;
75. Bts Kab Maybrat – Kambuaya;
76. Jln. Fategomi – Athabu;
77. Jln. Fiatsiur - Isas Jitmau;
78. Jln. Ayamaru – Fatigome;
79. Jln. Boldon - Sesor – Unggi;
80. Jln. Fratafem - Yukase – Kokas;
81. Yukase – Kfa;
82. Susumuk - Fuog – Womba;
83. Jln. Mega - Fef – Siakwa;
84. Jln. Mega - Sausafor -Warmadi - Saukorem – Arfu;
85. Jln. Ahmad Yani (Waisai);
86. Jln. Basuki Rahmat (Waisai);
87. Jln. Kalobo - Samate - Solol – Kaliyam;
88. Kaimana – Triton;
89. Hurimber – Kokas;
90. Moswaren – Kais.
91. Bts Kota Teminabuan - Bts Kab Maybrat;
92. Jln. Sowi 4;
93. Jln. Teminabuan (Keyen) - Boldon – Ayamaru;
94. Jln. Werianggi – Idor;
95. Jln. Nusalasi – Bomberay;
96. Jln. Demaisi - Hingk - Membey – Ransiki;
97. Jln. Wombu - Undurara – Oya;
98. Jln. Aimas - Klamono – Klabra; dan
99. Jln. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Aturi.

c. Jalan Lokal primer berada diseluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat.

- (3) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang tipe B, meliputi:
- a. Terminal Kota Sorong di Kota Sorong;
 - b. Terminal Wosi di Kabupaten Manokwari;
 - c. Terminal Tumburuni di Kabupaten Fak Fak;
 - d. Terminal Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
 - e. Terminal Tangkoca di Kabupaten Kaimana;
 - f. Terminal Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - g. Terminal Tambrau di Kabupaten Tambrau; dan

- h. Terminal Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni.
- (4) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Jalur Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kereta api antar kota pada lintas Sorong – Manokwari, meliputi ruas:
- a. Sorong – Aima; dan
 - b. Manokwari – Teluk Bintuni; dan
 - c. Aima – Teluk Bintuni.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. stasiun Aifat di Kabupaten Maybrat;
 - b. stasiun Aimas di Kabupaten Sorong;
 - c. stasiun Aima di Kabupaten Maybrat;
 - d. stasiun Andai di Kabupaten Manokwari;
 - e. stasiun Arakso di Kabupaten Maybrat;
 - f. stasiun Ayamuru di Kabupaten Maybrat;
 - g. stasiun Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - h. stasiun Fan di Kabupaten Maybrat;
 - i. stasiun Germakolo di Kabupaten Maybrat;
 - j. stasiun Kambuaya di Kabupaten Maybrat;
 - k. stasiun Klamit di Kabupaten Sorong Selatan;
 - l. stasiun Koranoe di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - m. stasiun Maladopok di Kabupaten Sorong;
 - n. stasiun Manokwari di Kabupaten Manokwari;
 - o. stasiun Merdey di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - p. stasiun Mindaha di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - q. stasiun Momi di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - r. stasiun Oransbari di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - s. stasiun Pertamina di Kabupaten Sorong;
 - t. stasiun Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - u. stasiun Rendani di Kabupaten Manokwari;
 - v. stasiun Sago di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - w. stasiun Saluk di Kabupaten Sorong;
 - x. stasiun Stenkool di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - y. stasiun Susumuk di Kabupaten Maybrat;
 - z. stasiun Tembuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - aa. stasiun Warkapi di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - bb. stasiun Wasowi di Kabupaten Teluk Bintuni; dan
 - cc. stasiun Sorong di Kota Sorong.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. lintas penyeberangan antar provinsi;
 - b. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 - c. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sorong – Fak Fak – Wahai;
 - b. Manokwari – Biak; dan
 - c. Manokwari – Nabire.
- (3) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sorong – Seget;
 - b. Seget – Mugem; dan
 - c. Seget – Teminabuan.
- (4) Pelabuhan Sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan Sorong di Kota Sorong;
 - b. pelabuhan Fak Fak di Kabupaten Fak Fak;
 - c. pelabuhan Inanwatan di Kabupaten Sorong Selatan;
 - d. pelabuhan Babo di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - e. pelabuhan Segun di Kabupaten Sorong;
 - f. pelabuhan Yahadian di Kabupaten Sorong Selatan;
 - g. pelabuhan Puragi di Kabupaten Sorong Selatan;
 - h. pelabuhan Metemani Kais di Kabupaten Sorong Selatan;
 - i. pelabuhan Sungai Kasuweri di Kabupaten Sorong Selatan;
 - j. pelabuhan Kalitami di Kabupaten Sorong Selatan;
 - k. pelabuhan Aranday di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - l. pelabuhan Tembuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - m. pelabuhan Tafereh di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - n. pelabuhan Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - o. pelabuhan Aroba di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - p. pelabuhan Arguni Bawah di Kabupaten Fak Fak;
 - q. pelabuhan Kaimana/Bahumia di Kabupaten Kaimana;
 - r. pelabuhan Kaimana/Wanoma di Kabupaten Kaimana;
 - s. pelabuhan Lengguru di Kabupaten Kaimana;
 - t. pelabuhan Kambrau di Kabupaten Kaimana;
 - u. dermaga Anggi Gidi di Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - v. dermaga Anggi Gida di Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - w. dermaga Danau Uter di Kabupaten Maybrat; dan
 - x. pelabuhan Gunung Botak di Kabupaten Manokwari Selatan.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pelabuhan Waigeo di Kabupaten Raja Ampat;
 - b. pelabuhan Klademak di Kota Sorong;
 - c. pelabuhan Arar di Kabupaten Sorong;
 - d. pelabuhan Manokwari di Kabupaten Manokwari;
 - e. pelabuhan Fak Fak di Kabupaten Fak Fak;
 - f. pelabuhan Kokas di Kabupaten Fak Fak;

- g. pelabuhan Folley di Kabupaten Raja Ampat;
- h. pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama;
- i. pelabuhan Salawati di Kabupaten Sorong;
- j. pelabuhan Batanta di Kabupaten Raja Ampat;
- k. pelabuhan Kaimana di Kabupaten Kaimana;
- l. pelabuhan Inanwatan di Kabupaten Sorong Selatan; dan
- m. pelabuhan Aranday di Kabupaten Teluk Bintuni.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur pelayaran di laut

Pasal 15

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pelabuhan Sorong di Kota Sorong.
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan Fak Fak di Kabupaten Fak Fak;
 - b. pelabuhan Arar di Kabupaten Sorong;
 - c. pelabuhan Kaimana di Kabupaten Kaimana;
 - d. pelabuhan Manokwari di Kabupaten Manokwari;
 - e. pelabuhan Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan;
 - f. pelabuhan Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - g. pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama; dan
 - h. pelabuhan Saukorem di Kabupaten Tambrauw.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. terminal umum Arar di Kabupaten Sorong; dan
 - b. terminal umum Seget Baru di Kabupaten Sorong.
- (6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. terminal khusus bahan bakar minyak dan Gas PT. Petrogas (Basin) Kasim Marine Terminal (Kabupaten Sorong);
 - b. terminal khusus bahan bakar minyak dan Gas SKK MIGAS (Kabupaten Teluk Bintuni);
 - c. terminal khusus bahan bakar minyak PT PERTAMINA - PERSERO (Kabupaten Fak Fak);
 - d. terminal khusus bahan bakar minyak PT PERTAMINA - PERSERO (Kabupaten Manokwari);
 - e. terminal khusus bahan bakar minyak PT. JOB (Kabupaten Sorong);

- f. terminal khusus bahan bakar minyak PT. Pertamina - EP (Kabupaten Sorong);
 - g. terminal khusus bahan bakar minyak PT. Pertamina Jetty RU VII Kilang Kasim (Kabupaten Sorong);
 - h. terminal khusus industri kimia petrokimia (Kabupaten Teluk Bintuni);
 - i. terminal khusus industri penggergajian kayu CV. Klalin Indah Furniture (Kabupaten Sorong);
 - j. terminal khusus industri penggergajian kayu PT. Hartawan Indo Timber (Kabupaten Sorong);
 - k. terminal khusus industri penggergajian kayu PT. Hebei Hanjing Investment (Kabupaten Sorong);
 - l. terminal khusus industri perikanan tangkap PT AVONA MINA LESTARI (Kabupaten Kaimana);
 - m. terminal khusus industri primer hutan kayu PT. Bagus Jaya Abadi (Kabupaten Sorong);
 - n. terminal khusus tempat penimbunan batu pecah PT. Pro Intertec Indonesia (Kota Sorong); dan
 - o. terminal khusus tempat penimbunan tambang nikel PT GAG NIKEL (Kabupaten Raja Ampat).
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pelabuhan perikanan pantai di Kota Sorong;
 - b. pangkalan pendaratan ikan Katapop di Kabupaten Sorong;
 - c. pangkalan pendaratan ikan Klademak di Kota Sorong;
 - d. pangkalan pendaratan ikan Wersar di Kabupaten Sorong Selatan;
 - e. pangkalan pendaratan ikan Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - f. pangkalan pendaratan ikan Dulan Pok-pok di Kabupaten Fak Fak;
 - g. pangkalan pendaratan ikan Coa di Kabupaten Kaimana;
 - h. pangkalan pendaratan ikan Dotir di Kabupaten Teluk Wondama;
 - i. pangkalan pendaratan ikan Sanggeng di Kabupaten Manokwari;
 - j. pangkalan pendaratan ikan Himatota di Kabupaten Kaimana;
 - k. pangkalan pendaratan ikan Avonna di Kabupaten Kaimana;
 - l. pangkalan pendaratan ikan Wimpro di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - m. pangkalan pendaratan ikan Fak Fak di Kabupaten Fak Fak; dan
 - n. pangkalan pendaratan ikan Saonek di Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 16

- (1) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, terdiri dari Alur-pelayaran umum dan perlintasan.
- (2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 17

- (1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Rendani di Kabupaten Manokwari;
 - b. Domine Eduard Osok di Kota Sorong; dan
 - c. Marinda di Kabupaten Raja Ampat.
- (3) Bandar udara pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - b. Babo di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - c. Utarom di Kabupaten Kaimana;
 - d. Inanwatan di Kabupaten Sorong Selatan;
 - e. Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan;
 - f. Ayawasi di Kabupaten Sorong Selatan;
 - g. Merdey di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - h. Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - i. Kambuaya di Kabupaten Maybrat;
 - j. Werur di Kabupaten Tambrau;
 - k. Kebar di Kabupaten Manokwari;
 - l. Torea di Kabupaten Fak Fak;
 - m. Siboru/Fak Fak Baru di Kabupaten Fak Fak;
 - n. Wasior di Kabupaten Teluk Wondama;
 - o. Wasior Baru di Kabupaten Teluk Wondama;
 - p. Segun di Kabupaten Sorong;
 - q. Abreso di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - r. Kabare di Kabupaten Raja Ampat;
 - s. Misool di Kabupaten Raja Ampat;
 - t. Reni di Kabupaten Raja Ampat;
 - u. Dorekar di Kabupaten Raja Ampat; dan
 - v. Meidodga di Kabupaten Manokwari.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 1. Terminal LPG Proyek Tangguh LNG Train 3 (Kabupaten Teluk Bintuni);
 2. Terminal Arar Petrogas Basin Ltd (Kabupaten Sorong);
 3. Terminal Kasim Petrogas Basin Ltd (Kabupaten Sorong);
 4. Terminal Pertamina Asset V Salawati (Kabupaten Sorong);
 5. Terminal Petrosea Offshore Supply Base (Kabupaten Sorong); dan
 6. Terminal EP Sorong.
 - b. jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 1. Pipa Gas LNG Tangguh (Vorwata B) di Kabupaten Teluk Bintuni;
 2. Pipa Gas LNG Tangguh (Vorwata A) di Kabupaten Teluk Bintuni;
 3. Pipa Kasim - Arar di Kabupaten Sorong;
 4. Pipa Petrochina Internasional (Bermuda) di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong;
 5. Pipa Gas Bawah Laut PT.Petrogas di Kabupaten Sorong; dan
 6. Pipa JOB Pertamina Petrochina Salawati.

- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) meliputi:
 1. PLTU Sorong Ex Timika di Kabupaten Sorong; dan
 2. Excess Power PLTU SDIC di Kabupaten Manokwari.
 - b. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) meliputi:
 1. Ex PLTD Igor di Kabupaten Manokwari;
 2. Ex PLTD Nuni di Kabupaten Manokwari;
 3. Ex PLTD Siwi di Kabupaten Manokwari Selatan;
 4. Ex PLTD SP10 Sidey di Kabupaten Manokwari;
 5. Ex PLTD Warkapi di Kabupaten Manokwari;
 6. Ex PLTD Wasior di Kabupaten Teluk Wondama;
 7. PLTD Agreko di Kabupaten Manokwari;
 8. PLTD Aisa di Kabupaten Maybrat;
 9. PLTD Aitinyo di Kabupaten Maybrat;
 10. PLTD Arborek di Kabupaten Raja Ampat;
 11. PLTD Arfu di Kabupaten Tambrauw;
 12. PLTD Arguni di Kabupaten Fak Fak;
 13. PLTD Ayamaru di Kabupaten Maybrat;
 14. PLTD Ayamaru Baru di Kabupaten Maybrat;
 15. PLTD Ayata di Kabupaten Maybrat;
 16. PLTD Ayawasi di Kabupaten Maybrat;
 17. PLTD Beraur di Kabupaten Sorong;
 18. PLTD Bintuni Kampung Lama di Kabupaten Teluk Bintuni;
 19. PLTD Bintuni Kilo 4 di Kabupaten Teluk Bintuni;
 20. PLTD Bomberai di Kabupaten Fak Fak;
 21. PLTD Dabatan di Kabupaten Raja Ampat;
 22. PLTD Disfra di Kabupaten Sorong;
 23. PLTD Eway di Kabupaten Maybrat;
 24. PLTD Fafanlap di Kabupaten Raja Ampat;
 25. PLTD Fef di Kabupaten Tambrauw;
 26. PLTD Folley di Kabupaten Raja Ampat;
 27. PLTD Foromo Jaya di Kabupaten Kaimana;
 28. PLTD Friwen di Kabupaten Raja Ampat;
 29. PLTD Fudima-Warua di Kabupaten Kaimana;
 30. PLTD Furnusu di Kabupaten Kaimana;
 31. PLTD Gag di Kabupaten Raja Ampat;
 32. PLTD Gamta di Kabupaten Raja Ampat;
 33. PLTD Gisim di Kabupaten Sorong;
 34. PLTD Gusi di Kabupaten Kaimana;
 35. PLTD Harapan Jaya di Kabupaten Raja Ampat;
 36. PLTD Inanwatan di Kabupaten Sorong Selatan;
 37. PLTD Isim di Kabupaten Manokwari Selatan;
 38. PLTD Jefman di Kabupaten Raja Ampat;
 39. PLTD K. Kapas di Kabupaten Fak Fak;
 40. PLTD Kabare di Kabupaten Raja Ampat;
 41. PLTD Kaimana di Kabupaten Kaimana;
 42. PLTD Kalobo di Kabupaten Raja Ampat;
 43. PLTD Kasimle di Kabupaten Sorong;

44. PLTD Klademak di Kota Sorong;
45. PLTD Klasaman di Kota Sorong;
46. PLTD Klasin di Kabupaten Sorong;
47. PLTD Kokas di Kabupaten Fak Fak;
48. PLTD Kokas Baru di Kabupaten Fak Fak;
49. PLTD Kumurkek di Kabupaten Maybrat;
50. PLTD Lilinta di Kabupaten Raja Ampat;
51. PLTD Lobo di Kabupaten Kaimana;
52. PLTD Lopintol di Kabupaten Raja Ampat;
53. PLTD Makbon di Kabupaten Sorong;
54. PLTD Malakuli di Kabupaten Fak Fak;
55. PLTD Mandoni di Kabupaten Fak Fak;
56. PLTD Manopi di Kabupaten Teluk Wondama;
57. PLTD Mansinam di Kabupaten Manokwari;
58. PLTD Mega di Kabupaten Tambrauw;
59. PLTD Neney di Kabupaten Manokwari Selatan;
60. PLTD Oransbari di Kabupaten Manokwari Selatan;
61. PLTD P. Lemon di Kabupaten Manokwari;
62. PLTD Pam di Kabupaten Raja Ampat;
63. PLTD Pemda Babo di Kabupaten Teluk Bintuni;
64. PLTD PLN Babo di Kabupaten Teluk Bintuni;
65. PLTD Raam di Kota Sorong;
66. PLTD Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat;
67. PLTD Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan;
68. PLTD Rumberpon di Kabupaten Teluk Wondama;
69. PLTD Rurumo di Kabupaten Kaimana;
70. PLTD Saharei di Kabupaten Fak Fak;
71. PLTD Sailolof di Kabupaten Sorong;
72. PLTD Samate di Kabupaten Raja Ampat;
73. PLTD Sanggeng di Kabupaten Manokwari;
74. PLTD Saporken di Kabupaten Raja Ampat;
75. PLTD Saukabu di Kabupaten Raja Ampat;
76. PLTD Saukorem di Kabupaten Tambrauw;
77. PLTD Saupapir di Kabupaten Raja Ampat;
78. PLTD Sausafor di Kabupaten Tambrauw;
79. PLTD Sauwandarek di Kabupaten Raja Ampat;
80. PLTD Sawatewara di Kabupaten Kaimana;
81. PLTD Sawinggrai di Kabupaten Raja Ampat;
82. PLTD Seget di Kabupaten Sorong;
83. PLTD Segun di Kabupaten Sorong;
84. PLTD Siboru di Kabupaten Fak Fak;
85. PLTD Soop di Kota Sorong;
86. PLTD Sururey di Pegunungan Arfak;
87. PLTD Tahota di Kabupaten Manokwari Selatan;
88. PLTD Tanusan di Kabupaten Kaimana;
89. PLTD Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan;
90. PLTD Tetar di Kabupaten Fak Fak;
91. PLTD Tomolol di Kabupaten Raja Ampat;
92. PLTD Ure/Muri di Kabupaten Kaimana;
93. PLTD Usaha Jaya di Kabupaten Raja Ampat;
94. PLTD Waigama di Kabupaten Raja Ampat;
95. PLTD Waisilip di Kabupaten Raja Ampat;
96. PLTD Wanurian di Kabupaten Sorong;
97. PLTD Warsambin di Kabupaten Raja Ampat;
98. PLTD Weri di Kabupaten Fak Fak;

99. PLTD Werpigan di Kabupaten Fak Fak;
 100. PLTD Windesi di Kabupaten Teluk Wondama;
 101. PLTD Yellu di Kabupaten Raja Ampat;
 102. PLTD Yenbekwan di Kabupaten Raja Ampat;
 103. PLTD Yenbeser di Kabupaten Raja Ampat;
 104. PLTD Yenbuba di Kabupaten Raja Ampat;
 105. PLTD Yensewai Timur di Kabupaten Raja Ampat;
 106. PLTD Yenwaupnor di Kabupaten Raja Ampat; dan
 107. PLTD/S Saonek di Kabupaten Raja Ampat.
- c. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) meliputi:
1. Ex PLTS Kebar di Kabupaten Tambrauw;
 2. PLTS + Batrai Manokwari di Kabupaten Manokwari;
 3. PLTS Antalisa di Kabupaten Fak Fak;
 4. PLTS Arfai di Kabupaten Manokwari;
 5. PLTS Boiya di Kabupaten Kaimana;
 6. PLTS Byaklogfe di Kabupaten Sorong Selatan;
 7. PLTS Coremuri/Ombapamuku di Kabupaten Kaimana;
 8. PLTS Darembang di Kabupaten Fak Fak;
 9. PLTS Dasri di Kabupaten Sorong;
 10. PLTS Esyum di Kabupaten Tambrauw;
 11. PLTS Faur di Kabupaten Fak Fak;
 12. PLTS Fior di Kabupaten Fak Fak;
 13. PLTS Goras di Kabupaten Fak Fak;
 14. PLTS Harirapara di Kabupaten Kaimana;
 15. PLTS Hopmare di Kabupaten Tambrauw;
 16. PLTS Klatim di Kabupaten Sorong;
 17. PLTS Klawor di Kabupaten Sorong;
 18. PLTS Klayas di Kabupaten Sorong;
 19. PLTS Luwelala di Kabupaten Sorong;
 20. PLTS Maimai di Kabupaten Kaimana;
 21. PLTS Majemau di Kabupaten Sorong;
 22. PLTS Mansinam di Kabupaten Manokwari;
 23. PLTS Miyah di Kabupaten Tambrauw;
 24. PLTS Mlaron di Kabupaten Sorong;
 25. PLTS Namatota di Kabupaten Kaimana;
 26. PLTS Renis di Kabupaten Maybrat;
 27. PLTS Reremi di Kabupaten Manokwari;
 28. PLTS Rumbati di Kabupaten Fak Fak;
 29. PLTS Rumberpon di Kabupaten Teluk Wondama;
 30. PLTS Sakamerin di Kabupaten Sorong;
 31. PLTS Siakwa di Kabupaten Tambrauw;
 32. PLTS Suswa di Kabupaten Maybrat;
 33. PLTS Urubika di Kabupaten Kaimana;
 34. PLTS Ururu di Kabupaten Kaimana;
 35. PLTS Waho di Kabupaten Kaimana;
 36. PLTS Wainlabat di Kabupaten Sorong;
 37. PLTS Wasingsan di Kabupaten Sorong; dan
 38. PLTS Wisbiak di Kabupaten Sorong.
- d. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) meliputi:
1. PLTMH Anjai di Kabupaten Tambrauw;
 2. PLTMH Asyum di Kabupaten Tambrauw;
 3. PLTMH Ayamarit di Kabupaten Tambrauw;
 4. PLTMH Batu di Kabupaten Tambrauw;
 5. PLTMH Kasi Atas di Kabupaten Tambrauw;
 6. PLTMH Kasi Bawah di Kabupaten Tambrauw;

7. PLTMH Kwoor Atas di Kabupaten Tambrauw;
 8. PLTMH Kwoor Bawah di Kabupaten Tambrauw;
 9. PLTMH Miyah di Kabupaten Tambrauw;
 10. PLTMH Prafi di Kabupaten Manokwari;
 11. PLTMH Siakwa di Kabupaten Tambrauw;
 12. PLTMH Warabiyai di Kabupaten Tambrauw;
 13. PLTMH Wekari di Kabupaten Tambrauw;
 14. PLTMH Wepai di Kabupaten Tambrauw; dan
 15. PLTMH Werba di Kabupaten Fak Fak.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) meliputi:
1. Excess Power PLTMG BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni;
 2. PLTMG Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 3. PLTMG Fak Fak di Kabupaten Fak Fak;
 4. PLTMG Kaimana di Kabupaten Kaimana;
 5. PLTMG Kaimana 2 di Kabupaten Kaimana;
 6. PLTMG Manokwari di Kabupaten Manokwari;
 7. PLTMG Manokwari 2/Andai di Kabupaten Manokwari;
 8. PLTMG Manokwari 3 di Kabupaten Manokwari;
 9. PLTMG Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat;
 10. PLTMG Sorong di Kabupaten Sorong;
 11. PLTMG Sorong 2 di Kabupaten Sorong;
 12. PLTG/MG Sorong di Kabupaten Sorong; dan
 13. PLTBm Kaimana 2 di Kabupaten Kaimana.
- f. Pembangkit listrik lainnya, berupa PLT EBT Base Sorong 3 di Kabupaten Sorong.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (6) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. SUTT gardu induk Aimas - gardu induk Sorong;
 - b. SUTT gardu induk Sorong - gardu induk Rufey;
 - c. SUTT PLTMG Sorong (50 MW) – gardu induk Aimas; dan
 - d. SUTT PLTMG Manokwari – gardu induk Manokwari.
- (7) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. distribusi Bintuni 1 (satu); dan
 - b. distribusi Bintuni 2 (dua).
- (8) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. kabel listrik bawah laut (Sorong);
 - b. kabel listrik Sorong-Waisai (P.Waigeo); dan
 - c. kabel listrik bawah laut dari Tg Tagopah.
- (9) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. gardu induk Aimas di Kabupaten Sorong;
 - b. gardu induk Sorong di Kota Sorong;
 - c. gardu induk Prafi di Kabupaten Manokwari;
 - d. gardu induk Ransiki di Kabupaten Manokwari;
 - e. gardu induk Rufey di Kota Sorong; dan
 - f. gardu induk Sorong di Kota Sorong.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan tetap, meliputi:
 1. kabel darat Bintuni – Wondama;
 2. kabel darat Fak Fak – Kaimana;
 3. kabel darat Kaimana – Papua;
 4. kabel darat Sorong – Manokwari;
 5. kabel telekomunikasi Palapa Ring Timur 11 (Manokwari-Numfor);
 6. kabel telekomunikasi Palapa Ring Timur 11 (Nabire-Raisei);
 7. kabel telekomunikasi Palapa Ring Timur 11 (Raisei-Ransiki);
 8. kabel telekomunikasi Palapa Ring Timur 12-13 (Bintuni-Tanggung);
 9. kabel telekomunikasi Palapa Ring Timur Project 12-13 (Teminabuan-Tanggung);
 10. kabel Telkom (Fak Fak-Banda);
 11. kabel Telkom (Fak Fak-Kaimana);
 12. kabel Telkom (Manokwari-Jayapura);
 13. kabel Telkom (Sorong-Fak Fak);
 14. kabel Telkom (Sorong-Labuhan);
 15. kabel Telkom (Sorong-Manokwari);
 16. kabel Telkom (Tambrauw-Manokwari);
 17. kabel Telkom (Waisai-Sorong);
 18. palapa ring Kabel Telkom (Sorong-Manokwari); dan
 19. palapa ring Kabel Telkom BMH Waisai ke BU Sorong.
 - b. Infrastruktur jaringan tetap meliputi:
 1. BMH Palapa Timur Telematika (Kabupaten Manokwari Selatan);
 2. BMH Palapa Timur Telematika (Kabupaten Manokwari);
 3. BMH Palapa Timur Telematika (Kabupaten Sorong Selatan);
 4. BMH Palapa Timur Telematika (Kabupaten Teluk Bintuni);
 5. BMH Palapa Timur Telematika (Kabupaten Teluk Wondama);
 6. BMH Palapa Timur Telematika 2 (Kabupaten Teluk Bintuni);
 7. BMH Telkom Indonesia (Kabupaten Kaimana);
 8. BMH Telkom Indonesia (Kabupaten Manokwari); dan
 9. BMH Telkom Indonesia (Kabupaten Raja Ampat).
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (4) Jaringan bergerak terestrial, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.
- (5) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) meliputi:
 1. BTS – Aisa;
 2. BTS – Arus;
 3. BTS – Atori;
 4. BTS - Bangun Mulya;
 5. BTS - Barma Barat;

6. BTS - Barma Baru;
7. BTS - Bori;
8. BTS - Cumnaji;
9. BTS - Eles;
10. BTS - Fatase;
11. BTS - Gamta;
12. BTS - Inyora;
13. BTS - Isogo;
14. BTS - Jagiro;
15. BTS - Jahabra;
16. BTS - Kalibiru;
17. BTS - Kapatcol;
18. BTS - Kayabo;
19. BTS - Kofalit;
20. BTS - Korewatara;
21. BTS - Lilinta;
22. BTS - Maan;
23. BTS - Menyembru;
24. BTS - Mesomda;
25. BTS - Meyom;
26. BTS - Mukamat;
27. BTS - Pasir Putih;
28. BTS - Puragi;
29. BTS - Renis;
30. BTS - Riendo;
31. BTS - Ruwewes;
32. BTS - Sahae;
33. BTS - Samate;
34. BTS - Sandei;
35. BTS - Sara;
36. BTS - Sariai;
37. BTS - Sasnek;
38. BTS - Selpele;
39. BTS - Seni;
40. BTS - Senopi;
41. BTS - Sesor;
42. BTS - Seya;
43. BTS - Sibena Permai;
44. BTS - Sorry;
45. BTS - Suga;
46. BTS - Suswa;
47. BTS - Tambani;
48. BTS - Tolobi;
49. BTS - Tomu;
50. BTS - Urbinasopen;
51. BTS - Wajarek;
52. BTS - Warga Nusa II; dan
53. BTS - Wehali.

- b. Jaringan bergerak satelit berupa sistem satelit VSAT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi Kewenangan Nasional meliputi:
 1. Aimasi di Kabupaten Manokwari;
 2. Oransbari di Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan; dan
 3. Wariori di Distrik Masni Kabupaten Manokwari.
 - b. Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi meliputi:
 1. Bomberay di Kabupaten Fak Fak;
 2. Muturi di Kabupaten Teluk Bintuni;
 3. Majaran di Kabupaten Sorong;
 4. Majener di Kabupaten Sorong;
 5. Makbusun di Kabupaten Sorong;
 6. Mariyat di Kabupaten Sorong;
 7. Matawolot di Kabupaten Sorong; dan
 8. Waigo/Moswaren di Kabupaten Sorong Selatan.
 - c. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten meliputi:
 1. Bimajaya Jaya di Kabupaten Fak Fak;
 2. Daerah Irigasi Kassi di Kabupaten Manokwari;
 3. Waijan di Kabupaten Raja Ampat;
 4. Kalobo di Kabupaten Raja Ampat;
 5. Waibu di Kabupaten Raja Ampat;
 6. Waimeci di Kabupaten Raja Ampat;
 7. Aimas di Kabupaten Sorong;
 8. Modan II/ Malaos di Kabupaten Sorong;
 9. Sisipan di Kabupaten Sorong;
 10. Klamalu di Kabupaten Sorong;
 11. Klamono di Kabupaten Sorong;
 12. Makbalim di Kabupaten Sorong;
 13. Makotyamsa di Kabupaten Sorong;
 14. Malaweale di Kabupaten Sorong;
 15. Malawili di Kabupaten Sorong; dan
 16. Modan I/ Walal di Kabupaten Sorong.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di:
 - a. tanggul Sungai Iray di Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - b. tanggul Sungai Waibon di Kabupaten Raja Ampat;
 - c. tanggul Sungai Melati Raya KM 9,5 di Kota Sorong;
 - d. tanggul Sungai Ibrarine Swapen Perkebunan di Kabupaten Manokwari;
 - e. tanggul Sungai Wosi Tahap 7 di Kabupaten Manokwari;
 - f. tanggul Kali Mati Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - g. tanggul Sungai Sakartemen di Kabupaten Fak Fak;
 - h. tanggul Kali Mangguapi/Marina di Kabupaten Manokwari;
 - i. tanggul Kali KM 10 di Kota Sorong;
 - j. tanggul Sungai Bomberai di Kabupaten Fak Fak;
 - k. tanggul Sungai Komawlin di Kabupaten Sorong Selatan;

- l. tanggul Sungai Andai Kampung Buton di Kabupaten Manokwari; dan
 - m. tanggul Sungai Macuan SP V Masni di Kabupaten Manokwari.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa bendung meliputi:
- a. bendung Bomberay 1 di Kabupaten Fak Fak;
 - b. bendung Bomberay 2 di Kabupaten Fak Fak;
 - c. bendung Majaran di Kabupaten Sorong;
 - d. bendung Majener di Kabupaten Sorong;
 - e. bendung Matawolot 1 di Kabupaten Sorong;
 - f. bendung Matawolot 2 di Kabupaten Sorong;
 - g. bendung Muturi di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - h. bendung Prafi di Kabupaten Manokwari;
 - i. bendung Makbusun 1 di Kabupaten Sorong;
 - j. bendung Makbusun 2 di Kabupaten Sorong;
 - k. bendung Mariyat di Kabupaten Sorong;
 - l. bendungan Warsamson di Kabupaten Sorong;
 - m. embung/WS Kamundan-Sebyar di Kabupaten Raja Ampat; dan
 - n. embung WS Omba di Kabupaten Fak Fak.
- (5) Jaringan prasarana sumberdaya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. IPAL berada di Kota Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Manokwari.
 - b. IPLT berada di Kota Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat.
 - c. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga, meliputi:
 1. Individu diarahkan di seluruh wilayah kabupaten dan kota; dan
 2. Komunal terdapat di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
- (4) Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengelolaan limbah industri dan pertambangan dengan memperhatikan kualitas lingkungan di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:
 - a. TPA Makbon di Kabupaten Sorong;

- b. TPA Fak Fak di Kabupaten Fak Fak;
- c. TPA Tanggaromi di Kabupaten Kaimana;
- d. TPA Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat;
- e. TPA Sowi di Kabupaten Manokwari; dan
- f. TPA Hasmoh di Kabupaten Sorong Selatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup wilayah Provinsi Papua Barat seluas kurang lebih 20.559.949 (dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar.
- (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.693.915 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas) hektar, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan ekosistem mangrove; dan
- f. badan air.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seluas kurang lebih 1.671.021 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh satu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan lindung gambut.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.

- (3) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di:
- a. Kabupaten Fak Fak;
 - b. Kabupaten Kaimana;
 - c. Kabupaten Manokwari;
 - d. Kabupaten Manokwari Selatan;
 - e. Kabupaten Maybrat;
 - f. Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - g. Kabupaten Raja Ampat;
 - h. Kabupaten Sorong;
 - i. Kabupaten Sorong Selatan;
 - j. Kabupaten Tambrauw;
 - k. Kabupaten Teluk Bintuni; dan
 - l. Kabupaten Teluk Wondama.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 8.879 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar, ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi:
- a. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) menjadi kawasan permukiman (PM) selanjutnya disingkat PTB/PM seluas kurang lebih 6.868 (enam ribu delapan ratus enam puluh delapan) hektar, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.
 - b. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) menjadi kawasan pertahanan dan keamanan (HK) selanjutnya disingkat PTB/HK seluas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar, tersebar di :
 1. Kabupaten Kaimana; dan
 2. Kota Sorong.
 - c. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) menjadi kawasan pertambangan dan energi (TE) selanjutnya disingkat PTB/TE seluas kurang lebih 841 (delapan ratus empat puluh satu) hektar, yang tersebar di:
 1. Kabupaten Manokwari;
 2. Kabupaten Manokwari Selatan;
 3. Kabupaten Raja Ampat;
 4. Kabupaten Tambrauw;
 5. Kabupaten Teluk Bintuni; dan
 6. Kabupaten Teluk Wondama.
 - d. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) menjadi kawasan pertanian (P) selanjutnya disingkat PTB/P seluas kurang lebih 1.066 (seribu enam puluh enam) hektar, yang tersebar di:
 1. Kabupaten Manokwari Selatan;
 2. Kabupaten Raja Ampat;
 3. Kabupaten Sorong;
 4. Kabupaten Sorong Selatan;
 5. Kabupaten Tambrauw; dan
 6. Kota Sorong.
 - e. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) menjadi kawasan transportasi (TR) selanjutnya disingkat PTB/TR seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar, yang tersebar di:
 1. Kabupaten Maybrat;
 2. Kabupaten Raja Ampat;

3. Kabupaten Sorong Selatan; dan
 4. Kabupaten Teluk Wondama.
- (5) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau, dan kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat, seluas kurang lebih 37.703 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga) hektar terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas kurang lebih 5.820.488 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektar, meliputi:
- a. Cagar Alam Waigeo Barat di Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Cagar Alam Waigeo Timur di Kabupaten Raja Ampat;
 - c. Cagar Alam Pulau Batanta Barat di Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Cagar Alam Pulau Salawati di Kabupaten Raja Ampat;
 - e. Cagar Alam Pulau Misool di Kabupaten Raja Ampat;
 - f. Cagar Alam Pulau Kofiau di Kabupaten Raja Ampat;
 - g. Cagar Alam Torobi di Kabupaten Raja Ampat;
 - h. Cagar Alam Pegunungan Tamrau Utara di Kabupaten Tambrauw;
 - i. Cagar Alam Pantai Sausapor di Kabupaten Tambrauw;
 - j. Cagar Alam Pegunungan Wondiboy di Kabupaten Teluk Wondama;
 - k. Cagar Alam Wagura Kote di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - l. Cagar Alam Teluk Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - m. Cagar Alam Pegunungan Fak Fak di Kabupaten Fak Fak;
 - n. Cagar Alam Pegunungan Kumawa, Kabupaten Kaimana;
 - o. Cagar Alam Pegunungan Tamrau Selatan di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Maybrat;
 - p. Cagar Alam Pegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Manokwari Selatan;
 - q. Suaka Margasatwa Sidei Wibain di Kabupaten Manokwari;
 - r. Suaka Margasatwa Mumbrani-Kaironi di Kabupaten Manokwari;
 - s. Suaka Margasatwa Pulau Venu di Kabupaten Kaimana;
 - t. Taman Wisata Alam Gunung Meja di Kabupaten Manokwari;
 - u. Taman Wisata Alam Sorong di Kota Sorong;
 - v. Taman Wisata Alam Beriat di Kabupaten Sorong Selatan;
 - w. Taman Wisata Alam Klamono di Kabupaten Sorong;
 - x. Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Wondama;
 - y. Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Wondama;

- z. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Jeen Womom di Kabupaten Tambrauw;
 - aa. Kawasan konservasi perairan Taman Pesisir Teluk Berau di Kabupaten Fak Fak;
 - bb. Kawasan konservasi perairan Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bosch di Kabupaten Fak Fak;
 - cc. Kawasan konservasi perairan Kepulauan Asia dan Ayau di Kabupaten Raja Ampat;
 - dd. Kawasan konservasi perairan Teluk Mayalibit di Kabupaten Raja Ampat;
 - ee. Kawasan konservasi perairan Selat Sampier di Kabupaten Raja Ampat;
 - ff. Kawasan konservasi perairan Kepulauan Misool di Kabupaten Raja Ampat;
 - gg. Kawasan konservasi perairan Kapulauan Kofiau – Boo di Kabupaten Raja Ampat;
 - hh. Kawasan konservasi perairan Kepulauan Fam di Kabupaten Raja Ampat;
 - ii. SAP Kepulauan Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat;
 - jj. SAP Kepulauan Waigeo sebelah barat di Kabupaten Raja Ampat;
 - kk. Kawasan Konservasi Perairan KKPD Kaimana di Kabupaten Kaimana;
 - ll. Kawasan Konservasi Perairan Teluk Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - mm. Kawasan Konservasi Perairan KKPD Seribu Satu Sungai Teo Enebikia di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan;
 - nn. Kawasan Konservasi Perairan Misoo Utara di Kabupaten Raja Ampat;
 - oo. Kawasan Konservasi Perairan KKPD Makbon di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong;
 - pp. Bekas kapal dan pesawat tenggelam sebagai akibat perang dunia II di Kabupaten Tambrauw;
 - qq. Kargo Okinoyama Maru di Kabupaten Tambrauw; dan
 - rr. Maritim Cross Wreck Mansinam di Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 4.989 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) hektar, ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi:
- a. usulan perubahan kawasan konservasi (KS) menjadi kawasan permukiman (PM) selanjutnya disingkat KS/PM seluas kurang lebih 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) hektar, tersebar di:
 1. Kabupaten Manokwari;
 2. Kabupaten Manokwari Selatan;
 3. Kabupaten Pegunungan Arfak;
 4. Kabupaten Raja Ampat;
 5. Kabupaten Sorong;
 6. Kabupaten Sorong Selatan;
 7. Kabupaten Tambrauw;
 8. Kabupaten Teluk Bintuni;
 9. Kabupaten Teluk Wondama; dan
 10. Kota Sorong.
 - b. usulan perubahan kawasan konservasi (KS) menjadi kawasan pertahanan dan keamanan (HK) selanjutnya disingkat KS/HK seluas kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) hektar terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - c. usulan perubahan kawasan konservasi (KS) menjadi kawasan pertambangan dan energi (TE) selanjutnya disingkat KS/TE seluas

- kurang lebih 3.860 (tiga ribu delapan ratus enam puluh) hektar terdapat di Kabupaten Raja Ampat; dan
- d. usulan perubahan kawasan konservasi (KS) menjadi kawasan transportasi (TR) selanjutnya disingkat KS/TR seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar terdapat di wilayah laut.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.
 - (4) Kawasan konservasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sesuai Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 27

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, seluas kurang lebih 4.607 (empat ribu enam ratus tujuh) hektar.
- (2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. Kabupaten Fak Fak;
 - b. Kabupaten Kaimana;
 - c. Kabupaten Manokwari;
 - d. Kabupaten Maybrat;
 - e. Kabupaten Raja Ampat; dan
 - f. Kabupaten Tambrauw.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 28

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas kurang lebih 32.782 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar tersebar di:
 - a. Kabupaten Fak Fak;
 - b. Kabupaten Kaimana;
 - c. Kabupaten Manokwari;
 - d. Kabupaten Manokwari Selatan;
 - e. Kabupaten Raja Ampat;
 - f. Kabupaten Sorong;
 - g. Kabupaten Sorong Selatan;
 - h. Kabupaten Tambrauw;
 - i. Kabupaten Teluk Bintuni;
 - j. Kabupaten Teluk Wondama; dan
 - k. Wilayah laut.
- (2) Kawasan ekosistem mangrove di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan ekosistem mangrove diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Badan Air

Pasal 29

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas kurang lebih 127.312 (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas) hektar, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 30

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 12.866.034 (dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat) hektar, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas 5.477.139 (lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan) hektar meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 36.721 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar, ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi:
 - a. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) selanjutnya disingkat KHP/PTB seluas kurang lebih 676 (enam ratus tujuh puluh enam) hektar terdapat di Kota Sorong;
 - b. usulan perubahan kawasan hutan produksi (KHP) menjadi kawasan pariwisata (W) selanjutnya disingkat KHP/W seluas kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) hektar, tersebar di:
 1. Kabupaten Raja Ampat; dan
 2. Kabupaten Sorong.
 - c. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan permukiman (PM) selanjutnya disingkat KHP/PM seluas kurang lebih 11.411 (sebelas ribu empat ratus sebelas) hektar, tersebar di seluruh wilayah Provinsi;

- d. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan (HK) selanjutnya disingkat KHP/HK seluas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar, tersebar di:
 - 1. Kabupaten Manokwari; dan
 - 2. Kabupaten Sorong.
 - e. usulan perubahan hutan produksi (KHP) menjadi kawasan transportasi (TR) selanjutnya disingkat KHP/TR seluas kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hektar tersebar di:
 - 1. Kabupaten Fak Fak;
 - 2. Kabupaten Raja Ampat;
 - 3. Kabupaten Tambrauw; dan
 - 4. Kabupaten Teluk Wondama.
 - f. usulan perubahan kawasan hutan produksi (KHP) menjadi kawasan pertambangan dan energi (TE) selanjutnya disingkat KHP/TE seluas kurang lebih 18.369 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan) hektar tersebar di:
 - 1. Kabupaten Raja Ampat;
 - 2. Kabupaten Sorong
 - 3. Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - 4. Kabupaten Teluk Bintuni.
 - g. usulan perubahan hutan produksi (KHP) menjadi kawasan pertanian (P) selanjutnya disingkat KHP/P seluas kurang lebih 5.857 (lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektar, tersebar di:
 - 1. Kabupaten Fak Fak;
 - 2. Kabupaten Kaimana;
 - 3. Kabupaten Manokwari;
 - 4. Kabupaten Manokwari Selatan;
 - 5. Kabupaten Raja Ampat;
 - 6. Kabupaten Sorong;
 - 7. Kabupaten Tambrauw; dan
 - 8. Kabupaten Teluk Bintuni.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 32

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b seluas kurang lebih lebih 103.108 (seratus tiga ribu seratus delapan) hektar tersebar di:

- a. Kabupaten Fak Fak;
- b. Kabupaten Kaimana;
- c. Kabupaten Manokwari;
- d. Kabupaten Manokwari Selatan;
- e. Kabupaten Pegunungan Arfak;
- f. Kabupaten Sorong;
- g. Kabupaten Tambrauw;
- h. Kabupaten Teluk Bintuni; dan
- i. Kabupaten Teluk Wondama.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 565.163 (lima ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga) hektar meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) selanjutnya disingkat P/PTB seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar, ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*), terdapat di Kabupaten Kaimana.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.
- (4) Kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 126.813 (seratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga belas) hektar terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d seluas kurang lebih 6.396.458 (enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) hektar, meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
- (3) Kawasan perikanan budi daya berupa laut dan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebar di:
 - a. Kabupaten Fak Fak; dan
 - b. Kabupaten Raja Ampat.
- (4) Kawasan perikanan di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e seluas kurang lebih 46.313 (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga belas) hektar, meliputi pertambangan mineral (logam), pertambangan mineral (batuan), pertambangan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi tersebar di:
 1. Kabupaten Manokwari Selatan;
 2. Kabupaten Maybrat;

3. Kabupaten Pegunungan Arfak;
 4. Kabupaten Raja Ampat;
 5. Kabupaten Sorong;
 6. Kabupaten Teluk Bintuni;
 7. Kabupaten Teluk Wondama; dan
 8. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan pertambangan dan energi di wilayah laut diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f seluas kurang lebih 6.351 (enam ribu tiga ratus lima puluh satu) hektar, tersebar di:

- a. Kabupaten Fak Fak;
- b. Kabupaten Manokwari;
- c. Kabupaten Sorong; dan
- d. Kabupaten Teluk Bintuni.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g berupa wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya seluas kurang lebih 66.684 (enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebar di:
 - a. Kabupaten Fak Fak;
 - b. Kabupaten Kaimana;
 - c. Kabupaten Raja Ampat; dan
 - d. Wilayah laut.
- (3) Kawasan pariwisata di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 38

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h seluas kurang lebih 183.874 (seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 39

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf I terdiri dari kawasan transportasi udara dan kawasan transportasi laut, seluas kurang lebih 20.867 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh) hektar tersebar di:
 - a. Kabupaten Fak Fak;
 - b. Kabupaten Kaimana;
 - c. Kabupaten Manokwari;
 - d. Kabupaten Manokwari Selatan;
 - e. Kabupaten Maybrat;
 - f. Kabupaten Raja Ampat;
 - g. Kabupaten Sorong;
 - h. Kabupaten Sorong Selatan;
 - i. Kabupaten Tambrauw;
 - j. Kabupaten Teluk Bintuni;
 - k. Kota Sorong; dan
 - l. Wilayah laut.
- (2) Kawasan transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan menjadi kawasan hutan produksi (KHP) selanjutnya disingkat TR/KHP seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar, ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*), terdapat di Kabupaten Fak Fak.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.
- (4) Kawasan transportasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan pelabuhan diatur dalam KKPR Laut diatur lebih lanjut dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sesuai Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j seluas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar tersebar di:
 - a. Kabupaten Kaimana;
 - b. Kabupaten Manokwari; dan
 - c. Kota Sorong.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aset serta rencana pertahanan dan keamanan lainnya yang telah ditetapkan menurut rencana wilayah pertahanan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan agropolitan regional meliputi:
 1. kawasan agropolitan dan peternakan sapi di Kabupaten Fak Fak (Distrik Bomberay), Kabupaten Tambrau (Dataran Kebar) dan Kabupaten Sorong (Distrik Salawati);
 2. Kawasan Agropolitan Pegunungan Arfak berbasis hortikultura (peranian sayuran dataran tinggi) di Kabupaten Pegunungan Arfak (Distrik Anggi, Distrik Hingk, dan Distrik Minyambouw); dan
 3. Kawasan Agrowisata Fak Fak-Kaimana (komoditas pala) di Kabupaten Fak Fak dan Kabupaten Kaimana.
 - b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdapat di Kabupaten Sorong;
 - c. kawasan potensi bioetanol di Kabupaten Sorong Selatan (Distrik Kokoda);
 - d. kawasan minyak dan gas bumi (migas) meliputi:
 1. Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Kaimana;
 2. Kawasan LNG di Kabupaten Teluk Bintuni; dan
 3. Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Sorong (Distrik Klamono, Distrik Klaili, Distrik Salawati Selatan, Distrik Salawati, dan Selat Sele) dan Kabupaten Raja Ampat (Distrik Salawati Utara).
 - e. kawasan pariwisata meliputi:
 1. Wisata Bahari Teluk Triton di Kabupaten Kaimana;
 2. Wisata Kota Manokwari di Teluk Sawaibu Kabupaten Manokwari;
 3. Danau Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak;
 4. Wisata religi dan budaya di Kabupaten Manokwari (Pulau Mansinam); dan
 5. Agrowisata Kinam dan Ubadare di Kabupaten Fak Fak (Distrik Kokas).
 - f. kawasan industri meliputi:
 1. Pabrik Semen Maruni di Kabupaten Manokwari; dan
 2. Petrokimia Onar di Kabupaten Teluk Bintuni (Distrik Sumuri).
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Budaya Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Manokwari Selatan; dan
 - b. Kawasan Lingkar Manokwari Timur (Wawi, Pasir Putih, Pulau Mansinam, Gunung Meja, Anggori dan Pantai Petrus Kafiari) di Kabupaten Manokwari.

- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan *Geopark* dan perlindungan Ekosistem Laut dan Terumbu Karang yang meliputi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Asia dan Ayau, Konservasi Perairan Teluk Mayalibit, Konservasi Perairan Selat Dampier, Konservasi Perairan Kepulauan Fam, Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau-Boo, Konservasi Perairan Misool Utara, Konservasi Perairan Kepulauan Misool, Suaka Alam Pesisir Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Suaka Alam Pesisir Kepulauan Raja Ampat, Cagar Alam Waigeo Timur, Cagar Alam Waigeo Barat, Cagar Alam Pulau Misool, Cagar Alam Selat Sagawin, Cagar Alam Pulau Salawati di Kawasan Perairan Kepulauan Raja Ampat;
 - b. Koridor Mahkota Permata Tanah Papua yang meliputi koridor Konservasi Taman Pesisir Jeen Womom, Cagar Alam Tambrau Utara, Cagar Alam Tambrau Selatan, Cagar Alam Pegunungan Arfak, Cagar Alam Teluk Bintuni, dan Keanekaragaman hayati rumput Kebar. Kawasan ini tersebar di Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Teluk Bintuni;
 - c. Taman Wisata Alam Gunung Meja Kabupaten Manokwari;
 - d. Kawasan *Geopark* Mesozoik Mawi (Gunung Botak) di Kabupaten Manokwari Selatan; dan
 - e. Kawasan *Geopark* Pegunungan Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Manokwari Selatan.
- (5) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 42

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan Agropolitan Regional adalah untuk mewujudkan kawasan agropolitan regional sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi skala regional secara berkelanjutan;
 - b. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah untuk mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi secara nasional;
 - c. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan Potensi Bioetanol adalah untuk mewujudkan kawasan Potensi Bioetanol sebagai salah satu sumber energi skala regional;
 - d. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan minyak dan gas bumi adalah untuk mewujudkan kawasan minyak dan gas bumi sebagai salah satu sumber energi skala regional;
 - e. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan Pariwisata adalah untuk mewujudkan kawasan pariwisata sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional; dan

- f. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan industri adalah untuk mewujudkan pengembangan kawasan industri skala regional.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Budaya Arfak adalah untuk mewujudkan Kawasan Budaya Arfak sebagai kawasan konservasi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal; dan
 - b. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Lingkar Manokwari Timur adalah untuk mewujudkan Kawasan Lingkar Mansinam sebagai kawasan religi yang ditunjang dengan wisata.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan *Geopark*, dan ekosistem laut dan terumbu karang adalah mewujudkan kawasan *Geopark*, dan ekosistem laut dan terumbu karang sebagai kawasan perlindungan dan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, mempertahankan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya;
 - b. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan Koridor Mahkota Permata Tanah Papua adalah mewujudkan kawasan Koridor Mahkota Permata Tanah Papua sebagai kawasan perlindungan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, mempertahankan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya;
 - c. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Taman Wisata Alam Gunung Meja adalah sebagai kawasan perlindungan dan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, mempertahankan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya;
 - d. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa *Geopark* Mesozoik Mawi (Gunung Botak) adalah sebagai kawasan perlindungan dan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, mempertahankan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya; dan
 - e. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa *Geopark* Pegunungan Arfak adalah sebagai kawasan perlindungan dan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, mempertahankan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 43

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan agropolitan regional meliputi:
 - 1. penetapan dan pengembangan pertanian unggulan;
 - 2. pengembangan komoditas unggulan pertanian;
 - 3. pengolahan dan pengemasan;
 - 4. perluasan pemasaran; dan

5. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia.
 - b. kawasan ekonomi khusus meliputi:
 1. pembentukan kelembagaan pengelola;
 2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat di sekitar kawasan ekonomi khusus;
 3. perwujudan rencana pola ruang;
 4. perwujudan rencana jaringan prasarana internal kawasan ekonomi khusus; dan
 5. perwujudan rencana jaringan prasarana hinterland kawasan ekonomi khusus.
 - c. kawasan potensi bioetanol meliputi:
 1. penetapan dan pengembangan potensi bioetanol;
 2. pengembangan sarana dan prasana penunjang bioetanol; dan
 3. pengembangan teknologi pengelolaan dan pemanfaatan bioetanol.
 - d. kawasan minyak dan gas bumi meliputi:
 1. penetapan dan pengembangan kawasan minyak dan gas bumi;
 2. pengembangan sarana dan prasana penunjang kawasan minyak dan gas bumi; dan
 3. pengembangan teknologi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan minyak dan gas bumi.
 - e. kawasan pariwisata meliputi:
 1. penetapan dan pengembangan objek wisata;
 2. pengembangan objek wisata unggulan;
 3. pengembangan klaster wisata;
 4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata; dan
 5. pengembangan promosi wisata.
 - f. kawasan industri pabrik semen Maruni meliputi:
 1. pemantapan dan pembatasan kawasan industri;
 2. pembentukan klaster kawasan peruntukan industri;
 3. penyediaan lahan;
 4. pengembangan infrastruktur;
 5. penyediaan rumah buruh dan fasilitasnya; dan
 6. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 7. pengendalian pencemaran.
- (2) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Budaya Arfak meliputi:
 1. penetapan Kawasan Budaya Arfak sebagai kawasan konservasi yang memiliki nilai budaya tinggi;
 2. mengkonservasi dan memelihara kawasan yang termasuk sebagai wilayah adat;
 3. pengembangan atau pembangunan baru harus menyesuaikan dengan aturan adat;
 4. menjadikan Kawasan Budaya Arfak sebagai bagian dari wisata budaya; dan
 5. pengembangan Kawasan Budaya Arfak dilengkapi dengan fasilitas penunjang wisata seperti kuliner, dan sentra kerajinan.
 - b. Kawasan Lingkar Manokwari Timur meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Lingkar Mansinam sebagai kawasan konservasi;
 2. pengembangan prasarana pendukung berupa area parkir dan transportasi lokal;
 3. pengembangan jalur pejalan kaki maupun pengguna becak wisata antara parkir wisata dan kompleks wisata religi; dan
 4. pengembangan perdagangan jasa dan *souvenir shop*.

- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan *Geopark* dan perlindungan ekosistem laut dan terumbu karang meliputi:
 1. pemantapan kawasan;
 2. pembentukan lembaga pengelola/unit;
 3. penyelenggaraan pengelola kawasan;
 4. program kemitraan; dan
 5. pemberdayaan masyarakat.
 - b. Kawasan Koridor Mahkota Permata Tanah Papua meliputi:
 1. pemantapan kawasan;
 2. pembentukan lembaga pengelola/unit;
 3. penyelenggaraan pengelola kawasan;
 4. program kemitraan; dan
 5. pemberdayaan masyarakat.
 - c. Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Meja meliputi:
 1. pemantapan kawasan;
 2. pembentukan lembaga pengelola/unit;
 3. penyelenggaraan pengelola kawasan;
 4. program kemitraan; dan
 5. pemberdayaan masyarakat.
 - d. Kawasan *Geopark* Mesozoik Mawi (Gunung Botak) meliputi:
 1. pemantapan kawasan;
 2. pembentukan lembaga pengelola/unit;
 3. penyelenggaraan pengelola kawasan;
 4. program kemitraan; dan
 5. pemberdayaan masyarakat.
 - e. Kawasan *Geopark* Pegunungan Arfak meliputi:
 1. pemantapan kawasan;
 2. pembentukan lembaga pengelola/unit;
 3. penyelenggaraan pengelola kawasan;
 4. program kemitraan; dan
 5. pemberdayaan masyarakat.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 45

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf a meliputi:

- a. KKPR Darat; dan
- b. KKPR Laut.

Paragraf 1
KKPR Darat

Pasal 46

- (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf 2
KKPR Laut

Pasal 47

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk kawasan lindung; dan
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya.
- (2) Dalam rangka pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, kawasan peruntukan lindung dan budi daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berada di laut dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (3) Penjabaran kegiatan pada kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan konservasi terdiri atas kegiatan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi perairan, konservasi maritim dan kawasan lindung lainnya.
- (4) Penjabaran kegiatan pada kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan pariwisata terdiri atas zona pariwisata yang mencakup kegiatan pariwisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata alam bawah laut dan olahraga air.
 - b. kawasan pelabuhan terdiri atas:
 - 1. zona pelabuhan umum berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan pelabuhan (DLKp);
 - 2. zona pelabuhan khusus berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr) pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan; dan
 - 3. zona pelabuhan perikanan berupa kegiatan terkait dengan wilayah kerja dan wilayah OPP pelabuhan perikanan;
 - c. kawasan ekosistem mangrove terdiri atas zona hutan mangrove.

- d. kawasan pertambangan, terdiri atas:
 - 1. zona pertambangan mineral berupa wilayah untuk kegiatan eksploitasi; dan
 - 2. zona pertambangan minyak dan gas berupa wilayah untuk kegiatan fasilitas produksi.
 - e. kawasan perikanan yang terdiri atas:
 - 1. zona perikanan tangkap berupa kegiatan penangkapan ikan demersal dan ikan pelagis yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. zona perikanan budidaya berupa wilayah atau kegiatan untuk budidaya laut berupa budidaya rumput laut, budidaya kerapu dan budidaya mutiara.
 - f. kawasan energi terdiri atas zona energi berupa kegiatan PLTG/MG.
- (5) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
 - (6) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha lainnya.
 - (7) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan, maka kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
 - (8) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa keputusan:
 - a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
 - (9) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi rencana tata ruang wilayah.
 - (10) Setelah memperoleh KKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.
 - (12) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
 - (13) Ruang laut yang terdiri dari kawasan lindung dan budi daya didetailkan dalam peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan wilayah adat/wilayah khusus;
 - b. perwujudan pemanfaatan ruang rencana struktur ruang, meliputi:

1. perwujudan sistem pusat permukiman;
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 3. perwujudan sistem energi;
 4. perwujudan sistem telekomunikasi;
 5. perwujudan sistem sumber daya air; dan
 6. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- c. perwujudan pemanfaatan ruang rencana pola ruang, meliputi:
1. perwujudan ruang kawasan lindung; dan
 2. perwujudan ruang kawasan budi daya.
- d. perwujudan kawasan strategis provinsi.
- (2) Indikasi Program Utama terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari APBN, APBD, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
- a. tahap I (2022 – 2024);
 - b. tahap II (2025 – 2029);
 - c. tahap III (2030 – 2034);
 - d. tahap IV (2035 – 2039); dan
 - e. tahap V (2040 – 2041).
- (5) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Perwujudan wilayah adat/wilayah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. mengidentifikasi, memetakan dan menetapkan wilayah adat yang ada di Provinsi Papua Barat;
 - b. menyusun regulasi untuk pendaftaran peta-peta wilayah adat;
 - c. membangun model pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati oleh masyarakat adat sesuai dengan kearifan lokasi dan peraturan yang berlaku;
 - d. menyusun regulasi di daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat;
 - e. mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - f. perlindungan terhadap situs-situs budaya yang terkait langsung dengan peradaban masyarakat adat;
 - g. mendorong rencana tata ruang budaya secara spesifik dalam rencana tata ruang kabupaten/kota;
 - h. mendorong peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat;
 - i. fasilitasi kerjasama atau kemitraan antara MHA dan lembaga pemerintah dan swasta;

- j. penguatan kearifan lokal dan MHA dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya;
 - k. pengusulan dan penetapan MHA baru; dan
 - l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan MHA.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. PKN terdiri dari:
 - 1. pengembangan bandar udara primer;
 - 2. peningkatan kapasitas pelabuhan laut utama;
 - 3. peningkatan kualitas kesehatan berupa rumah sakit umum tipe A;
 - 4. perbankan internasional dan nasional swasta maupun pemerintah;
 - 5. penguatan sektor industri perdagangan dan jasa;
 - 6. peningkatan kualitas pendidikan sampai pada tingkatan perguruan tinggi/universitas;
 - 7. peningkatan hubungan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan jaringan transportasi;
 - 8. peningkatan sarana dan prasarana komunikasi perkotaan;
 - 9. peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan raya;
 - 10. pembangunan terminal penumpang Tipe A;
 - 11. perluasan pelabuhan Sorong; dan
 - 12. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kawasan terbangun.
 - b. PKW Manokwari berupa:
 - 1. peningkatan kapasitas bandar udara Rendani dengan skala pelayanan sekunder;
 - 2. peningkatan kapasitas pelabuhan laut pengumpan;
 - 3. peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata;
 - 4. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - 5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
 - 6. peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pembangkit listrik tenaga uap;
 - 7. pembangunan lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya;
 - 8. peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan;
 - 9. pembangunan terminal penumpang Tipe B; dan
 - 10. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kawasan terbangun.
 - c. PKW Fak Fak berupa:
 - 1. pengembangan peningkatan kapasitas bandar udara pengumpan Torea;
 - 2. peningkatan kapasitas pelabuhan laut pengumpan;
 - 3. pengembangan kawasan agropolitan;
 - 4. pengembangan pusat pertumbuhan baru di Bomberay;
 - 5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - 6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
 - 7. pembangunan lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya;
 - 8. peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan;
 - 9. pembangunan terminal penumpang Tipe B; dan

10. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kawasan terbangun.
- d. PKW Ayamaru berupa:
 1. pengembangan dan peningkatan kapasitas bandar udara;
 2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 3. peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
 4. pembangunan lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya;
 5. peningkatan kapasitas pembangkit listrik;
 6. peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata;
 7. peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan;
 8. pembangunan terminal penumpang Tipe B; dan
 9. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kawasan terbangun.
 - e. PKL berupa:
 1. pembangunan dan pemantapan fungsi lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya;
 2. pembangunan dan pemantapan fasilitas kesehatan (puskesmas pembantu dan fasilitas penunjang lainnya);
 3. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 4. peningkatan kualitas pasar induk kabupaten;
 5. peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata daerah;
 6. peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan;
 7. pengembangan dan peningkatan kapasitas pelabuhan laut;
 8. pengembangan dan peningkatan kapasitas bandara udara;
 9. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber energi listrik; dan
 10. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kawasan terbangun.
- (3) perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Sistem jaringan jalan meliputi:
 1. pemeliharaan dan perbaikan jalan;
 2. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 3. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 4. pengembangan terminal barang direncanakan menyatu dengan terminal penumpang tipe B;
 5. pengembangan jembatan timbang; dan
 6. pengembangan jembatan.
 - b. Sistem jaringan jalur kereta api meliputi:
 1. pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota; dan
 2. pengembangan stasiun kereta api.
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi:
 1. pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi;
 2. pengembangan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 3. pengembangan pelabuhan sungai dan danau; dan
 4. pengembangan pelabuhan penyeberangan.
 - d. sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 1. pengembangan pelabuhan utama;
 2. pengembangan pelabuhan pengumpul;

3. pengembangan pelabuhan pengumpan;
 4. pengembangan terminal umum;
 5. pengembangan terminal khusus;
 6. pengembangan pelabuhan perikanan;
 7. pengembangan alur-pelayaran umum dan perlintasan;
 8. pengembangan alur laut kepulauan indonesia;
 9. menetapkan sistem rute;
 10. menetapkan tata cara berlalu lintas;
 11. menetapkan daerah labu jangkar sesuai dengan kepentingannya;
 12. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran;
 13. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 14. memasang tanda batas dan rambu pelayaran; dan
 15. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran.
- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
1. pengembangan bandar udara pengumpul sekunder; dan
 2. pengembangan bandar udara Pengumpan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik;
 - c. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - d. pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - f. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - g. pengembangan gardu listrik.
- (5) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan tetap termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial meliputi pengembangan telkom, palapa ring timur dan kabel *fiber optic* di Saukorem;
 - c. jaringan bergerak seluler di Provinsi Papua Barat berupa:
 1. sistem seluler atau *wireless* berupa gelombang dengan frekuensi tertentu; dan
 2. *Tower Base Transceiver Station* di seluruh Kabupaten/Kota.
 - d. pengembangan jaringan bergerak satelit, meliputi:
 1. sistem satelit (vsat);
 2. pengembangan dan peningkatan jaringan telekomunikasi sistem mikro digital untuk melayani PKN, PKW, PKNS, PKL; dan
 3. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam Kawasan strategis.
 - e. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tersebar dan terpencil utamanya pada kawasan perbatasan dan kawasan prioritas.
- (6) Perwujudan sistem jaringan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi yang meliputi:
 1. daerah irigasi kewenangan nasional;
 2. daerah irigasi kewenangan provinsi; dan
 3. daerah irigasi kewenangan kabupaten;
 - b. pengembangan bangunan pengendalian banjir di seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - c. pengembangan bangunan sumber daya air.

- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. sistem pengelolaan air minum meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan perpipaan; dan
 2. pembangunan sistem pengelolaan air minum.
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi perencanaan pengelolaan secara regional dan terpadu.
 - c. sistem jaringan persampahan wilayah meliputi:
 1. manajemen pengelolaan persampahan;
 2. penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
 3. pengembangan tempat pengolahan akhir regional; dan
 4. pengembangan tempat pengolahan akhir di Kabupaten/Kota.

Pasal 50

- (1) Indikasi program perwujudan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk:
- a. badan air;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan konservasi;
 - e. kawasan lindung geologi; dan
 - f. kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Indikasi program perwujudan ruang badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi badan air;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu air;
 - c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran air;
 - d. pemeliharaan dan pemulihan mutu air;
 - e. memelihara daerah tangkapan air;
 - f. peningkatan daya tampung badan air;
 - g. pengelolaan sampah dan air limbah dimulai dari sumbernya di daerah tangkapan air;
 - h. upaya peningkatan kualitas air dari hulu dan hilir;
 - i. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air;
 - j. peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di sekitar badan air; dan
 - k. pengendalian pemanfaatan badan air.
- (3) Indikasi program perwujudan ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung;
 - b. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon sebagai pelindung kawasan bawahannya;
 - c. pengembangan jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
 - d. penelitian dan pendidikan mengenai pengelolaan kawasan;
 - e. pembangunan unit monitoring dan pengawasan sumberdaya hutan;

- f. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi masyarakat disekitar kawasan kehutanan;
 - g. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - h. pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan gambut; dan
 - i. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
- (4) Indikasi program perwujudan ruang kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengendalian aktivitas budidaya;
 - b. rehabilitasi dan pemeliharaan lahan;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana penyelamatan dan pengelolaan kawasan;
 - d. deliniasi kawasan lindung;
 - e. pengendalian aktivitas budidaya; dan
 - f. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan.
- (5) Indikasi program perwujudan ruang kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengukuhan dan pemeliharaan batas wilayah;
 - b. penataan dan pengkajian kawasan;
 - c. inventarisasi potensi kawasan;
 - d. pembebasan lahan yang termasuk dalam kawasan lindung;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan jalan patroli dalam kawasan yang terakomodir dalam blok/zona khusus;
 - f. pengembangan model pengelolaan basis data kawasan dan kearifan lokal seperti pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat, pusat riset dan pembelajaran;
 - g. pengembangan dan pemeliharaan menara pengintai dan pos penjagaan di kawasan;
 - h. pengembangan kegiatan pengamanan melalui pola kemitraan bersama masyarakat adat dan para pihak;
 - i. penanggulangan dan pengendalian perambahan hutan, penebangan liar, perdagangan satwa liar yang dilindungi serta kebakaran hutan;
 - j. penyusunan pemetaan kawasan dan potensi kawasan suaka alam dan kawasan perlindungan alam serta kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - k. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan konservasi;
 - l. promosi dan pengembangan pola kerjasama penelitian dan pengembangan program yang relevan;
 - m. pengembangan pola kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kawasan;
 - n. pengembangan pola kemitraan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kawasan;
 - o. pengembangan sistem koordinasi pengelolaan kawasan;
 - p. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi konservasi yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - q. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
 - r. mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi kawasan dengan pembangunan di wilayah pesisir dan di pulau-pulau kecil;
 - s. memberdayakan kelompok sosial budaya dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi;

- t. mengendalikan aktivitas penangkapan ikan skala kecil di zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan konservasi;
 - u. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di kawasan konservasi;
 - v. melindungi serta melestarikan sumberdaya dan ekosistemnya melalui pengendalian pemanfaatan di kawasan konservasi; dan
 - w. melakukan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi.
- (6) Indikasi program perwujudan ruang kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. penyusunan pemetaan dan zonasi batugamping sebagai kawasan bentang alam karst;
 - c. mengevaluasi secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air permukaan dan bawah permukaan;
 - d. perlindungan terhadap bentang alam unik hasil karstifikasi;
 - e. perlindungan sistem hidrogeologi karst yang ada sebagai fungsi penyimpanan air tanah;
 - f. perlindungan terhadap bentang alam karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari aspek/sudut pandang lain seperti misalnya geologi, antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar; dan
 - g. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan.
- (7) Indikasi program perwujudan ruang kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pelestarian dan konservasi pada ekosistem mangrove yang masih asli atau mendekati kondisi asli;
 - b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan dikembangkan untuk budidaya ramah lingkungan dan pariwisata;
 - c. audit lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan khususnya yang menyebabkan hilangnya mangrove;
 - d. pengelolaan untuk perlindungan dan konservasi pada kawasan mangrove yang berfungsi sebagai jalur hijau;
 - e. pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat;
 - f. menetapkan moratorium penebangan kayu mangrove;
 - g. meningkatkan produksi mangrove melalui teknologi;
 - h. menjalin kerjasama rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove;
 - i. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada ekosistem mangrove;
 - j. pengembangan pemanfaatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan;
 - k. perlindungan hutan mangrove sebagai daerah pengasuhan, pemijahan dan perlindungan biota;
 - l. menjamin fungsi ekologis mangrove dalam migrasi biota; dan
 - m. melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan mangrove.

Pasal 51

- (1) Indikasi program perwujudan ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan perkebunan rakyat;

- c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan perikanan;
 - e. kawasan pertambangan dan energi;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan pariwisata;
 - h. kawasan permukiman;
 - i. kawasan transportasi; dan
 - j. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Indikasi program perwujudan ruang kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penerapan sistem praktik pengendalian proses penanaman (permudaan), pertumbuhan, komposisi, kesehatan, dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan dan aturan pengelolaan lainnya yang berbeda sesuai dengan ragam hutan produksi yang tinggi;
 - b. peningkatan produktivitas hutan yang optimal;
 - c. pengelolaan hutan produksi ke hutan bekas tebangan;
 - d. konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
 - e. pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaannya;
 - f. penelitian dan pendidikan mengenai pengelolaan kawasan;
 - g. pembangunan unit monitoring dan pengawasan sumberdaya hutan;
 - h. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi masyarakat disekitar kawasan kehutanan;
 - i. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung serta upaya restorasi/agroforestry sebagai wujud pemulihan ekosistem/ lahan kritis;
 - j. pengelolaan kawasan hutan produksi secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan; dan
 - k. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan hutan produksi.
- (3) Indikasi program perwujudan ruang kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan;
 - b. pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan profesional;
 - c. mengembangkan agribisnis perkebunan;
 - d. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai;
 - e. rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan;
 - f. intensifikasi komoditi perkebunan;
 - g. pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - h. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budidaya tanaman;
 - i. pengelolaan kawasan perkebunan rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan;
 - j. peningkatan manajemen pengairan; dan
 - k. kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.
- (4) Indikasi program perwujudan ruang kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan kawasan tanaman pangan, diarahkan untuk:
 - 1. pengembangan kawasan agropolitan terletak di Kabupaten Manokwari, yaitu Prafi, Masui, dan Sidey;

2. pencetakan sawah baru pada kawasan potensi yang didukung dengan ketersediaan kondisi lahan serta sistem pengairan;
 3. pengembangan pertanian perkotaan;
 4. pengembangan pertanian organik;
 5. penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi;
 6. penetapan kawasan pertanian pangan khususnya lahan; pertanian sawah irigasi sebagai KP2B; dan
 7. ketentuan pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B diatur lebih dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- b. pengembangan kawasan hortikultura, diarahkan untuk:
1. meningkatnya produktivitas dan kualitas produk hortikultura;
 2. terjalinnya kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha;
 3. pengembangan kawasan agropolitan berbasis hortikultura;
 4. pengembangan industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan; dan
 5. meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan tani.
- c. pengembangan kawasan perkebunan, diarahkan untuk:
1. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai;
 2. rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan;
 3. intensifikasi komoditi perkebunan;
 4. pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan;
 5. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budidaya tanaman;
 6. peningkatan manajemen pengairan;
 7. pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan profesional; dan
 8. pengelolaan kawasan perkebunan secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan.
- d. pengembangan kawasan peternakan, diarahkan untuk:
1. pengembangan peternakan berbasis ternak unggulan;
 2. pengembangan peternakan sapi dengan pola padang penggembalaan yaitu dengan konsep kawasan peternakan terpadu;
 3. peningkatan kapasitas skill/sumber daya manusia peternak dalam bentuk ketrampilan, perubahan pola pikir dan penataan keuangan/aset dan pola usaha;
 4. penguatan kapasitas daya dukung untuk pengembangan komoditi peternakan berupa pakan ternak, embung, bibit/bakalan terseleksi, penanganan kesehatan hewan dan reproduksi, integrasi sinergitas komoditi pendukung untuk komoditi utama seperti kontinuitas pakan, pupuk organik, komoditi pertanian/perkebunan;
 5. fasilitasi kepemilikan modal peternak yang mendidik untuk merubah pola pikir dan pola tindak peternak menuju kemandirian;
 6. penanganan pasca panen dan pemasaran;
 7. penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat peternak;
 8. regulasi pendukung pengembangan komoditi; dan
 9. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan pertanian.
- (5) Indikasi program perwujudan ruang kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pembangunan kawasan sentra produksi dan pengolahan perikanan tangkap;
 - b. pembangunan kawasan unggulan perikanan;
 - c. peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi rakyat;
 - d. pengembangan industri perikanan;
 - e. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota laut;
 - f. sosialisasi kepada masyarakat tentang alur migrasi biota laut dan upaya bersama untuk mengamankan alur migrasi;
 - g. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan perikanan;
 - h. manajemen pengendalian input-proses-output;
 - i. memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;
 - j. menjaga keamanan mata pencaharian masyarakat pesisir;
 - k. melaksanakan revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan;
 - l. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil;
 - m. meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - n. menerapkan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - o. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengakajian stok ikan;
 - p. pengembangan budidaya laut bagi kesejahteraan masyarakat pesisir;
 - q. menata dan mengembangkan usaha perikanan budidaya berbasis klaster;
 - r. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - s. mengembangkan sumberdaya manusia dan menerapkan teknologi budidaya laut yang produktif dan ramah lingkungan; dan
 - t. mengendalikan dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air yang mengganggu kegiatan perikanan budidaya.
- (6) Indikasi program perwujudan ruang kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. identifikasi potensi, delineasi potensi, penetapan wilayah, eksplorasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral yang berbasis pembangunan berkelanjutan;
 - c. mendorong penelitian dan optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - d. rehabilitasi dan reklamasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi dan mineral;
 - e. pengembangan sarana prasarana kawasan kawasan industri pertambangan;
 - f. pengelolaan kawasan pertambangan dan energi secara berkelanjutan dan lestari selama proses eksplorasi hingga pasca eksplorasi;
 - g. pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat adat;
 - h. mengembangkan zona pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan keserasian perkembangan wilayah;
 - i. pengembangan zona pertambangan didukung oleh kawasan hijau sebagai peyangga antar fungsi zona;
 - j. berkembangnya fungsi peruntukan lain didalam zona pertambangan dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan;

- k. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan keseimbangan lingkungan dan biaya aktivitas sosial;
 - l. setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metode atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri tersebut;
 - m. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin lingkungan berupa analisis dampak lingkungan atau rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan;
 - n. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna untuk meminimalkan dampak pencemaran; dan
 - o. pemantapan kerjasama pengelolaan pembangkit listrik tenaga gas / pembangkit listrik tenaga minyak dan gas antara pemerintah, masyarakat, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Indikasi program perwujudan ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
 - c. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menunjang terwujudnya kawasan pemanfaatan yang berkelanjutan dan lestari;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada pengembangan kawasan peruntukan industri; dan
 - e. hilirisasi produk industri hijau.
- (8) Indikasi program perwujudan ruang kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan upaya pemasaran pariwisata;
 - b. penggalian objek wisata baru berbasis alam di seluruh ekosistem Kelautan untuk wisata laut dan ekosistem hutan dan pantai untuk wisata;
 - c. penyusunan rencana induk pariwisata daerah di Kabupaten/Kota;
 - d. pengembangan paket wisata Kabupaten/Kota;
 - e. pengembangan promosi wisata dan peningkatan atraksi wisata;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - g. reorientasi kegiatan kepariwisataan yang ramah lingkungan;
 - h. pengembangan destinasi pariwisata nasional;
 - i. pengembangan pariwisata Raja Ampat sebagai KSPN;
 - j. penataan dan pengendalian kawasan wisata dan sekitarnya diatur secara khusus dalam perencanaan kawasan tata ruang wisata;
 - k. pengembangan wisata terpadu dengan menggunakan sistem yang terpadu dan sinergis;
 - l. pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata seperti perdagangan, taman dan area bermain;
 - m. pengembangan kawasan wisata pendukung yang disertai dengan peningkatan kualitas infrastruktur;
 - n. meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada pengembangan kawasan pariwisata;
 - o. meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata;
 - p. meningkatkan manajemen kepariwisataan; dan
 - q. mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir.

- (9) Indikasi program perwujudan ruang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. penyusunan rencana tata ruang perkotaan;
 - b. penataan kawasan permukiman di kawasan lindung;
 - c. pembangunan fasilitas pelayanan penunjang kawasan permukiman;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. pengintensifan dan peningkatan sistem utilitas;
 - g. meningkatkan pemenuhan perumahan layak bagi masyarakat adat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat;
 - h. mengembangkan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai;
 - i. menyediakan permukiman untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan perkembangannya;
 - j. menciptakan aktivitas sosial ekonomi yang harmonis dengan seluruh komponen pengembangan wilayah seperti dengan aktivitas perdagangan dan jasa, industri, pertanian, dan lain-lain;
 - k. pengembangan kawasan permukiman yang adaptif terhadap bencana;
 - l. peningkatan identitas permukiman melalui kampung tematik;
 - m. program perbaikan kampung mengadopsi konsep pembangunan hunian yang lengkap dan asri dengan jenis konstruksi jalan beton, pedestrian dan pohon peneduh;
 - n. pengawasan penerapan pengelolaan wajib terkait instalasi pengolahan air limbah komunal, tempat pengolahan sampah terpadu dan ruang terbuka hijau; dan
 - o. pengembangan kawasan permukiman yang tahan pangan.
- (10) Indikasi program perwujudan ruang kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. menyusun kajian tentang pengembangan kawasan aerotropolis;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi;
 - c. peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan transportasi; dan
 - d. penataan kawasan sekitar kawasan transportasi;
 - e. meningkatkan pelayanan kepelabuhanan;
 - f. merevitalisasi sarana prasarana pelabuhan;
 - g. meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 - h. mengatur dan membina, mengembalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan kepelabuhan; dan
 - i. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (11) Indikasi program perwujudan ruang kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar;
 - b. pengalokasian khusus untuk kawasan latihan militer;
 - c. penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
 - d. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR; dan
 - e. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi rencana tata ruang.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi struktur ruang; dan

- b. indikasi arahan zonasi pola ruang.
- (2) Indikasi arahan zonasi struktur ruang, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman provinsi;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi arahan zonasi pola ruang, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (4) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (5) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat ketentuan tambahan Kawasan Pembangunan Berkelanjutan (KPB), yang terdiri dari:
 - a. KPB pelestarian hutan; dan
 - b. KPB ketahanan pangan.
- (6) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman Provinsi

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Sorong;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Manokwari, PKW Fak Fak, PKW Ayamaru di Kabupaten Maybrat;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSNI Kota Sorong dan PKSNI Kabupaten Manokwari; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL meliputi Perkotaan Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan, Perkotaan Aimas di Kabupaten Sorong, Perkotaan Kaimana di Kabupaten Kaimana, Perkotaan Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni, Perkotaan Waisai di Kabupaten Raja Ampat, Perkotaan Raisei di Kabupaten Teluk Wondama, Perkotaan Fef di Kabupaten Tambrauw, Perkotaan Aifat di Kabupaten Maybrat, Perkotaan Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan dan Perkotaan Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan internasional yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kawasan perkotaan dan pinggiran dibatasi perkembangan fisiknya dengan penyediaan ruang terbuka hijau sesuai daya dukung lingkungan;
 2. membatasi perkembangan fisik perkotaan di daerah pinggiran agar tidak melebihi batas perkembangan fisik yang telah ditetapkan; dan
 3. mengembangkan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat secara berhierarki yang terdistribusi di seluruh kawasan perkotaan dan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan dan dapat menimbulkan bencana alam, dan kerusakan alam; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di PKN Sorong memiliki batasan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Manokwari, PKW Fak Fak, PKW Ayamaru di Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
 3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
 4. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
 5. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/ atau bandar udara.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kawasan perkotaan dan pinggiran dibatasi perkembangan fisiknya dengan penyediaan ruang terbuka hijau sesuai daya dukung lingkungan;
 2. membatasi perkembangan fisik perkotaan di daerah pinggiran agar tidak melebihi batas perkembangan fisik yang telah ditetapkan; dan
 3. mengembangkan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat secara berhierarki yang terdistribusi di seluruh kawasan perkotaan dan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di PKW Manokwari, PKW Fak Fak, PKW Ayamaru di Kabupaten Maybrat memiliki batasan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Kota Sorong dan PKSN Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. mengembangkan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan;
 3. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
 4. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
 5. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
 6. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kawasan perkotaan dan pinggiran dibatasi perkembangan fisiknya dengan penyediaan ruang terbuka hijau sesuai daya dukung lingkungan;
 2. membatasi perkembangan fisik perkotaan di daerah pinggiran agar tidak melebihi batas perkembangan fisik yang telah ditetapkan; dan
 3. mengembangkan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat secara berhierarki yang terdistribusi di seluruh kawasan perkotaan dan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL meliputi Perkotaan Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan, Perkotaan Aimas di Kabupaten Sorong, Perkotaan Kaimana di Kabupaten Kaimana, Perkotaan Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni, Perkotaan Waisai di Kabupaten Raja Ampat, Perkotaan Raisei di Kabupaten Teluk Wondama, Perkotaan Fef di Kabupaten Tambrauw, Perkotaan Aifat di Kabupaten Maybrat, Perkotaan Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan dan Perkotaan Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
 3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
 4. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
 5. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
 2. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
 3. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala lokal dan wilayah; dan
 4. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam; dan
- d. intensitas pemanfaatan ruang di Perkotaan Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan, Perkotaan Aimas di Kabupaten Sorong, Perkotaan Kaimana di Kabupaten Kaimana, Perkotaan Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni, Perkotaan Waisai di Kabupaten Raja Ampat, Perkotaan Raisei di Kabupaten Teluk Wondama, Perkotaan Fef di Kabupaten Tambrauw, Perkotaan Aifat di Kabupaten Maybrat, Perkotaan Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan dan Perkotaan Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki batasan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan.

Paragraf 3

Indikasi Arah Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 56

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalur kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 57

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
 3. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 4. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan jalan yang masuk ke dalam areal kawasan hutan haruslah sependek mungkin, tidak lebar, dan haruslah berdampak negatif minimal terhadap lingkungan;
 - 2. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 3. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 - 4. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan;
 - 5. kegiatan di lokasi tertentu di sempadan jalan yang memiliki nilai konservasi tinggi perlu dipagari untuk meminimalkan dampak jalan terhadap perubahan habitat dan ekosistem di kawasan hutan tersebut;
 - 6. kegiatan di lokasi tertentu di kawasan hutan di sempadan jalan bisa dibangun titik peristirahatan yang dipagari untuk melindungi hutan sekaligus tempat aktivitas ekonomi masyarakat setempat;
 - 7. kegiatan di lokasi tertentu di kawasan hutan di sempadan jalan bisa dibangun situs ekowisata yang dibangun secara ketat; dan
 - 8. kegiatan pembangunan jalan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada Jalan Trans Papua dan jalan arteri primer yang tidak termasuk dalam wilayah perkotaan;
 - 2. perumahan perdagangan, jasa, industri dan peruntukan bangunan lainnya dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada Jalan Trans Papua dan jalan arteri primer yang tidak termasuk dalam wilayah perkotaan;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada Jalan Trans Papua dan jalan arteri primer yang tidak termasuk dalam wilayah perkotaan;
 - 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna Jalan Trans Papua dan jalan arteri primer yang tidak termasuk dalam wilayah perkotaan;
 - 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung;
 - 6. kegiatan pembangunan jalan yang melewati blok inti di hutan lindung dan zona inti atau blok perlindungan di hutan konservasi; dan
 - 7. kegiatan pembangunan jalan yang melewati situs, bangunan, sarana alam dan lansekap yang memiliki signifikansi arkeologis, palaentologis, historis, arsitektur, religius, estetika, atau sifat kultural lainnya.
- d. intensitas pemanfaatan ruang memiliki batasan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi Jalan Trans Papua dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

2. intensitas koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat di jalan dan di luar badan jalan;
- f. ketentuan tambahan pada jalan umum meliputi:
1. kegiatan pembangunan jalan di kawasan hutan dengan ekosistem yang sensitif dilakukan dengan perencanaan yang komprehensif dan wajib mengacu pada kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan serta dampak sosial;
 2. hasil perencanaan ini perlu memuat rencana ruas jalan beserta alternatifnya, letak, dan luas kawasan hutan yang terdampak beserta keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut;
 3. rencana pembangunan jalan wajib melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, pengelola kawasan hutan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat lingkungan dan masyarakat lokal yang terdampak;
 4. rencana pembangunan jalan haruslah diintegrasikan dengan rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang menguntungkan dari aspek lingkungan teknis, ekonomi dan sosial; dan
 5. pembangunan ruas jalan di kawasan hutan wajib memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama; dan
 2. kegiatan bagi keperluan penumpang, pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan; dan
 2. kegiatan jasa lingkungan yang tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang pada jalan umum memiliki batasan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. fasilitas utama terdiri dari: tempat keberangkatan, kedatangan, ruang tunggu dan pelintasan;
 2. fasilitas penunjang terdiri dari: kamar kecil, musholla, kios, kantin, ruang pengobatan, ruang informasi-pengaduan, tempat penitipan barang, taman dan ruang tunggu, menara pengawas, loket, rambu dan papan informasi; dan
 3. fasilitas bagi penyandang cacat.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang;
 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan jalur kereta api; dan
 3. kegiatan mendirikan pos penjagaan dan menara pemantau di stasiun pemberhentian.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan;
 3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pembangunan jaringan jalur kereta api yang melewati blok inti di hutan lindung dan zona inti atau blok perlindungan di hutan konservasi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api;
 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api; dan
 3. kegiatan pembangunan jaringan jalur kereta api yang melewati situs, bangunan, sarana alam dan lansekap yang memiliki signifikansi arkeologis, palaentologis, historis, arsitektur, religius, estetika, atau sifat kultural lainnya.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di jaringan jalur kereta api memiliki batasan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dikembangkan dan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sistem jaringan jalur kereta api;
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada jaringan jalur kereta api meliputi jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu dan bangunan pengaman jalur kereta api; dan
- f. ketentuan tambahan pada jaringan jalur kereta api meliputi:
 1. pembangunan jalur kereta api di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan pembangunan jaringan jalur kereta api di kawasan hutan dengan ekosistem yang sensitif dilakukan dengan perencanaan yang komprehensif dan wajib mengacu kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan serta dampak sosial;

3. hasil perencanaan ini perlu memuat letak, dan luas kawasan hutan beserta keanekaragaman hayati yang terdampak di kawasan hutan tersebut;
4. pengembangan jaringan jalur kereta api menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan menghindari kawasan bernilai konservasi tinggi dan/atau kawasan yang sensitif secara lingkungan seperti rawan bencana; dan
5. rencana pembangunan jalur kereta api wajib melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, pengelola kawasan hutan, akademisi, LSM lingkungan dan masyarakat lokal yang terdampak.

Pasal 59

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. mengembangkan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 3. mengintegrasikan dengan sistem transportasi darat untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang terpadu dan efisien; dan
 4. menjamin ketersediaan air bersih, energi listrik, jaringan telekomunikasi di pelabuhan penyeberangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 2. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran.

Pasal 60

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 2. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 3. kegiatan masyarakat hukum adat; dan

4. kegiatan penelitian dan pendidikan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 2. kegiatan pariwisata dan budidaya lainnya;
 3. kawasan konservasi; dan
 4. kawasan pertahanan dan keamanan.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas penunjang pelabuhan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur pelayaran di laut; dan
 2. kegiatan masyarakat hukum adat.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 2. diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas dengan izin kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut;
 2. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran;
 4. kegiatan pariwisata dan budidaya lainnya;
 5. kawasan konservasi; dan
 6. kawasan pertahanan dan keamanan.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas penunjang pelayaran.
- (4) Ketentuan tambahan pada sistem jaringan transportasi laut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kepelabuhanan.

Pasal 61

- Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan;
 2. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
 3. kegiatan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
 2. kegiatan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

- d. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan tidak diperbolehkan untuk kebutuhan pengembangan bandar udara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan tambahan pada sistem jaringan transportasi udara meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan transportasi udara di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. arahan peraturan zonasi sistem transportasi udara diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 62

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang disekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - 3. pemanfaatan areal di sekitar lokasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 4. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan
 - 5. fasilitas komersial dan perdagangan dan jasa serta industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi;
 - 3. fasilitas komersial dan perdagangan dan jasa serta industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi; dan
 - 4. fasilitas yang mengganggu keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan maksimal KDB 50% (lima puluh persen) dan maksimal KLB 0,5 (nol koma lima); dan
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. RTH berupa taman; dan
 - 2. pertanian tanaman pangan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan ketenagalistrikan harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - 3. pemanfaatan areal di sekitar lokasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - 4. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan
 - 5. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 - 3. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai; dan
 - 4. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penentuan intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% (lima puluh persen) dan maksimal KLB 0,5 (nol koma lima).
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi prasarana dan sarana minimum berupa berupa RTH, pelataran parkir dan ruang keamanan pengguna.
- (4) Ketentuan tambahan pada jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 63

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan jaringan berupa *fiber optik* di bawah tanah dan di bawah laut sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan

- c. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas instalasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kebutuhan, keamanan dan karakteristik kawasan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - 1. pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan; dan
 - 2. kegiatan pengembangan pertanian dan RTH sesuai ketentuan teknis.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi menara telekomunikasi dan mengganggu fungsi dan layanan menara telekomunikasi; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi;
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya; dan
 - f. ketentuan tambahan pada sistem jaringan telekomunikasi meliputi pembangunan jaringan sistem jaringan telekomunikasi di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 64

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - 4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - 5. pengembangan jaringan pipa air minum;
 - 6. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - 7. pondasi jembatan, jalan dan pembangunan jalan pendekat melintasi jaringan irigasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan mengganggu fungsi jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran dan bangunan;
 - d. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi sarana dan prasarana pengendali banjir.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung sistem jaringan sumber daya air;
 - 2. kegiatan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 - 3. kegiatan pemeliharaan bangunan pengendali banjir;
 - 4. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 - 5. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang pada kawasan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - 2. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - 3. bangunan pengontrol debit dan kualitas air sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - 4. pertanian yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 - 2. kegiatan berupa bangunan maupun bukan, yang berpotensi mencemari mata air.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 65

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. sistem pengelolaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.

- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 1. kegiatan di sekitar sistem penyediaan air minum yang tidak mengganggu bentang alam dan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang pada kawasan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder dan sambungan rumah; dan
 3. pemanfaatan sumber daya air tanah secara berimbang antara potensi dan konservasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik; dan
 - e. ketentuan tambahan berupa kerjasama antara pelaku pengolah zonasi SPAM dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa mendirikan fasilitas pengolah limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung dengan tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membangun sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 2. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah; dan
 4. membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi Kawasan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang untuk sistem pengelolaan air limbah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan tambahan pada sistem pengelolaan air limbah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan yang mendukung sistem pengelolaan limbah B3;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 1. pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang tidak tersambung langsung dengan kawasan terbangun/kawasan permukiman; dan
 2. izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu dan merusak sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sarana prasarana minimum

- dan sistem pengelolaan limbah B3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemilihan, pemilahan dan pengolahan sampah; dan
 2. bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat; dan
 2. diperbolehkan secara bersyarat untuk kegiatan pengembangan pertanian dan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan teknis.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah; dan
 2. kegiatan yang mengganggu dan merusak sistem pengelolaan sampah.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan pembangkit listrik tenaga sampah.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang tidak diperbolehkan, intensitas pemanfaatan ruang dan sarana prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan budidaya dan pariwisata;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan bendung/bendungan, pembangkit listrik dan pengontrol/pengukur debit air, transportasi air dan budidaya perikanan keramba/jaring apung;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan badan air; dan

2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang berpotensi dapat menurunkan kualitas air.
- d. sarana prasarana minimum pada badan air berupa kelengkapan bangunan penunjang air dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
- e. ketentuan lainnya berupa penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait badan air.

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan lindung gambut.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi hutan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
 2. wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 3. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 4. penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 5. penggunaan kawasan hutan yang dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka;
 3. kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
 4. kegiatan pertambangan di kawasan resapan air dan kawasan yang memiliki keunikan geologi; dan
 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung memiliki batasan Intensitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. sarana prasarana minimum pada kawasan hutan lindung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - f. ketentuan tambahan dalam kawasan hutan lindung terdiri dari:
 1. pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik;

3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat;
 4. wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan lindung tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat;
 5. pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung tidak merubah rona lingkungan;
 6. perencanaan kegiatan di atas kawasan hutan perlu memuat tentang rencana kegiatan beserta alternatifnya, letak, dan luas kawasan hutan yang terdampak beserta keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut;
 7. rencana pembangunan diluar kegiatan konservasi alam wajib melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, pengelola kawasan hutan, akademisi, LSM lingkungan dan masyarakat lokal yang terdampak;
 8. rencana pembangunan haruslah diintegrasikan dengan rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang menguntungkan dari aspek lingkungan teknis, ekonomi dan sosial; dan
 9. pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ekosistem gambut pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya untuk seluruh kegiatan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ekosistem gambut pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, jasa lingkungan; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud di atas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
 2. kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut; dan
 3. kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem gambut dan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, intensitas pemanfaatan ruang, sarana prasarana minimum dan ketentuan tambahan pada kawasan hutan gambut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
 2. pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan perlindungan setempat; dan
 3. kegiatan sarana dan prasarana untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 2. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 3. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat;
 4. pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 5. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada kawasan sempadan; dan
 6. pemanfaatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. penebangan pohon dalam jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan perlindungan setempat;
 3. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait; dan
 5. permukiman dan fasilitas penunjang permukiman yang sudah terdapat di sempadan tidak diperkenankan untuk dikembangkan luas dan jumlahnya.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan perlindungan setempat memiliki batasan intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan 5% (lima persen), KLB 5% (lima persen), dan KDH 95% (sembilan puluh lima persen);
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan perlindungan setempat berupa prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. ketentuan tambahan pada kawasan perlindungan setempat meliputi:
1. kawasan perlindungan setempat di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dapat diberikan hak pakai atau hak milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
 2. kawasan perlindungan setempat yang berupa hutan lahan kering primer/sekunder, hutan mangrove primer/sekunder, dapat dialih fungsi menjadi kawasan lindung guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 3. kawasan perlindungan setempat yang terdapat tanaman sagu fungsinya dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 4. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan kesatuan

- pengelolaan hutan dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat;
5. wilayah MHA yang berada dalam kawasan perlindungan setempat tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA;
 6. pemanfaatan pada kawasan perlindungan setempat tidak merubah rona lingkungan;
 7. kawasan perlindungan setempat yang terdapat di kawasan hutan boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan perlindungan setempat dan izin untuk melakukan kegiatan;
 8. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 9. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan perlindungan setempat adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 10. kegiatan budidaya di kawasan perlindungan setempat diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang hanya diperbolehkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 2. penggunaan kawasan taman wisata alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. penggunaan kawasan taman wisata alam yang dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
 4. kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; dan
 5. kegiatan pariwisata, perikanan tangkap dan kabel listrik bawah laut.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;
 4. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi;
 5. kegiatan budidaya baru dan perluasan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 6. kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem pada kawasan seperti kegiatan perikanan, pertambangan dan pipa gas bawah laut.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan konservasi memiliki batasan intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan konservasi disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (lebih kecil atau sama dengan sepuluh persen), KLB $\leq 10\%$ (lebih kecil atau sama

- dengan sepuluh persen), dan KDH \geq 90% (lebih besar atau sama dengan sembilan puluh persen);
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan konservasi berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman wisata alam antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan; dan
 - f. ketentuan tambahan pada kawasan konservasi meliputi:
 1. wilayah MHA yang berada dalam kawasan konservasi tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA;
 2. pemanfaatan dalam kawasan konservasi tidak merubah rona lingkungan;
 3. perencanaan kegiatan di atas kawasan konservasi perlu memuat tentang rencana kegiatan beserta alternatifnya, letak, dan luas kawasan konservasi yang terdampak beserta keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut;
 4. rencana pembangunan diluar kegiatan konservasi wajib melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, pengelola kawasan konservasi, akademisi, LSM lingkungan dan masyarakat lokal yang terdampak;
 5. rencana pembangunan haruslah diintegrasikan dengan rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi yang menguntungkan dari aspek lingkungan teknis, ekonomi dan sosial; dan
 6. pembangunan di kawasan konservasi wajib memiliki IPPKH dan mematuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan lindung geologi; dan
 2. pemanfaatan ruang untuk pariwisata, penelitian dan pendidikan tanpa mengubah bentang alam dan tidak mengganggu atau mengubah siklus hidrologi yang ada, tidak merusak komponen geologi dan ekosistemnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya selain huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; dan
 4. kegiatan yang berpotensi merusak komponen geologi dan ekosistemnya.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, sarana prasarana minimum dan ketentuan tambahan pada kawasan lindung geologi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ekosistem mangrove, jasa lingkungan dan bukan kayu dilakukan dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan;
 2. kegiatan budidaya di ekosistem mangrove diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan ekosistem mangrove dipertahankan;
 3. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove; dan
 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. bangunan pelindung pantai untuk menunjang kegiatan kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
 2. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya tradisional;
 4. kegiatan pariwisata air; dan
 5. pembangunan pelabuhan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang ada di ekosistem mangrove tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove;
 3. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait seperti pertambangan; dan
 6. kegiatan pembuangan di kawasan laut.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan ekosistem mangrove memiliki batasan intensitas berupa kegiatan pembangunan disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan 5% (lima persen), KLB 5% (lima persen), dan KDH 95% (sembilan puluh lima persen);
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan ekosistem mangrove berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- f. ketentuan tambahan pada kawasan ekosistem mangrove meliputi:
1. kawasan ekosistem mangrove di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dapat diberikan hak pakai atau hak milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
 2. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat;
 3. wilayah MHA yang berada dalam kawasan ekosistem mangrove tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA; dan
 4. pemanfaatan dalam kawasan ekosistem mangrove tidak merubah rona lingkungan.

Paragraf 9
Indikasi Arahkan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata; dan
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
 2. hutan produksi yang terdapat di kawasan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 3. kegiatan reboisasi, penghijauan dan perlindungan kawasan hutan produksi;
 4. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 5. kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan dan/atau pembangunan energi terbarukan beserta jaringan infrastruktur dan/atau infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 4. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 3. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;

4. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi utama kawasan; dan
5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan hutan produksi memiliki batasan intensitas berupa kegiatan pembangunan disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan 5% (lima persen), KLB 5% (lima persen), dan KDH 95% (sembilan puluh lima persen);
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan hutan produksi berupa penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. ketentuan tambahan pada kawasan hutan produksi meliputi:
 1. hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dapat diberikan hak pakai atau hak milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
 2. hutan produksi yang berupa hutan lahan kering primer/sekunder, hutan mangrove primer/sekunder, dapat dialihfungsikan menjadi kawasan lindung guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 3. kawasan hutan produksi yang terdapat tanaman sagu fungsinya dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 4. apabila hutan produksi secara fungsi dapat memiliki fungsi lindung, maka pada kawasan tersebut dikelola secara khusus sehingga dapat menjadi KPB menuju provinsi pembangunan berkelanjutan;
 5. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat;
 6. wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA;
 7. pemanfaatan dalam kawasan hutan produksi tidak merubah rona lingkungan; dan
 8. pembangunan di dalam kawasan hutan produksi wajib memiliki IPPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. perkebunan rakyat yang terdapat di kawasan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan rakyat dan izin untuk melakukan kegiatan;
 2. pemanfaatan perkebunan rakyat yang menebang pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 3. kegiatan budidaya yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 4. pengembangan luas areal pada lahan yang memiliki kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan; dan
 5. kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati tetap dipertahankan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pengalihfungsian untuk kegiatan lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. penebangan pohon dalam jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan perkebunan rakyat;
 3. perbuatan hukum yang potensial merusak lingkungan seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
 4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan perkebunan rakyat memiliki batasan intensitas untuk alih fungsi lahan perkebunan rakyat diijinkan maksimum 5% (lima persen) dari luasan lahan perkebunan rakyat dengan ketentuan KDB 30% (tiga puluh persen), KLB 0,3 (nol koma tiga), KDH 0,5 (nol koma lima) sesuai dengan RDTR;
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan perkebunan rakyat berupa penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan rakyat; dan
- f. ketentuan tambahan pada kawasan perkebunan rakyat meliputi:
 1. perubahan penggunaan lahan perkebunan rakyat untuk kegiatan yang lain diijinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan rakyat dan merusak lingkungan hidup;
 2. kawasan perkebunan rakyat wajib dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan sebagai kawasan konservasi tinggi;
 3. kawasan perkebunan rakyat berupa tanaman sagu fungsinya dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 4. rencana kawasan perkebunan rakyat yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan; dan
 5. penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan yang bersifat non komersial, dengan rasio 1 : 1 (satu berbanding satu).

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui inventarisasi, serta pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi LP2B;
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan RTH dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi iklim setempat;
 3. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 4. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. kawasan terbangun baik permukiman termasuk permukiman petani pemilik lahan, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian lahan kering; dan
 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 2. kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi bukan pertanian tanaman pangan;
 3. aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama kawasan pertanian; dan
 4. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan pertanian memiliki batasan intensitas alih fungsi lahan pertanian diijinkan maksimum 30% (tiga puluh persen) di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan maksimum 20% (dua puluh persen) terutama di ruas jalan utama sesuai dengan RDTR;
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan pertanian berupa penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian; dan
- f. ketentuan tambahan pada kawasan pertanian meliputi:
1. perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi;
 2. kawasan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan fungsinya sebagai KP2B tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 3. kawasan pertanian yang berupa tanaman sagu tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 4. rencana kawasan pertanian dengan tutupan lahan eksisting berupa hutan primer dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan; dan
 5. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dilakukan berdasarkan IPPKH dan hanya berlaku pada provinsi yang luas wilayah hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
 3. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
 4. kegiatan penangkapan ikan skala kecil;
 5. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 6. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
 7. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor tempel bermesin kurang dari 25 (dua puluh lima) *horse power* dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai; dan

8. penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor dengan alat tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 2. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. kegiatan pelabuhan;
 4. pemantauan dan evaluasi; dan
 5. pemeliharaan dan pengolahan perikanan, bangunan pendukung pemijahan, pemasangan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan;
 2. kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan, jaringan pipa/atau kabel bawah laut, serta kesesuaian budidaya perikanan;
 3. kegiatan perikanan yang menggunakan alat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) gross ton pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
 5. segala jenis kegiatan perikanan budi daya pada kawasan perikanan tangkap;
 6. penangkapan ikan pada wilayah perairan yang tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang disepakati dalam rangka pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan; dan
 7. penangkapan ikan yang melebihi jumlah tangkapan yang dibolehkan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan perikanan memiliki batasan intensitas diijinkan maksimum KDB yang diijinkan 30% (tiga puluh persen), KLB 0,3% (nol koma tiga persen) dan KDH 50% (lima puluh persen);
 - e. sarana prasarana minimum pada kawasan perikanan berupa penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya; dan
 - f. ketentuan tambahan pada kawasan perikanan meliputi:
 1. pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan;
 2. pengaturan perairan umum terhadap jenis dan alat tangkap guna menjaga kelestarian sumber hayati perikanan;
 3. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;
 4. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan; dan
 5. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan dan energi; dan
 3. prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, pembangkit listrik, maupun kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pertanian, perkebunan dan peternakan;
 2. pendidikan, penelitian dan pariwisata penambangan;
 3. permukiman penunjang pertambangan;
 4. industri pengolah hasil tambang; dan
 5. penambangan dalam skala besar pada kawasan budi daya dan/atau kawasan lindung secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. jenis kegiatan pengelolaan perikanan, pariwisata, industri dan permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
 2. penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau KP2B;
 3. penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan/atau kerusakan akuifer air tanah; dan
 4. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan pertambangan dan energi memiliki batasan untuk kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diijinkan 50% (lima puluh persen), KLB 0,5 (nol koma lima) dan KDH 25% (dua puluh lima persen);
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan pertambangan dan energi berupa penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian; dan
- f. ketentuan tambahan pada kawasan pertambangan dan energi meliputi:
1. rencana kawasan pertambangan dan energi pada kawasan yang tutupan lahannya berupa tanaman sagu, dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 2. rencana kawasan pertambangan dan energi yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan; dan
 3. rencana kawasan pertambangan dan energi di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri beserta prasarana penunjang industri; dan
 2. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 3. prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang kawasan peruntukan industri.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
 2. kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 3. pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri memiliki batasan untuk intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah tempat kegiatan industri dilakukan, KDB yang diijinkan 50% (lima puluh persen), KLB 50% (lima puluh persen) dan KDH 25% (dua puluh lima persen);
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan industri berupa penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjang serta pos pengawasan dan kantor pengelola; dan
- f. ketentuan tambahan pada kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. rencana kawasan peruntukan industri pada kawasan dengan tutupan lahannya berupa tanaman sagu maka fungsinya dilindungi dan dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 2. rencana kawasan peruntukan industri yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 3. penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan termasuk industri selain industri primer hasil hutan wajib memiliki IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan termasuk industri selain industri primer hasil hutan;
 5. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 6. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 7. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. mendirikan serta mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dengan menerapkan hemat energi serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. penyediaan RTH pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan berwisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;

4. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi; dan
5. kegiatan pengembangan hutan mangrove dan kawasan lindung geologi.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap;
 2. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
 3. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata;
 2. industri, pertambangan dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan;
 3. kegiatan berupa alur pelayaran; dan
 4. pembangunan pipa/kabel bawah laut.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata memiliki batasan untuk intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30% (tiga puluh persen), KLB 0,6 (nol koma enam), dan KDH 40% (empat puluh persen);
- e. sarana prasarana minimum kawasan pariwisata berupa penyediaan bangunan untuk mendukung pengembangan wisata ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata; dan
- f. ketentuan tambahan pada kawasan pariwisata meliputi:
 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 2. RTH;
 3. sarana dan prasarana permukiman;
 4. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 5. sarana pelayanan umum, perkantoran dan perdagangan jasa yang merupakan bagian dari kawasan permukiman.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 3. industri kecil dengan sampah dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan mengganggu permukiman penduduk;
 4. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan
 5. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;

2. kegiatan pembangunan fasilitas yang melakukan pengambilan air tanah secara berlebihan;
 3. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 4. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan
 5. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan permukiman memiliki batasan untuk intensitas pengembangan kawasan terbangun yang diijinkan dengan ketentuan KDB 30% (tiga puluh persen), KLB 0,6 (nol koma enam), dan KDH 40% (empat puluh persen);
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan permukiman meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 2. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman, terdiri dari:
 - a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman terbangun dan/atau luas kawasan perkotaan yang ditetapkan; dan
 - b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan permukiman yang dapat dikontribusi dari KDH.
- f. ketentuan tambahan pada kawasan peruntukan permukiman meliputi:
1. rencana kawasan permukiman yang terdapat di kawasan dengan tutupan lahannya berupa tanaman sagu fungsinya dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 2. rencana kawasan peruntukan permukiman yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 3. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 4. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 5. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 6. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 7. pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas kavling yang dimiliki;
 8. wilayah MHA yang berada dalam kawasan peruntukan permukiman tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA; dan
 9. pemanfaatan dalam kawasan peruntukan permukiman tidak merubah rona lingkungan.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. sarana transportasi dan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
 2. perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan

3. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 4. pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 5. kegiatan usaha sektor informal.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan transportasi memiliki batasan sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada kawasan transportasi terkait kebandarudaraan dan kepelabuhanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana prasarana minimum pada kawasan transportasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada kawasan transportasi terkait kebandarudaraan dan kepelabuhanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan tambahan pada kawasan transportasi meliputi:
 1. pembangunan bandar udara dan pelabuhan pada kawasan hutan hanya pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau luas provinsi dan proyek strategis nasional serta wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. arahan peraturan zonasi kawasan transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebandarudaraan dan kepelabuhanan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf j, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. intensitas pemanfaatan ruang pertahanan dan keamanan yang memiliki batasan pertahanan dan keamanan serta sarana prasarana minimum dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus

Pasal 84

- (1) Kawasan dengan ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan resapan air;
 - f. kawasan sempadan;
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - h. kawasan karst;
 - i. kawasan pertambangan mineral dan batubara;
 - j. kawasan migrasi satwa; dan
 - k. Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan (DLKp).
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 85

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kabupaten Fak Fak;
 - b. Kabupaten Kaimana; dan
 - c. Kabupaten Manokwari.
- (2) KKOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
 - b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP;
 - c. pengembangan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KKOP dan kawasan kebisingan penerbangan; dan
 - d. tidak dikembangkan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP.
- (3) tidak membuat halangan dan/atau melakukan kegiatan lain di KKOP, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.

Pasal 86

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
- (2) Ketentuan khusus untuk KP2B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. kawasan tanaman pangan tidak dapat dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. hak ulayat MHA yang berada dalam KP2B tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - c. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - d. kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Fak Fak;
 - 2. Kabupaten Kaimana;
 - 3. Kabupaten Manokwari;
 - 4. Kabupaten Manokwari Selatan;
 - 5. Kabupaten Raja Ampat;
 - 6. Kabupaten Sorong;
 - 7. Kabupaten Sorong Selatan;
 - 8. Kabupaten Tambrau;
 - 9. Kabupaten Teluk Bintuni;
 - 10. Kabupaten Teluk Wondama;
 - 11. Kota Sorong; dan
 - 12. Wilayah Laut.
 - e. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - f. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - g. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Kaimana;
 - 2. Kabupaten Manokwari;
 - 3. Kabupaten Manokwari Selatan;
 - 4. Kabupaten Maybrat;
 - 5. Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - 6. Kabupaten Raja Ampat;
 - 7. Kabupaten Sorong;
 - 8. Kabupaten Sorong Selatan;
 - 9. Kabupaten Tambrau;
 - 10. Kabupaten Teluk Bintuni;
 - 11. Kabupaten Teluk Wondama;
 - 12. Kota Sorong; dan
 - 13. Wilayah Laut.
 - h. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Manokwari;
 - 2. Kabupaten Manokwari Selatan;
 - 3. Kabupaten Raja Ampat;
 - 4. Kabupaten Sorong;
 - 5. Kabupaten Sorong Selatan;
 - 6. Kabupaten Tambrau;
 - 7. Kabupaten Teluk Wondama;

8. Kota Sorong; dan
 9. Wilayah Laut.
- i. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi tersebar di :
 1. Kabupaten Fak Fak;
 2. Kabupaten Kaimana;
 3. Kabupaten Manokwari;
 4. Kabupaten Manokwari Selatan;
 5. Kabupaten Raja Ampat;
 6. Kabupaten Sorong;
 7. Kabupaten Sorong Selatan;
 8. Kabupaten Tambrauw;
 9. Kabupaten Teluk Bintuni;
 10. Kabupaten Teluk Wondama; dan
 11. Kota Sorong.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir;
 - b. batas dataran banjir;
 - c. pemanfaatan ruang di daerah dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
 - d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - f. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 - g. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir bandang wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir bandang;
 - b. batas dataran banjir;
 - c. pemanfaatan ruang di daerah dataran banjir bagi RTH, kawasan tangkapan air atau kawasan perlindungan setempat;
 - d. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di kawasan rawan banjir bandang;
 - e. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir bandang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
 - g. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - h. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - i. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.

- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tanah longsor wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
 - pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
 - pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
 - penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
 - pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana abrasi wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana abrasi;
 - tetap mempertahankan fungsi perlindungan yang ada seperti kawasan ekosistem mangrove dan kawasan sempadan;
 - bangunan dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut; dan
 - penyediaan batu pemecah ombak.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - penghijauan;
 - pelarangan penebangan hutan secara berlebihan; dan
 - sosialisasi kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kekeringan wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kekeringan;
 - peningkatan ketersediaan sumber air;
 - peningkatan daerah resapan air;
 - rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
 - pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
 - pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
 - kegiatan panen dan konservasi air;

- i. pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat seperti gilir giring;
 - j. pengembangan jaringan pengamatan iklim di kawasan rawan kekeringan; dan
 - k. pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber air.
- (8) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gempa wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana gempa;
 - b. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - c. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - d. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - e. pembangunan di kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($>0,3g$) dan intensitas maksimum $> VIII$ MMI;
 - f. pembangunan di kawasan rawan gempa menengah harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($0,2-0,3g$) dan intensitas maksimum VI - VII MMI;
 - g. pembangunan di kawasan rawan gempa rendah harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($0,1-0,2g$) dan intensitas maksimum $< VI$ MMI; dan
 - h. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (9) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tsunami;
 - b. pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - c. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - d. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
 - e. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
 - f. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai;
 - g. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
 - h. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- (10) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf i, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana likuefaksi;
- b. pembatasan pembangunan infrastruktur, hunian dan kegiatan lainnya di kawasan rawan likuefaksi;
- c. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana likuefaksi, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana likuefaksi; dan
- d. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.

Pasal 88

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kawasan cagar budaya di darat; dan
 - b. kawasan cagar budaya di laut.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan Pegunungan Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - b. kawasan Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari;
 - c. kawasan situs seni cadas Misool di Kabupaten Raja Ampat;
 - d. kawasan situs seni cadas Kokas di Kabupaten Fak Fak;
 - e. kawasan situs seni cadas Teluk Bicari, Selat Maimai dan Teluk Triton di Kabupaten Kaimana;
 - f. kawasan religi Aitumeri di Kabupaten Teluk Wondama; dan
 - g. kawasan situs religi Alkitab Tua di Roon di Kabupaten Teluk Wondama.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari wilayah kelola MHA.
- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah kelola MHA di laut.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya di darat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembatasan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya;
 - b. pelestarian bentuk asli bangunan cagar budaya;
 - c. pelestarian kawasan cagar budaya sesuai dengan karakteristik dan keasliannya;
 - d. pengembangan pusat penelitian sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya;
 - e. upaya restorasi, renovasi serta preservasi yang dilakukan di setiap kawasan dengan partisipasi masyarakat;
 - f. peningkatan peran kawasan cagar budaya tersebut sebagai pusat kegiatan budaya;
 - b. peningkatan perawatan dan perbaikan terhadap bangunan/benda/situs cagar budaya yang ada;
 - c. pengembangan kawasan cagar budaya sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 - d. pengembangan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian kawasan cagar budaya;
 - e. penentuan sistem zonasi sebagai arahan dalam pengembangan; dan
 - f. hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan cagar budaya tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya di laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. wilayah kelola MHA yang ada di laut merupakan wilayah yang diberikan kepada MHA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperhatikan kelestarian lingkungan, keserasian wilayah dan menunjang kegiatan perikanan masyarakat.
 - c. memperhatikan zona larang tangkap atau perlindungan;
 - d. aktualisasi kegiatan adat yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - f. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan pemanfaatan;
 - g. pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - h. pengendalian kegiatan masyarakat;
 - i. pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum;
 - j. pemanfaatan sumber daya sesuai dengan peraturan adat MHA setempat;
 - k. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayah MHA dilakukan oleh lembaga hukum adat yang sudah ditetapkan;
 - l. MHA menyusun aturan pemanfaatan sumber daya di wilayah kelola;
 - m. mekanisme pengakuan, perlindungan, pemberdayaan dan pemanfaatan terhadap usulan wilayah dan lembaga MHA dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - n. pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan, keserasian wilayah dan menunjang kegiatan perikanan masyarakat;
 - o. kegiatan pembangunan yang memerlukan reklamasi harus disertai terlebih dahulu dengan studi kelayakan secara lingkungan sosial, fisik dan ekonomi; dan
 - p. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan lain yang berdampak terhadap perikanan masyarakat, diperlukan pengendalian yang ketat bersama masyarakat.
- (7) Rencana wilayah kelola MHA di laut tercantum dalam Lampiran XVI Dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah Provinsi ini.

Pasal 89

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e meliputi berada di seluruh wilayah Provinsi; dan
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. restrukturisasi unit pelaksana teknis pengelola kawasan sesuai hasil rasionalisasi kategori kawasan;
 - b. pembatasan pembangunan pada kawasan resapan air;
 - c. tidak diijinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, dan fungsi hidrologis;
 - d. pemanfaatan diizinkan apabila dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penyelidikan, kepentingan nasional, hajat hidup orang banyak dan dapat menjaga keaslian bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, serta kelestarian flora dan fauna; dan
 - e. pengembangan resapan air untuk kawasan perkotaan.

Pasal 90

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. sempadan pantai tersebar di:
 1. Kabupaten Fak Fak;
 2. Kabupaten Kaimana;
 3. Kabupaten Manokwari;
 4. Kabupaten Manokwari Selatan;
 5. Kabupaten Raja Ampat;
 6. Kabupaten Sorong;
 7. Kabupaten Sorong Selatan;
 8. Kabupaten Tambrau;
 9. Kabupaten Teluk Bintuni;
 10. Kabupaten Teluk Wondama; dan
 11. Kota Sorong.
 - b. sempadan sungai tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - c. sempadan situ, danau, embung dan waduk tersebar di:
 1. Kabupaten Fak Fak;
 2. Kabupaten Kaimana;
 3. Kabupaten Manokwari;
 4. Kabupaten Maybrat;
 5. Kabupaten Pegunungan Arfak;
 6. Kabupaten Raja Ampat; dan
 7. Kabupaten Teluk Bintuni.
 - d. sempadan pipa/kabel tersebar di:
 1. Kota Sorong; dan
 2. Wilayah Laut
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan perikanan budi daya tetap dipertahankan dan tidak merusak alam;
 - b. penanaman mangrove;
 - c. pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 - d. menyediakan RTH pada kawasan terbangun;
 - e. pada kawasan perumahan dan kawasan transportasi bangunan diarahkan memiliki intensitas bangunan KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB 0,5 (nol koma lima) dan KDH 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan KDB >50% (lebih dari lima puluh persen) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan; dan
 - f. hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan sempadan pantai tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan;
 - b. reboisasi atau penanaman pohon kembali;
 - c. pengembangan kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air;
 - d. menyediakan RTH pada kawasan terbangun;
 - e. pada kawasan terbangun diarahkan memiliki kepadatan rendah KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB 0,5 (nol koma lima) dan KDH 20% (dua puluh persen) sedangkan untuk kawasan perumahan yang

- sudah ada saat ini dengan KDB >50% (lebih dari lima puluh persen) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan; dan
- f. hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan sempadan sungai tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan berbagai kepentingan dalam kawasan sempadan danau maka perlu dipertegas batas lapangan kawasan perlindungan;
 - b. pengembangan kawasan terbangun harus di luar fungsi batas sempadan kawasan waduk/danau;
 - c. luas kawasan penyangga untuk waduk/danau ditetapkan secara teknis oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang masing-masing kabupaten/kota; dan
 - d. hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan sempadan danau tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penataan alur pipa dan kabel bawah laut dengan menyusun dan menyepakati peta alur pipa dan kabel bawah laut;
 - b. penertiban alur pipa dan kabel bawah laut melalui perizinan dalam proses bisnis yang terjadi dari hulu sampai hilir;
 - c. penetapan daerah terbatas terlarang pada kegiatan usaha migas dan persetujuan layak operasi;
 - d. menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 (lima ratus) meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi kapal dan/atau alat lainnya disekeliling instalasi kapal dan/atau alat lainnya yang terdapat di landas kontinen dan/atau di atasnya;
 - e. menetapkan daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter terhitung dari titik terluar dari daerah terlarang;
 - f. pada daerah terbatas, kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh;
 - g. daerah terlarang, di mana orang, kapal, pesawat terbang dan lain-lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukinya; dan
 - h. pengendalian kesesuaian ruang dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Kabupaten Kaimana;
 - b. Kabupaten Manokwari;
 - c. Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Kota Sorong; dan
 - e. Wilayah laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h terdapat di:
 - a. Kabupaten Fak Fak;
 - b. Kabupaten Kaimana;

- c. Kabupaten Manokwari;
 - d. Kabupaten Manokwari Selatan;
 - e. Kabupaten Maybrat;
 - f. Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - g. Kabupaten Raja Ampat;
 - h. Kabupaten Sorong;
 - i. Kabupaten Sorong Selatan;
 - j. Kabupaten Tambrau;
 - k. Kabupaten Teluk Bintuni; dan
 - l. Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. zonasi kawasan karst dalam mendukung pengelolaan kawasan karst;
 - b. mengevaluasi sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
 - c. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
 - d. perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst;
 - e. sistem hidrogeologi karst yang ada tidak boleh terganggu (sumber air di kawasan tersebut sudah dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat sekitar);
 - f. perlindungan terhadap morfologi karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar; dan
 - g. hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan karst tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf i tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - b. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - c. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan;
 - d. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya;
 - e. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
 - f. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - g. diperlukan perencanaan yang terintegrasi antara sektor kehutanan dan sektor pertambangan; dan

- h. perlunya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk investor tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan pertambangan serta wilayah yang terbuka untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan.
- (3) Pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan melalui perbaikan kesuburan tanah dengan meningkatkan kualitas lahan pasca tambang melalui pelaksanaan reklamasi secara tepat sesuai dengan rencana reklamasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan pengendalian dan pengawasan.

Pasal 94

- (1) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j berupa alur migrasi penyu dan alur migrasi mamalia laut, terdiri dari:
- a. Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Kabupaten Tambrauw; dan
 - c. Wilayah laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota laut;
 - b. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum secara selektif yang berada sekitar alur migrasi biota laut untuk menjaga fungsi kelestarian biota laut;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut;
 - d. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk melindungi alur migrasi biota laut;
 - e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait;
 - f. pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna perlindungan dari kepunahan;
 - g. melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan;
 - h. perlindungan habitat untuk makan, berlindung dan kawin;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan; dan
 - j. melakukan kajian terhadap aspek bioekologis biota.

Pasal 95

- (1) DLKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf l terdapat di wilayah laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tersedianya sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai;
 - c. memasang tanda batas sesuai antara DLKp dengan batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) perairan yang telah ditetapkan;
 - d. kegiatan di dalam DLKp tidak boleh mengganggu operasional DLKr pelabuhan dan alur pelayaran;
 - e. pengembangan kegiatan dalam DLKp sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- f. tidak dikembangkan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada DLKp;
- g. tidak membuat halangan (*obstacle*) dan/atau melakukan kegiatan lain di DLKp, kecuali memperoleh izin dari otoritas pelabuhan;
- h. menyediakan dan memelihara alur pelayaran; dan
- i. memelihara kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 96

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 1
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 97

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 98

- (1) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang berisikan:
 - a. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

- (4) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan hasil perwujudan RTRW, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.
- (5) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (7) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.
- (8) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 99

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 101

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis provinsi;
 - b. indikasi arahan zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 102

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau

- d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pemberian keringan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 104

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 diatur oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 106

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

Pasal 108

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.

- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 109

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran indikasi arahan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. penggunaan dokumen persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 - f. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - g. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPR Laut secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - h. pelaksanaan Persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
 - i. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - j. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi.

Pasal 110

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pembatalan izin;
- g. pencabutan izin;
- h. pembongkaran bangunan;
- i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- j. denda administratif.

Pasal 111

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil pengawasan penataan ruang;
- c. hasil audit tata ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 112

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Peran masyarakat dan kelembagaan dalam penataan ruang di provinsi terdiri dari:

- a. hak dan kewajiban;
- b. peran masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 114

- (1) Hak masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a berupa:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
 - g. menjamin pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).

- (2) Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a berupa:
- a. memberikan masukan terkait penentuan arah pengembangan wilayah dan kawasan;
 - b. melakukan identifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan wilayah dan kawasan;
 - c. memberi masukan dalam perumusan konsep rencana tata ruang;
 - d. menetapkan rencana tata ruang;
 - e. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - f. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - g. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR; dan
 - h. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 115

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 116

Peran masyarakat dalam penataan ruang di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 117

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 118

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 120

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 121

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 122

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 123

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang (FPR) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 124

- (1) Penegakan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota dan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 109, Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan tahapan pelaksanaan penindakan perkara kepada PPNS untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- (3) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 125

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

- (1) Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyusunan pemanfaatan ruang.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini berlaku:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang - undangan;
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dari Peraturan Daerah; dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.
 - d. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (3) Pemanfaatan ruang kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 26, 31, 33, dan 39 tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 128

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Papua Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Provinsi Papua Barat dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Papua Barat tahun 2022- 2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 (seratus) m² merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.
- (4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 (seratus) m² dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1). Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di wilayah perairan pantai pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh negara.
- (2). Tanah reklamasi dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3). Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyarikat teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan pengurangan material.
- (4). Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Dalam hal terdapat perubahan garis pantai pada wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota akibat perubahan alamiah maka garis pantai akan disesuaikan dengan garis pantai terbaru yang dikeluarkan instansi berwenang.

Pasal 132

- (1) Dalam hal belum ada kesepakatan batas wilayah administrasi Pulau Sain/Pulau Sayang, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas di wilayah perbatasan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Maluku Utara, wilayah administrasi dimaksud dikelola bersama sesuai fungsi kawasan hingga penetapan batas oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dalam rangka mencegah terganggunya tatanan sosial masyarakat adat, penyelesaian batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan penetapan batas daerah, termasuk batas daerah di laut yang mempengaruhi wilayah perencanaan maka perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan perubahan dimaksud.
- (4) Pulau Sain/Pulau Sayang, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dari Peraturan Daerah.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 April 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

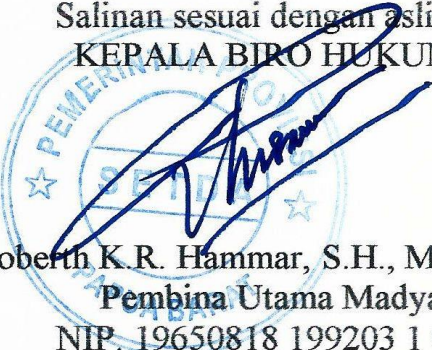
CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (3-54/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022-2041

I. UMUM

Ruang wilayah Provinsi Papua Barat yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, merupakan satu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi wadah manusia dan makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kehidupan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sejak dilaksanakannya Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Papua Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, telah terjadi berbagai perkembangan eksternal maupun internal yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pembangunan yang berimplikasi terhadap perubahan pemanfaatan dan penggunaan ruang di Provinsi Papua Barat.

Perubahan eksternal dimaksud terkait perubahan kebijakan di tingkat pusat, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan ketentuan pasal 23 ayat (6) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan regulasi turunannya yang memandatkan integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan berdasarkan rekomendasi hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi perlu direvisi dan diatur kembali.

Untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Papua Barat, perlu memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Rencana Tata Ruang Wilayah ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Muatan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang yang meliputi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana, Rencana Pola Ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, Kawasan Strategis Provinsi, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama, Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi arahan zonasi, arahan perizinan/KKPR, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan zona tunda (*holding zone*) merupakan teknis penggambaran usulan pelepasan kawasan hutan pada peta, adapun mekanisme pelepasan mengikuti ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona tunda (*holding zone*) merupakan teknis penggambaran usulan pelepasan kawasan hutan pada peta, adapun mekanisme pelepasan mengikuti ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona tunda (*holding zone*) merupakan teknis penggambaran usulan pelepasan kawasan hutan pada peta, adapun mekanisme pelepasan mengikuti ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona tunda (*holding zone*) merupakan teknis penggambaran usulan pelepasan kawasan hutan pada peta, adapun mekanisme pelepasan mengikuti ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona tunda (*holding zone*) merupakan teknis penggambaran usulan pelepasan kawasan hutan pada peta, adapun mekanisme pelepasan mengikuti ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

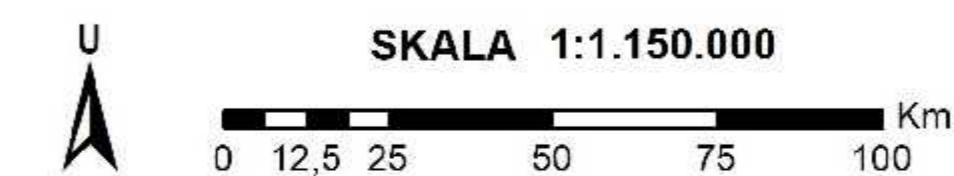
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 111



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA WILAYAH PERENCANAAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten/Kota
- Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
- Kabupaten**
 - Fak Fak
 - Kaimana
 - Kota Sorong
 - Manokwari
 - Manokwari Selatan
 - Maybrat
 - Pegunungan Arfak
 - Raja Ampat
 - Sorong
 - Sorong Selatan
 - Tambrau
 - Teluk Bintuni
 - Teluk Wondama
- Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Wilayah 12mil Laut
- Perairan**
 - Garis Pantai
 - Badan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

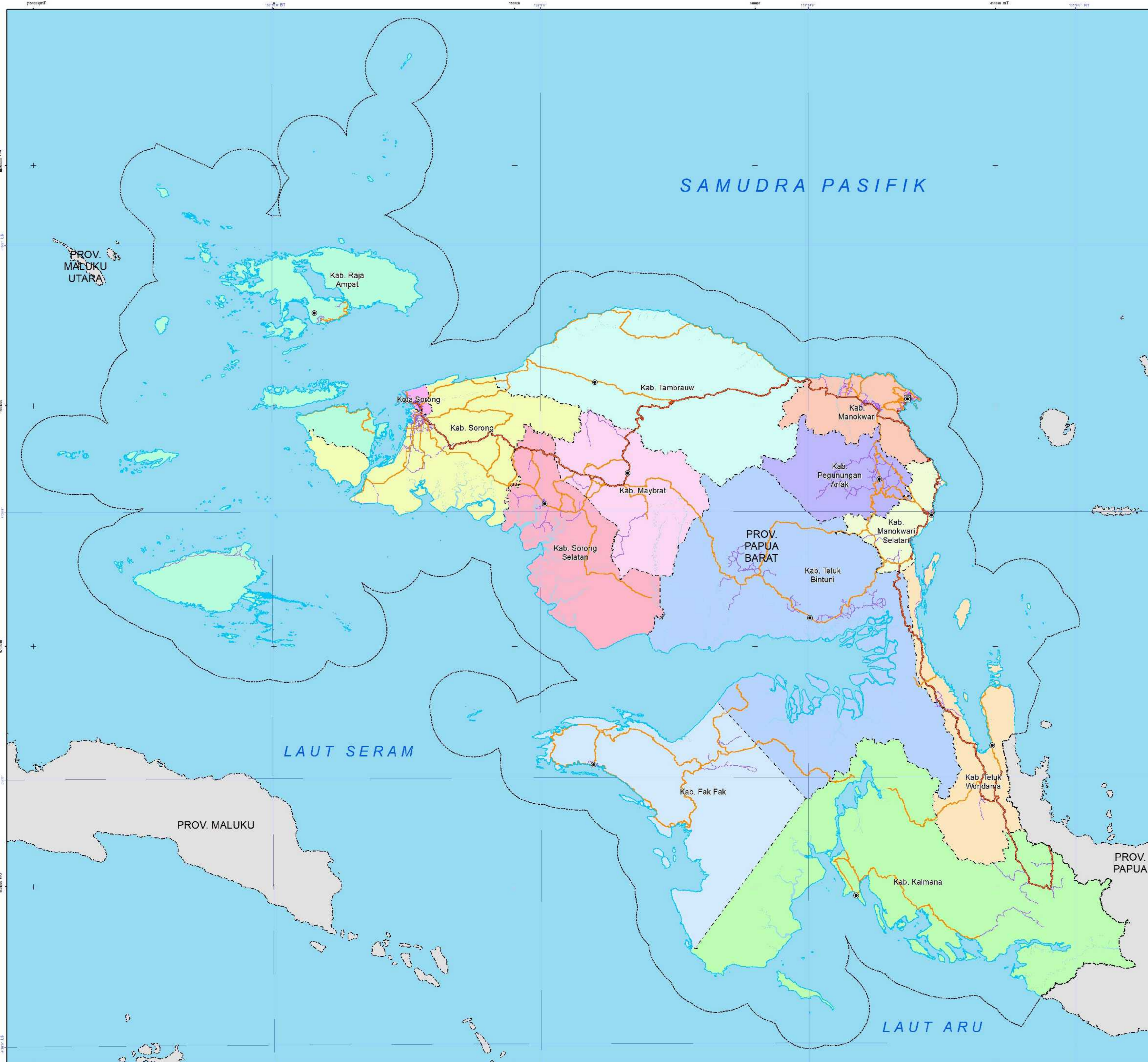
- Citra Satelit SPOT 6/7 perekaman Tahun 2016 - 2019, bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Peta Dasar yang telah terkorksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
- RTR Pulau Papua Tahun 2014
- Peta Alokasi Ruang Perda no.13/2019 RZW-3-K Provinsi Papua Barat
- Fempolahan data tahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 53S dan 53E

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

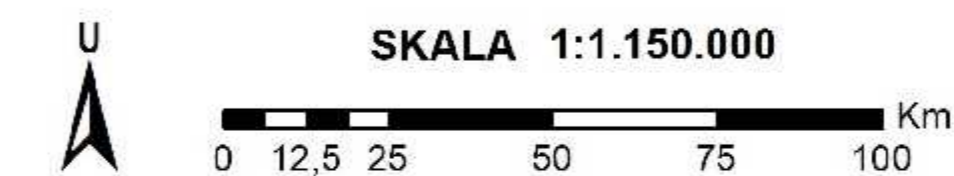
DOMINGGUS MANDACAN





LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA WILAYAH ADAT



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Administrasi**
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Wilayah 12 Mil Laut
- Perairan**
 - ~ ~ ~ ~ ~ Cais Pantai
 - ~ ~ ~ ~ ~ Datar Air

Wilayah Adat

- Wilayah Adat Bomberay
- Wilayah Adat Domberay
- Wilayah Adat Saireri

Suku Pesisir

- Area Sasi Kaimana
- Kawasan Perikanan Adat Teluk Mayalibit
- Kerakera
- Sasi Laut Kampung Imbuan dan Waibem
- Wilayah Keramat Suku Imeko
- Wilayah adat Miosu
- Wilayah adat suku Oburauw
- Zona Egek Malaumkarta

Suku Daratan

- | | | |
|----------|---------------|--------------|
| Abun | Mairasi | Napiti |
| Aifat | Mare | Oburauw |
| Aitinyo | Maybrat | Patipi |
| Arguni | Miere | Rumbati |
| Ati-ati | Moi Abun Ji | Sobyar |
| Ayamaruu | Moi Abun Taat | Sekar Pikpik |
| Fathagar | Moi Kelim | Sough |
| Hatam | Moi Klabra | Sough Bouhon |
| Imeko | Moi Lemas | Sumuri |
| Iranutu | Moi Maya | Tehit |
| Ireses | Moi Salkhma | Wamesa |
| Koiway | Moi Sigin | Wertuar |
| Kuri | Moskona | |
| Madewana | Mpur | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

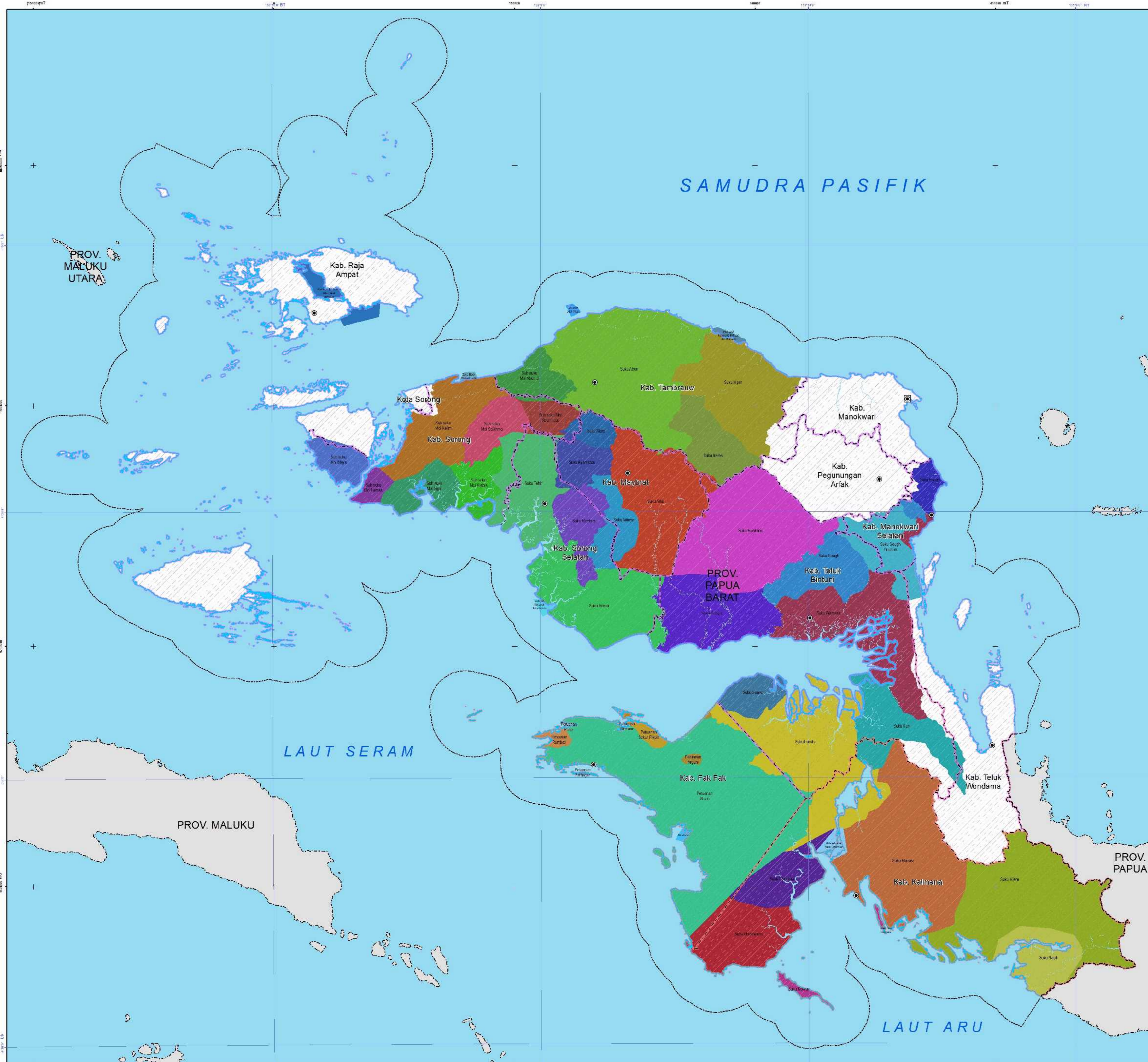
- Citra Satelit SPOT 6/7 perekaman Tahun 2015 - 2019, bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
- Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
- RTR Pulau Papua Tahun 2014
- Peta Lokasi Ruang Penda no.13/2019 RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
- Hengolahan data tahun 2022.

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 52S dan 53S

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

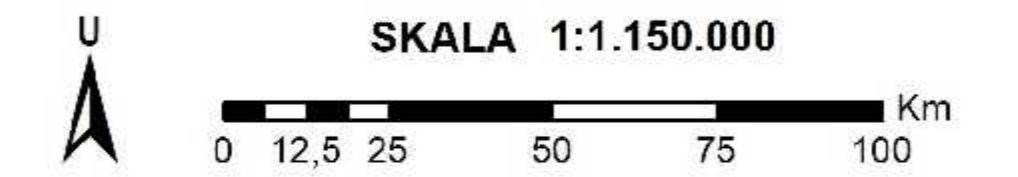
DOMINGGUS MANDACAN





LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| Ibukota Provinsi | Batas Administrasi | Perairan |
| Ibukota Kabupaten/Kota | Batas Kabupaten/Kota | Garis Pantai |
| | Batas Wilayah 12 mil laut | Datar Air |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|--|--|
| Sistem Pusat Permukiman | Sistem Jaringan Energi |
| Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi |
| Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung |
| Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) | Gardu Listrik |
| Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | Jaringan Minyak dan Gas Bumi |
| Sistem Jaringan Transportasi | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik |
| Transportasi Darat | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik |
| Jembatan | Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik |
| Terminal Penumpang Tipe B | Sistem Jaringan Telekomunikasi |
| Stasiun Kereta Api | Infrastruktur Jaringan Tetap |
| Pelabuhan Sungai dan Danau | Jaringan Bergerak |
| Pelabuhan Penyeberangan | Jaringan Tetap |
| Jalan Arteri Primer | Sistem Jaringan Sumber Daya Air |
| Jalan Kolektor Primer | Bangunan Pengondalian Banjir |
| Jalan Lokal Primer | Bangunan Sumber Daya |
| Jaringan Jalur Kereta Api | Sistem Jaringan Irigasi |
| Lintas Penyeberangan Antarprovinsi | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya |
| Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi | Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
| Transportasi Udara | Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) |
| Bandar Udara Pengumpul | Sistem Jaringan Persampahan |
| Bandar Udara Pengumpan | |
| Transportasi Laut | |
| Pelabuhan Utama | |
| Pelabuhan Pengumpul | |
| Pelabuhan Pengumpan | |
| Terminal Umum | |
| Terminal Khusus | |
| Pelabuhan Perikanan Pantai | |
| Pangkalan Pendaratan Ikan | |
| Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit SPOT 6/7 perekaman Tahun 2016 - 2019, bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Peta Dasar yang telah terkorksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
- RTR Pulau Papua Tahun 2014
- Peta Alokasi Ruang Perda no.13/2019 RZW/3-K Provinsi Papua Barat
- Fenoclinan data tahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 53S dan 53E

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 – 2041.

JEMBATAN

| NO | NAMA JEMBATAN |
|----|---|
| 1 | AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG) / ARAR 1 |
| 2 | AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG) / ARAR 2 |
| 3 | AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG) / ARAR 3 |
| 4 | AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG) / ARAR 4 |
| 5 | AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG) / ARAR 5 |
| 6 | AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG) / ARAR 6 |
| 7 | AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG) / ARAR 7 |
| 8 | AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG) / ARAR 8 |
| 9 | AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG) / ARAR 9 |
| 10 | AMBUNI - TANDIA / ANGKARI |
| 11 | AMBUNI - TANDIA / BAILEY 1 |
| 12 | AMBUNI - TANDIA / BAILEY 3 |
| 13 | AMBUNI - TANDIA / BOX ULUH I |
| 14 | AMBUNI - TANDIA / BOX ULUH III |
| 15 | AMBUNI - TANDIA / BOX YUTU V |
| 16 | AMBUNI - TANDIA / EWARMA I |
| 17 | AMBUNI - TANDIA / EWARMA II |
| 18 | AMBUNI - TANDIA / IWASI |
| 19 | AMBUNI - TANDIA / IWASI II |
| 20 | AMBUNI - TANDIA / KALI GORO |
| 21 | AMBUNI - TANDIA / KALI HERSA |
| 22 | AMBUNI - TANDIA / KALI SELARA |
| 23 | AMBUNI - TANDIA / KALI WOMBU |
| 24 | AMBUNI - TANDIA / KAMBI |
| 25 | AMBUNI - TANDIA / KAMI I |
| 26 | AMBUNI - TANDIA / KAMI II |
| 27 | AMBUNI - TANDIA / NAIKERE |
| 28 | AMBUNI - TANDIA / NANIMORI II |
| 29 | AMBUNI - TANDIA / NANIMORI III |
| 30 | AMBUNI - TANDIA / S. EWARMA |
| 31 | AMBUNI - TANDIA / S. ITAMA |
| 32 | AMBUNI - TANDIA / S. KAMBI |
| 33 | AMBUNI - TANDIA / S. SARI |
| 34 | AMBUNI - TANDIA / S. SIRI |
| 35 | AMBUNI - TANDIA / S. ULAR |
| 36 | AMBUNI - TANDIA / S. UTUH |
| 37 | AMBUNI - TANDIA / S. YUTU |
| 38 | AMBUNI - TANDIA / S.ULUH |
| 39 | AMBUNI - TANDIA / TAU |
| 40 | AMBUNI - TANDIA / UKI AMBUNI IX |
| 41 | AMBUNI - TANDIA / UKI AMBUNI X |
| 42 | AMBUNI - TANDIA / UKI AMBUNI XI |
| 43 | AMBUNI - TANDIA / UKI AMBUNI XIV |
| 44 | AMBUNI - TANDIA / UKI AMBUNI XV |

| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|-----------------------------------|
| 45 | AMBUNI - TANDIA / UKI AMBUNI XVI |
| 46 | AMBUNI - TANDIA / UKI AMBUNI XVII |
| 47 | AMBUNI - TANDIA / UKI EWARMA III |
| 48 | AMBUNI - TANDIA / UKI EWARMA IV |
| 49 | AMBUNI - TANDIA / UKI EWARMA V |
| 50 | AMBUNI - TANDIA / UKI EWARMA VI |
| 51 | AMBUNI - TANDIA / UKI EWARMA VII |
| 52 | AMBUNI - TANDIA / UKI ITAMA I |
| 53 | AMBUNI - TANDIA / UKI ITAMA II |
| 54 | AMBUNI - TANDIA / UKI ITAMA III |
| 55 | AMBUNI - TANDIA / UKI ITAMA IV |
| 56 | AMBUNI - TANDIA / UKI IWASI IV |
| 57 | AMBUNI - TANDIA / UKI IWASI V |
| 58 | AMBUNI - TANDIA / UKI KAMBI II |
| 59 | AMBUNI - TANDIA / UKI SARARTI I |
| 60 | AMBUNI - TANDIA / UKI SARARTI II |
| 61 | AMBUNI - TANDIA / UKI SARARTI III |
| 62 | AMBUNI - TANDIA / UKI SARARTI IV |
| 63 | AMBUNI - TANDIA / UKI SARARTI V |
| 64 | AMBUNI - TANDIA / UKI SARARTI VI |
| 65 | AMBUNI - TANDIA / UKI WOMBU IX |
| 66 | AMBUNI - TANDIA / UKI WOMBU V |
| 67 | AMBUNI - TANDIA / UKI WOMBU VI |
| 68 | AMBUNI - TANDIA / UKI WOMBU VII |
| 69 | AMBUNI - TANDIA / UKI WOMBU VIII |
| 70 | AMBUNI - TANDIA / UKI WOMBU X |
| 71 | AMBUNI - TANDIA / UKI YUTU III |
| 72 | AMBUNI - TANDIA / UKI YUTU IV |
| 73 | AMBUNI - TANDIA / WEBI II |
| 74 | AMBUNI - TANDIA / WEBI III |
| 75 | AMBUNI - TANDIA / WEBI IV |
| 76 | AMBUNI - TANDIA / WOMBU I |
| 77 | AMBUNI - TANDIA / WOMBU II |
| 78 | AMBUNI - TANDIA / WOMBU III |
| 79 | AMBUNI - TANDIA / WOMBU IV |
| 80 | AMBUNI - TANDIA / WOSIMI |
| 81 | AMBUNI - TANDIA / YUTU I |
| 82 | AMBUNI - TANDIA / YUTU II |
| 83 | AROBA - FURWATA / BC YARU II |
| 84 | AROBA - FURWATA / MONIARA I |
| 85 | AROBA - FURWATA / MUAR |
| 86 | AROBA - FURWATA / UKI MONIARA I |
| 87 | AROBA - FURWATA / UKI MONIARA II |
| 88 | AROBA - FURWATA / UKI MONIARA III |
| 89 | AROBA - FURWATA / UKI YARU III |
| 90 | AROBA - FURWATA / UKI YARU IV |
| 91 | AROBA - FURWATA / UKI YARU V |
| 92 | AROBA - FURWATA / UKI YARU VI |
| 93 | AROBA - FURWATA / UKI YARU VII |
| 94 | AROBA - FURWATA / UKI YARU VIII |
| 95 | AROBA - FURWATA / UKI YARU X |

| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|------------------------------------|
| 96 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XI |
| 97 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XII |
| 98 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XIII |
| 99 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XIV |
| 100 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XIX |
| 101 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XV |
| 102 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XVI |
| 103 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XVII |
| 104 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XVIII |
| 105 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XX |
| 106 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XXI |
| 107 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XXII |
| 108 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XXIII |
| 109 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XXIV |
| 110 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XXV |
| 111 | AROBA - FURWATA / UKI YARU XXVI |
| 112 | AROBA - FURWATA / YARU |
| 113 | BOFUER - WARMENU / IFRE II |
| 114 | BOFUER - WARMENU / KAITRO |
| 115 | BOFUER - WARMENU / KALI SIMUR |
| 116 | BOFUER - WARMENU / OH |
| 117 | BOFUER - WARMENU / RAWA TONAS I |
| 118 | BOFUER - WARMENU / RAWA TONAS II |
| 119 | BOFUER - WARMENU / RAWA TONAS III |
| 120 | BOFUER - WARMENU / UKI WARMENU I |
| 121 | BOFUER - WARMENU / UKI WARMENU III |
| 122 | BOFUER - WARMENU / UKI WARMENU IV |
| 123 | BOFUER - WARMENU / URUK II |
| 124 | BOFUER - WARMENU / WAFFRUK |
| 125 | BOFUER - WARMENU / WARMENU |
| 126 | BOFUER - WARMENU / WERSIKU I |
| 127 | BOFUER - WARMENU / WERSIKU II |
| 128 | BOMBERAY - AROBA / AROBA |
| 129 | BOMBERAY - AROBA / AROBA I |
| 130 | BOMBERAY - AROBA / AROBA II |
| 131 | BOMBERAY - AROBA / AROBA III |
| 132 | BOMBERAY - AROBA / AROBA IV |
| 133 | BOMBERAY - AROBA / AYER |
| 134 | BOMBERAY - AROBA / BC SP II |
| 135 | BOMBERAY - AROBA / DINGGE |
| 136 | BOMBERAY - AROBA / IFRE |
| 137 | BOMBERAY - AROBA / SP II |
| 138 | BOMBERAY - AROBA / SP II - 1 |
| 139 | BOMBERAY - AROBA / SP II - 2 |
| 140 | BOMBERAY - AROBA / SP II - 3 |
| 141 | BOMBERAY - AROBA / SP II - 5 |
| 142 | BOMBERAY - AROBA / SP II - 6 |
| 143 | BOMBERAY - AROBA / SP II - 7 |
| 144 | BOMBERAY - AROBA / SP II - 8 |
| 145 | BOMBERAY - AROBA / SP II - 9 |
| 146 | BOMBERAY - AROBA / SP III |

| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|--|
| 147 | BOMBERAY - AROBA / SP III - 1 |
| 148 | BOMBERAY - AROBA / SP III - 2 |
| 149 | BOMBERAY - AROBA / SP III - 3 |
| 150 | BOMBERAY - AROBA / WAMME |
| 151 | BOMBERAY - AROBA / YOPAR |
| 152 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / ALMA |
| 153 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / AYAMARU I |
| 154 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / AYAMARU II |
| 155 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / AYAMARU III |
| 156 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / AYAMARU V |
| 157 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / HUBERITA |
| 158 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KALI SEHU |
| 159 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KAMBUAYA I |
| 160 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAGRIT I |
| 161 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAGRIT II |
| 162 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAGRIT III |
| 163 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAGRIT IV |
| 164 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAMIKI |
| 165 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAMIKI CS |
| 166 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAMIKI I |
| 167 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAMIKI II |
| 168 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAMIKI III |
| 169 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / KLAMIKI IV |
| 170 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / MALABOLO |
| 171 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / PASIR PUTIH I |
| 172 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / PASIR PUTIH II |
| 173 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / PASIR PUTIH III |
| 174 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / SOROAN |
| 175 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / SOUM |
| 176 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / WELEK I |
| 177 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / WELEK II |
| 178 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / WELEK III |
| 179 | BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA / WELEK IV |
| 180 | BTS. KOTA FAKFAK - HURIMBER - KOKAS / KALI MATI I |
| 181 | BTS. KOTA FAKFAK - HURIMBER - KOKAS / MANAMBUR |
| 182 | BTS. KOTA SORONG - AIMAS (KM.23) - KLAMONO / AIMAS |
| 183 | BTS. KOTA SORONG - AIMAS (KM.23) - KLAMONO / KLAGENE |
| 184 | BTS. KOTA SORONG - AIMAS (KM.23) - KLAMONO / KLAGRIT |
| 185 | BTS. KOTA SORONG - AIMAS (KM.23) - KLAMONO / KLAGRIT 1 |
| 186 | BTS. KOTA SORONG - AIMAS (KM.23) - KLAMONO / K LAPMA |
| 187 | BTS. KOTA SORONG - AIMAS (KM.23) - KLAMONO / MAHGALIK |
| 188 | BTS. KOTA SORONG - AIMAS (KM.23) - KLAMONO / TARTIO |
| 189 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / BAHAM |
| 190 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / BAHAM II |
| 191 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / BAHAM III |
| 192 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / BUDIDI I |
| 193 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / BUDIDI II |
| 194 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / BUDIDI III |
| 195 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / BUDIDI IV |
| 196 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / BUDIDI V |
| 197 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / GULUMANTA |

| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|--|
| 198 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / JEMBATAN MIRING |
| 199 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KALIYANI I |
| 200 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KALIYANI II |
| 201 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KINAM |
| 202 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KINAM II |
| 203 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KINAM III |
| 204 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KOMBATE |
| 205 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KRAMAMONGGA |
| 206 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KRAMAMONGGA II |
| 207 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KRAMAMONGGA III |
| 208 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / KRASOT |
| 209 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / MAMBUNI-BUNI |
| 210 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / MARUKRUK |
| 211 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / MBITI |
| 212 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / NDIBWIR NDIBWIR |
| 213 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / NEMBUKTEB |
| 214 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / SERUBUK I |
| 215 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / SERUBUK II |
| 216 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / WAREMO I |
| 217 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / WAREMO II |
| 218 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / WAREMO III |
| 219 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / WAREMO IV |
| 220 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / WAREMO V |
| 221 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / WOS I |
| 222 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / WOS II |
| 223 | HURIMBER - BAHAM - BOMBERAI / WOS III |
| 224 | JLN. A. YANI (SORONG) / REMU I |
| 225 | JLN. BATU PUTIH (KAIMANA) / TORABE |
| 226 | JLN. DRS. ESAU SESA (MANOKWARI) / RENDANI |
| 227 | JLN. RAYA KROI (KAIMANA) / AIR BESAR |
| 228 | JLN. TRIKORA (MANOKWARI) / KALI DINGIN |
| 229 | JLN. YOS SUDARSO (MANOKWARI) / KALI KONTO |
| 230 | JLN. YOS SUDARSO (MANOKWARI) / KAMPUNG BOU |
| 231 | JLN. YOS SUDARSO (MANOKWARI) / WIRSI |
| 232 | KAMBUAYA - SUSUMUK / MIRAFAN |
| 233 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / 60 |
| 234 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / 61 |
| 235 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / 62 |
| 236 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / 63 |
| 237 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / 65 |
| 238 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / 67 |
| 239 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / KALI PUTAR |
| 240 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / KLAFOK |
| 241 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / KLAMONO |
| 242 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / MALADOFOK I CS |
| 243 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / MALADOFOK II CS |
| 244 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / PATAR |
| 245 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / SALILI CS |
| 246 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / SALILI II |
| 247 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / SALUK I |
| 248 | KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN / SALUK II |

| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|--|
| 249 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / ABIET |
| 250 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / AKWEY |
| 251 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / AMEM |
| 252 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / AQUARI |
| 253 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / ASITI |
| 254 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / AYAI |
| 255 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / AYAWASI |
| 256 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / BORI |
| 257 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / BOX 1 |
| 258 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / BOX 2 |
| 259 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / GUHMA |
| 260 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / IBOKRE |
| 261 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / IFAIF |
| 262 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / ITAT I |
| 263 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / ITAT II |
| 264 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / ITAT III |
| 265 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / IVON |
| 266 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / KALI API 2 |
| 267 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / KALI FIS |
| 268 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / KALI MATI I |
| 269 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / KALI MATI II |
| 270 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / KALI SISU |
| 271 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / KAMUNDAN HULU |
| 272 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / KREAMOT |
| 273 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / MAMBRUK 1 |
| 274 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / MAMBRUK 2 |
| 275 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / NAMSIE |
| 276 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / SUNE |
| 277 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / SYAMOS |
| 278 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / WARIAT |
| 279 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / WIYAN |
| 280 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / YAFUAH I |
| 281 | KUMURKEH - AYAMASI - SNOPI / YAFUAH II |
| 282 | MAKBON - MEGA / KLADALA |
| 283 | MAKBON - MEGA / KLADEMEK |
| 284 | MAKBON - MEGA / KLAGOTOM |
| 285 | MAKBON - MEGA / KLAMINI |
| 286 | MAKBON - MEGA / KLAMUGUN |
| 287 | MAKBON - MEGA / KLAWILIK |
| 288 | MAKBON - MEGA / KLAWOMA |
| 289 | MAKBON - MEGA / S. KALAIMIS |
| 290 | MAKBON - MEGA / S. KLAFUMUN |
| 291 | MAKBON - MEGA / S. KLAGAU |
| 292 | MAKBON - MEGA / S. KLASAM |
| 293 | MAKBON - MEGA / SUNGAI MEGA |
| 294 | MAKBON - MEGA / SWATUT |
| 295 | MAKBON - MEGA / UKI |
| 296 | MAKBON - MEGA / UKI 1 |
| 297 | MAKBON - MEGA / UKI 12 |
| 298 | MAKBON - MEGA / UKI 14 |
| 299 | MAKBON - MEGA / UKI 15 |

| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|--|
| 300 | MAKBON - MEGA / UKI 20 |
| 301 | MAKBON - MEGA / UKI 21 |
| 302 | MAKBON - MEGA / UKI 22 |
| 303 | MAKBON - MEGA / UKI 23 |
| 304 | MAKBON - MEGA / UKI 25 |
| 305 | MAKBON - MEGA / UKI 26 |
| 306 | MAKBON - MEGA / UKI 5 |
| 307 | MAKBON - MEGA / UKI 8 |
| 308 | MAKBON - MEGA / UKI 9 |
| 309 | MAMEH - BINTUNI / BOTAI |
| 310 | MAMEH - BINTUNI / BOTAI 3A |
| 311 | MAMEH - BINTUNI / BOX CALVER |
| 312 | MAMEH - BINTUNI / BOX CALVER 1 |
| 313 | MAMEH - BINTUNI / CEMOT I |
| 314 | MAMEH - BINTUNI / CEMOT II |
| 315 | MAMEH - BINTUNI / KALI MINYAK |
| 316 | MAMEH - BINTUNI / KALI MINYAK I |
| 317 | MAMEH - BINTUNI / KALI MUTURI |
| 318 | MAMEH - BINTUNI / KALI PUTIH |
| 319 | MAMEH - BINTUNI / KALI PUTIH 1 |
| 320 | MAMEH - BINTUNI / KALI TUMAH |
| 321 | MAMEH - BINTUNI / KALI URAS |
| 322 | MAMEH - BINTUNI / KELAPA 1 |
| 323 | MAMEH - BINTUNI / MANIMERI DISTRIK |
| 324 | MAMEH - BINTUNI / MIYU |
| 325 | MAMEH - BINTUNI / MIYU 2 |
| 326 | MAMEH - BINTUNI / MOTHY |
| 327 | MAMEH - BINTUNI / MOTHY 1 |
| 328 | MAMEH - BINTUNI / MOTHY 2 |
| 329 | MAMEH - BINTUNI / SESIH |
| 330 | MAMEH - BINTUNI / SIHU II |
| 331 | MAMEH - BINTUNI / SIHU III |
| 332 | MAMEH - BINTUNI / SOYU |
| 333 | MAMEH - BINTUNI / SOYU I |
| 334 | MAMEH - BINTUNI / TIRASAI |
| 335 | MAMEH - BINTUNI / TOTO |
| 336 | MAMEH - BINTUNI / TUMA I |
| 337 | MAMEH - BINTUNI / URAS 2 |
| 338 | MAMEH - BINTUNI / URAS 3 |
| 339 | MAMEH - BINTUNI / URASI I |
| 340 | MAMEH - BINTUNI / YUKI II |
| 341 | MAMEH - BINTUNI / YURANSA |
| 342 | MARUNI - BTS. KOTA MANOKWARI / ANDAI |
| 343 | MARUNI - BTS. KOTA MANOKWARI / ANDAI II |
| 344 | MARUNI - BTS. KOTA MANOKWARI / ANDAI III |
| 345 | MARUNI - BTS. KOTA MANOKWARI / MARIPI I |
| 346 | MARUNI - BTS. KOTA MANOKWARI / MARUNI |
| 347 | MARUNI - BTS. KOTA MANOKWARI / SOWI I |
| 348 | MARUNI - BTS. KOTA MANOKWARI / SOWI IV |
| 349 | MARUNI - BTS. KOTA MANOKWARI / WAKABORI |
| 350 | MARUNI - ORANSBARI / ACEMO I |

| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|--------------------------------------|
| 351 | MARUNI - ORANSBARI / ACEMO II |
| 352 | MARUNI - ORANSBARI / ACEMO III |
| 353 | MARUNI - ORANSBARI / ACEMO IV |
| 354 | MARUNI - ORANSBARI / ANGGRESI |
| 355 | MARUNI - ORANSBARI / ANGGRESI I |
| 356 | MARUNI - ORANSBARI / BOX ANGGRESI |
| 357 | MARUNI - ORANSBARI / BOX ANGGRESI 1 |
| 358 | MARUNI - ORANSBARI / BOX ANGGRESI 2 |
| 359 | MARUNI - ORANSBARI / BOX ANGGRESI 3 |
| 360 | MARUNI - ORANSBARI / BOX ANGGRESI 4 |
| 361 | MARUNI - ORANSBARI / INDOGI |
| 362 | MARUNI - ORANSBARI / MASABUI |
| 363 | MARUNI - ORANSBARI / MUPI |
| 364 | MARUNI - ORANSBARI / MUPI I |
| 365 | MARUNI - ORANSBARI / WANDOKI |
| 366 | MARUNI - ORANSBARI / WANDOKI I |
| 367 | MARUNI - ORANSBARI / WANDOKI PANTAI |
| 368 | MARUNI - ORANSBARI / WARAMI |
| 369 | MARUNI - ORANSBARI / WARAMI 2 |
| 370 | MARUNI - ORANSBARI / WARKAPI I |
| 371 | MARUNI - ORANSBARI / WARKESI |
| 372 | MARUNI - ORANSBARI / WARMARWAY |
| 373 | MARUNI - ORANSBARI / WARNASI |
| 374 | MARUNI - ORANSBARI / WARNASI I |
| 375 | MARUNI - ORANSBARI / WARNYETI |
| 376 | MARUNI - ORANSBARI / WARPOKI |
| 377 | MARUNI - ORANSBARI / WATARIRI I |
| 378 | MARUNI - ORANSBARI / WATARIRI II |
| 379 | MARUNI - ORANSBARI / WEDONI |
| 380 | MARUNI - ORANSBARI / WEDONI I |
| 381 | MARUNI - ORANSBARI / WEDONI PANTAI |
| 382 | MARUNI - ORANSBARI / WITO |
| 383 | ORANSBARI - RANSIKI / COKRAN |
| 384 | ORANSBARI - RANSIKI / KALI MATI |
| 385 | ORANSBARI - RANSIKI / KALI MATI I |
| 386 | ORANSBARI - RANSIKI / MESBAS |
| 387 | ORANSBARI - RANSIKI / MESBAS I |
| 388 | ORANSBARI - RANSIKI / MUARI |
| 389 | ORANSBARI - RANSIKI / PANTAI WI |
| 390 | ORANSBARI - RANSIKI / RANSISKI I |
| 391 | ORANSBARI - RANSIKI / SINDANG JAYA |
| 392 | ORANSBARI - RANSIKI / WARKWANDI |
| 393 | ORANSBARI - RANSIKI / WARKWANDI II |
| 394 | ORANSBARI - RANSIKI / WARMAURI |
| 395 | ORANSBARI - RANSIKI / WARMAURI II |
| 396 | ORANSBARI - RANSIKI / WARSUI |
| 397 | ORANSBARI - RANSIKI / WARSUI 2 |
| 398 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / AIMASI |
| 399 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MANTET 1 |
| 400 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MARUNI II |
| 401 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA I |

| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|---|
| 402 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA II |
| 403 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA III |
| 404 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA IV |
| 405 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA IX |
| 406 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA V |
| 407 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA VI |
| 408 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA VII |
| 409 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA VIII |
| 410 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MATOA X |
| 411 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MOKWAM PIR |
| 412 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / MOKWAM PIR I |
| 413 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / NIMBOY |
| 414 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / PRAFI II |
| 415 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / S.MANTET |
| 416 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / SAY |
| 417 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / SAY 1 |
| 418 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / SP II |
| 419 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / SUBSAY |
| 420 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / WARAMUI |
| 421 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / WARIORI |
| 422 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / WARMARE |
| 423 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / WARMARE 1 |
| 424 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / WARMARE II |
| 425 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / WARMARE III |
| 426 | PRAFI - WARMARE - MARUNI / WASEGI |
| 427 | RANSIKI - MAMEH / BOX GUNUNG BOTAK I |
| 428 | RANSIKI - MAMEH / GAYA BARU |
| 429 | RANSIKI - MAMEH / GEMINI |
| 430 | RANSIKI - MAMEH / INDORYEKI 2 |
| 431 | RANSIKI - MAMEH / INDORYEKI 3 |
| 432 | RANSIKI - MAMEH / KALI MERAH |
| 433 | RANSIKI - MAMEH / KEBER 1 |
| 434 | RANSIKI - MAMEH / KEBER 2 |
| 435 | RANSIKI - MAMEH / KEBER 3 |
| 436 | RANSIKI - MAMEH / KEBER 4 |
| 437 | RANSIKI - MAMEH / LAPANGAN |
| 438 | RANSIKI - MAMEH / LAPANGAN 1 |
| 439 | RANSIKI - MAMEH / MAWI 2 |
| 440 | RANSIKI - MAMEH / MOMI |
| 441 | RANSIKI - MAMEH / MOMI WAREN |
| 442 | RANSIKI - MAMEH / SANDASI |
| 443 | RANSIKI - MAMEH / SIAP |
| 444 | RANSIKI - MAMEH / WAREN |
| 445 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / ACINARI |
| 446 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / ACINARI II |
| 447 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / ADEPA |
| 448 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / ARFU 2 |
| 449 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / ARFU 3 |
| 450 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / ASIMI |
| 451 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / ATOPIYANI |
| 452 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / BOX-1 |

| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|--|
| 453 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / GOSOK |
| 454 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / GOSOK 1 |
| 455 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / GOSOK 2 |
| 456 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KALI API 1 |
| 457 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KALI ARPA |
| 458 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KALI ASEPI |
| 459 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KALI BAMBU |
| 460 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KALI BUAYA |
| 461 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KALI KASI |
| 462 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KALI WARIKI |
| 463 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KEBAR 10 |
| 464 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KEBAR 5 |
| 465 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KEBAR 6 |
| 466 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KEBAR 7 |
| 467 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KEBAR 8 |
| 468 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / KEBAR 9 |
| 469 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / MAITEFA |
| 470 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / MATOA 11 |
| 471 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / MATOA 12 |
| 472 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / MATOA 13 |
| 473 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / MATOA 14 |
| 474 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / MATOA 15 |
| 475 | SNOPY - KEBAR - PRAFI / SNOPY |
| 476 | SORONG - MAKBON / BAINGKETE |
| 477 | SORONG - MAKBON / KLABOT |
| 478 | SORONG - MAKBON / KLADALA |
| 479 | SORONG - MAKBON / KLAGAIS |
| 480 | SORONG - MAKBON / KLAGELEN |
| 481 | SORONG - MAKBON / KLAGULUS I |
| 482 | SORONG - MAKBON / KLAGULUS II |
| 483 | SORONG - MAKBON / KLAGULUS III |
| 484 | SORONG - MAKBON / KLAILIK |
| 485 | SORONG - MAKBON / KLALIN I |
| 486 | SORONG - MAKBON / KLALIN II |
| 487 | SORONG - MAKBON / KLASEIK |
| 488 | SORONG - MAKBON / KLATIGI |
| 489 | SORONG - MAKBON / KLAWAFUN |
| 490 | SORONG - MAKBON / KLAWAI I |
| 491 | SORONG - MAKBON / KLAWAI II |
| 492 | SORONG - MAKBON / KLAWUM |
| 493 | SORONG - MAKBON / KLAWUYUK |
| 494 | SORONG - MAKBON / SONI |
| 495 | SORONG - MAKBON / WARSAMSON I |
| 496 | SORONG - MAKBON / WARSAMSON II |
| 497 | TANGGARUMI - BTS. KOTA KAIMANA / KM 14 |
| 498 | TANGGARUMI - BTS. KOTA KAIMANA / KM 16 |
| 499 | TANGGARUMI - BTS. KOTA KAIMANA / KM 18 |
| 500 | TANGGARUMI - BTS. KOTA KAIMANA / KM 2 |
| 501 | TANGGARUMI - BTS. KOTA KAIMANA / KM 6 |
| 502 | WAISAI - BANDARA / SUNGAI WARMON |
| 503 | WARMENU - FURWATA / AIFA |

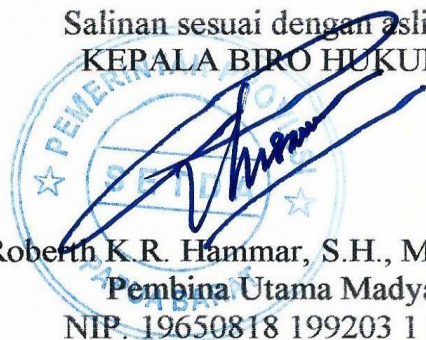
| NO | NAMA JEMBATAN |
|-----------|---|
| 504 | WARMENU - FURWATA / BOIWA |
| 505 | WARMENU - FURWATA / MONIARA VI |
| 506 | WARMENU - FURWATA / MUNIARA I |
| 507 | WARMENU - FURWATA / RUARIFA |
| 508 | WARMENU - FURWATA / TANIBA |
| 509 | WARMENU - FURWATA / TODJI |
| 510 | WARMENU - FURWATA / UKI FURWATA |
| 511 | WARMENU - FURWATA / UKI FURWATA II |
| 512 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA |
| 513 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA II |
| 514 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA III |
| 515 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA IV |
| 516 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA IX |
| 517 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA V |
| 518 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA VI |
| 519 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA VII |
| 520 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA VIII |
| 521 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA X |
| 522 | WARMENU - FURWATA / UKI TANIBA XI |
| 523 | WARMENU - FURWATA / URUB |
| 524 | WARMENU - FURWATA / WATT |
| 525 | WONAMA - TANGGARUMI / TIWARA |
| 526 | JLN. BASUKI RAHMAT (SORONG) / KLABTIN |
| 527 | JLN. BASUKI RAHMAT (SORONG) / KLASAMAN 1 |
| 528 | JLN. BASUKI RAHMAT (SORONG) / KLASAMAN II |
| 529 | JLN. BASUKI RAHMAT (SORONG) / KLAWIK 1 |
| 530 | JLN. BASUKI RAHMAT (SORONG) / YONKA |
| 531 | JLN. YOS SUDARSO (SORONG) / KLABALA |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Robert K. R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 – 2041.

PELABUHAN PENGUMPAN

| NO | NAMA PELABUHAN |
|----|--|
| 1 | Pelabuhan Abidon (Kabupaten Raja Ampat) |
| 2 | Pelabuhan Abun (Kabupaten Tambrauw) |
| 3 | Pelabuhan Adijaya (Kabupaten Kaimana) |
| 4 | Pelabuhan Aferi (Kabupaten Raja Ampat) |
| 5 | Pelabuhan Afona (Kabupaten Kaimana) |
| 6 | Pelabuhan Aisandami (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 7 | Pelabuhan Arandai (Kabupaten Teluk Bintuni) |
| 8 | Pelabuhan Arborek (Kabupaten Raja Ampat) |
| 9 | Pelabuhan Asemdane (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 10 | Pelabuhan Babo (Kabupaten Teluk Bintuni) |
| 11 | Pelabuhan Etna (Kabupaten Kaimana) |
| 12 | Pelabuhan Fafanlap (Kabupaten Raja Ampat) |
| 13 | Pelabuhan Fani (Kabupaten Raja Ampat) |
| 14 | Pelabuhan Frewen (Kabupaten Raja Ampat) |
| 15 | Pelabuhan Gag (Kabupaten Raja Ampat) |
| 16 | Pelabuhan Goras Bomberai (Kabupaten Fak Fak) |
| 17 | Pelabuhan Harapan Jaya Pulau Misool (Kabupaten Raja Ampat) |
| 18 | Pelabuhan Hopmare (Kabupaten Manokwari) |
| 19 | Pelabuhan Imbuan (Kabupaten Manokwari) |
| 20 | Pelabuhan Inawatan (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 21 | Pelabuhan Jefman (Kabupaten Raja Ampat) |
| 22 | Pelabuhan Kabare (Kabupaten Raja Ampat) |
| 23 | Pelabuhan Kabilol (Kabupaten Raja Ampat) |
| 24 | Pelabuhan Kais (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 25 | Pelabuhan Kalobo (Kabupaten Raja Ampat) |
| 26 | Pelabuhan Kanoka (Kabupaten Kaimana) |
| 27 | Pelabuhan Kapadiri (Kabupaten Raja Ampat) |
| 28 | Pelabuhan Karas (Kabupaten Fak Fak) |
| 29 | Pelabuhan Kasim (Kabupaten Sorong) |
| 30 | Pelabuhan Klamano (Kabupaten Sorong) |
| 31 | Pelabuhan Klamono (Kabupaten Sorong) |
| 32 | Pelabuhan Kofiau (Kabupaten Raja Ampat) |
| 33 | Pelabuhan Kokas (Kabupaten Fak Fak) |
| 34 | Pelabuhan Kokoda (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 35 | Pelabuhan Konda (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 36 | Pelabuhan Kuriwamesa (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 37 | Pelabuhan Kwoor (Kabupaten Manokwari) |
| 38 | Pelabuhan Lenmalas (Kabupaten Raja Ampat) |
| 39 | Pelabuhan Lobo (Kabupaten Kaimana) |
| 40 | Pelabuhan Makbon (Kabupaten Sorong) |
| 41 | Pelabuhan Manameri (Kabupaten Teluk Bintuni) |
| 42 | Pelabuhan Mansinam (Kabupaten Manokwari) |
| 43 | Pelabuhan ManyaiFun (Kabupaten Raja Ampat) |
| 44 | Pelabuhan Maruni (Kabupaten Manokwari) |

| NO | NAMA PELABUHAN |
|-----------|---|
| 45 | Pelabuhan Masni (Kabupaten Manokwari) |
| 46 | Pelabuhan Mega (Kabupaten Tambrauw) |
| 47 | Pelabuhan Meos Manggara (Kabupaten Raja Ampat) |
| 48 | Pelabuhan Meosmengkara (Kabupaten Raja Ampat) |
| 49 | Pelabuhan Mneir (Kabupaten Raja Ampat) |
| 50 | Pelabuhan Muarana (Kabupaten Raja Ampat) |
| 51 | Pelabuhan Mugim (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 52 | Pelabuhan Mutus (Kabupaten Raja Ampat) |
| 53 | Pelabuhan Nofa (Kabupaten Kaimana) |
| 54 | Pelabuhan Oransbari (Kabupaten Manokwari Selatan) |
| 55 | Pelabuhan P. Adi (Kabupaten Kaimana) |
| 56 | Pelabuhan P. Ayu (Kabupaten Raja Ampat) |
| 57 | Pelabuhan P. Reni (Kabupaten Raja Ampat) |
| 58 | Pelabuhan P. Roon (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 59 | Pelabuhan Pam (Kabupaten Raja Ampat) |
| 60 | Pelabuhan Pawi (Kabupaten Raja Ampat) |
| 61 | Pelabuhan Pulau Lemon (Kabupaten Manokwari) |
| 62 | Pelabuhan Pulau Yande (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 63 | Pelabuhan Ransiki (Kabupaten Manokwari Selatan) |
| 64 | Pelabuhan Roswar (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 65 | Pelabuhan Sabubar (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 66 | Pelabuhan Saga (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 67 | Pelabuhan Sagan (Kabupaten Fak Fak) |
| 68 | Pelabuhan Saget Baru (Kabupaten Sorong) |
| 69 | Pelabuhan Saifi (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 70 | Pelabuhan Sailolof (Kabupaten Sorong) |
| 71 | Pelabuhan Salawati (Kabupaten Raja Ampat) |
| 72 | Pelabuhan Salawati (Kabupaten Sorong) |
| 73 | Pelabuhan Saoka (Kota Sorong) |
| 74 | Pelabuhan Saonek (Kabupaten Raja Ampat) |
| 75 | Pelabuhan Saremuk (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 76 | Pelabuhan Saubeba (Kabupaten Manokwari) |
| 77 | Pelabuhan Saubeba (Kabupaten Tambrauw) |
| 78 | Pelabuhan Sausapor (Kabupataen Tambrauw) |
| 79 | Pelabuhan Seget (Kabupaten Sorong) |
| 80 | Pelabuhan Segun (Kabupaten Sorong) |
| 81 | Pelabuhan Selasi (Kabupaten Fak Fak) |
| 82 | Pelabuhan Sele (Kabupaten Sorong) |
| 83 | Pelabuhan Selfele (Kabupaten Raja Ampat) |
| 84 | Pelabuhan Senini (Kabupaten Kaimana) |
| 85 | Pelabuhan Siabes (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 86 | Pelabuhan Sowi Marmpa (Kabupaten Manokwari) |
| 87 | Pelabuhan Susunu (Kabupaten Kaimana) |
| 88 | Pelabuhan Tanggaromi (Kabupaten Kaimana) |
| 89 | Pelabuhan Tanjung Kasuari (Kota Sorong) |
| 90 | Pelabuhan Teluk Arguni (Kabupaten Kaimana) |
| 91 | Pelabuhan Teluk Patipi (Kabupaten Fak Fak) |
| 92 | Pelabuhan Urbinasopen (Kabupaten Raja Ampat) |
| 93 | Pelabuhan Waibem (Kabupaten Tambrauw) |
| 94 | Pelabuhan Waifoi (Kabupaten Raja Ampat) |
| 95 | Pelabuhan Waigama (Kabupaten Raja Ampat) |

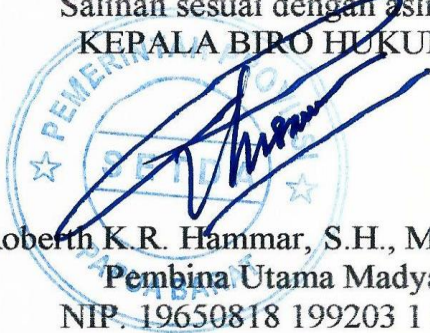
| NO | NAMA PELABUHAN |
|-----------|---|
| 96 | Pelabuhan Waigeo (Kabupaten Raja Ampat) |
| 97 | Pelabuhan Wailebet (Kabupaten Raja Ampat) |
| 98 | Pelabuhan Waisai (Kabupaten Raja Ampat) |
| 99 | Pelabuhan Waisilip (Kabupaten Raja Ampat) |
| 100 | Pelabuhan Wanden (Kabupaten Manokwari) |
| 101 | Pelabuhan Waripi Teluk Etna (Kabupaten Kaimana) |
| 102 | Pelabuhan Warmandi (Kabupaten Tambrauw) |
| 103 | Pelabuhan Warongge (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 104 | Pelabuhan Wau (Kabupaten Tambrauw) |
| 105 | Pelabuhan Wersamben (Kabupaten Raja Ampat) |
| 106 | Pelabuhan Werur (Kabupaten Tambrauw) |
| 107 | Pelabuhan Weti (Kabupaten Fak Fak) |
| 108 | Pelabuhan Windesi (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 119 | Pelabuhan Yamakan (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 110 | Pelabuhan Yambekaki (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 111 | Pelabuhan Yebekaki (Kabupaten Raja Ampat) |
| 112 | Pelabuhan Yellu (Kabupaten Raja Ampat) |
| 113 | Pelabuhan Yembekiri (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 114 | Pelabuhan Yembekwan (Kabupaten Raja Ampat) |
| 115 | Pelabuhan Yembeser (Kabupaten Raja Ampat) |
| 116 | Pelabuhan Yende (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 117 | Pelabuhan Yoop (Kabupaten Teluk Wondama) |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 – 2041.

ALUR PELAYARAN UMUM DAN PERLINTASAN

| NO | ALUR PELAYARAN |
|----|--|
| 1 | Alur Pelayaran Nasional Fakfak-Kaimana; |
| 2 | Alur Pelayaran Nasional Fakfak-Luar Provinsi; |
| 3 | Alur Pelayaran Nasional Fakfak-Luar Provinsi; |
| 4 | Alur Pelayaran Nasional Kaimana-Luar Provinsi; |
| 5 | Alur Pelayaran Nasional Manokwari-Jayapura; |
| 6 | Alur Pelayaran Nasional Manokwari-Biak; |
| 7 | Alur Pelayaran Nasional Sorong-Fakfak; |
| 8 | Alur Pelayaran Nasional Sorong-Luar Provinsi; |
| 9 | Alur Pelayaran Nasional Sorong-Sausapor; |
| 10 | Alur Pelayaran Regional Arguni-Susunu; |
| 11 | Alur Pelayaran Regional Babo-LNG Tangguh; |
| 12 | Alur Pelayaran Regional Bintuni-Amutu; |
| 13 | Alur Pelayaran Regional Fakfak-Goras; |
| 14 | Alur Pelayaran Regional Fakfak-Karas; |
| 15 | Alur Pelayaran Regional Fakfak-Selasi; |
| 16 | Alur Pelayaran Regional Fakfak-Tersus Pertamina; |
| 17 | Alur Pelayaran Regional Fakfak-Weri; |
| 18 | Alur Pelayaran Regional Gn.Botak-Yamberkiri; |
| 19 | Alur Pelayaran Regional Goras-Petrokimia; |
| 20 | Alur Pelayaran Regional Hokmare-Kwor; |
| 21 | Alur Pelayaran Regional Inanwatan-Kokoda; |
| 22 | Alur Pelayaran Regional Kaimana-Lengguru; |
| 23 | Alur Pelayaran Regional Kaimana-Susuni; |
| 24 | Alur Pelayaran Regional Kaimana-Patipi; |
| 25 | Alur Pelayaran Regional Kaimana-Tersus Avona; |
| 26 | Alur Pelayaran Regional Kaimana-Tonggarami; |
| 27 | Alur Pelayaran Regional Karas-Patipi; |
| 28 | Alur Pelayaran Regional Kwor-Waibem; |
| 29 | Alur Pelayaran Regional Kwor-Wanden; |
| 30 | Alur Pelayaran Regional Lengguru-Avona; |
| 31 | Alur Pelayaran Regional Manokwari-Masni; |
| 32 | Alur Pelayaran Regional Manokwari-Nabire; |
| 33 | Alur Pelayaran Regional Manokwari-Wasior; |
| 34 | Alur Pelayaran Regional Masni-Hopmera; |
| 35 | Alur Pelayaran Regional Metamani-Inanwatan; |
| 36 | Alur Pelayaran Regional Misool-Sorong; |
| 37 | Alur Pelayaran Regional Mutus-ManyaiFun; |
| 38 | Alur Pelayaran Regional Oransbari-Gn.Botak; |
| 39 | Alur Pelayaran Regional Oransbari-Wasior; |
| 40 | Alur Pelayaran Regional Oransbari-Yamakan; |
| 41 | Alur Pelayaran Regional Oransbari-Yambekaki; |

| NO | ALUR PELAYARAN |
|-----------|---|
| 42 | Alur Pelayaran Regional P.Gag-Luar Provinsi; |
| 43 | Alur Pelayaran Regional P.Gag-Manyaifun; |
| 44 | Alur Pelayaran Regional P.Gag-Tersus Gag Nikel; |
| 45 | Alur Pelayaran Regional Pulau Gag-Sorong; |
| 46 | Alur Pelayaran Regional Sausapor-Hokmare; |
| 47 | Alur Pelayaran Regional Senini-Tonggarami; |
| 48 | Alur Pelayaran Regional Soron-Teminabuan; |
| 49 | Alur Pelayaran Regional Sorong-Waisai; |
| 50 | Alur Pelayaran Regional Sorong-Babo; |
| 51 | Alur Pelayaran Regional Sorong-Bintuni; |
| 52 | Alur Pelayaran Regional Teminabuan-Metemani; |
| 53 | Alur Pelayaran Regional Waisai-Kapadiri; |
| 54 | Alur Pelayaran Regional Waisai-Mnier; |
| 55 | Alur Pelayaran Regional Waisai-Muarana; |
| 56 | Alur Pelayaran Regional Waisai-Mutus; |
| 57 | Alur Pelayaran Regional Waisai-Urbinasopen; |
| 58 | Alur Pelayaran Regional Waisai-Yabekaki; |
| 59 | Alur Pelayaran Regional Wanden-Hopmera; |
| 60 | Alur Pelayaran Regional Wasior-Aisandami; |
| 61 | Alur Pelayaran Regional Wasior-Asemdame; |
| 62 | Alur Pelayaran Regional Wasior-P.Roon; |
| 63 | Alur Pelayaran Regional Wasior-Yamakan; |
| 64 | Alur Pelayaran Regional Wasior-Yande; |
| 65 | Alur Pelayaran Regional Wasior-Yoop;dan |
| 66 | Alur Pelayaran Regional Yamakan-Yoop. |

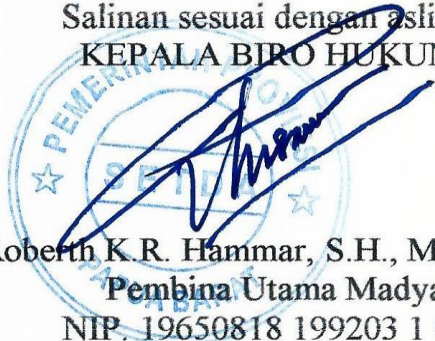
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Roberth K. R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 – 2041.

JARINGAN BERGERAK SATELIT BERUPA SISTEM SATELIT VSAT

| NO | JARINGAN BERGERAK SATELIT BERUPA SISTEM SATELIT VSAT |
|-----------|---|
| 1 | Vsat C-Band - Puskesmas Amban |
| 2 | Vsat C-Band - Puskesmas Aranday Kampung |
| 3 | Vsat C-Band - Puskesmas Babo |
| 4 | Vsat C-Band - Puskesmas Beraur |
| 5 | Vsat C-Band - Puskesmas Bintuni |
| 6 | Vsat C-Band - Puskesmas Bofuwer |
| 7 | Vsat C-Band - Puskesmas Bomberay |
| 8 | Vsat C-Band - Puskesmas Dataran Beimes |
| 9 | Vsat C-Band - Puskesmas Deer |
| 10 | Vsat C-Band - Puskesmas Degen |
| 11 | Vsat C-Band - Puskesmas Dorehkar |
| 12 | Vsat C-Band - Puskesmas Fafurwar |
| 13 | Vsat C-Band - Puskesmas Folley |
| 14 | Vsat C-Band - Puskesmas Idoor |
| 15 | Vsat C-Band - Puskesmas Jagiro |
| 16 | Vsat C-Band - Puskesmas Kaitaro |
| 17 | Vsat C-Band - Puskesmas Kambala |
| 18 | Vsat C-Band - Puskesmas Kiruru |
| 19 | Vsat C-Band - Puskesmas Klabot |
| 20 | Vsat C-Band - Puskesmas Klaso |
| 21 | Vsat C-Band - Puskesmas Klawak |
| 22 | Vsat C-Band - Puskesmas Kokas |
| 23 | Vsat C-Band - Puskesmas Kokoda |
| 24 | Vsat C-Band - Puskesmas Konda |
| 25 | Vsat C-Band - Puskesmas Kramongmongga |
| 26 | Vsat C-Band - Puskesmas Kuri |
| 27 | Vsat C-Band - Puskesmas Lobo |
| 28 | Vsat C-Band - Puskesmas Macuan |
| 29 | Vsat C-Band - Puskesmas Manimeri |
| 30 | Vsat C-Band - Puskesmas ManyaiFun |
| 31 | Vsat C-Band - Puskesmas Masni |
| 32 | Vsat C-Band - Puskesmas Maudus |
| 33 | Vsat C-Band - Puskesmas Mayamuk |
| 34 | Vsat C-Band - Puskesmas Merdey |
| 35 | Vsat C-Band - Puskesmas Meyado |
| 36 | Vsat C-Band - Puskesmas Meyerga |
| 37 | Vsat C-Band - Puskesmas Mowbja |
| 38 | Vsat C-Band - Puskesmas Nuni |
| 39 | Vsat C-Band - Puskesmas Pasir Putih |
| 40 | Vsat C-Band - Puskesmas Pulau Mansinam |
| 41 | Vsat C-Band - Puskesmas Ransiki |
| 42 | Vsat C-Band - Puskesmas Sabubar |
| 43 | Vsat C-Band - Puskesmas Sailolof |

| NO | JARINGAN BERGERAK SATELIT BERUPA SISTEM SATELIT VSAT |
|-----------|--|
| 44 | Vsat C-Band - Puskesmas Samate |
| 45 | Vsat C-Band - Puskesmas Sayosa |
| 46 | Vsat C-Band - Puskesmas Seremuk |
| 47 | Vsat C-Band - Puskesmas Sowi |
| 48 | Vsat C-Band - Puskesmas Tahota |
| 49 | Vsat C-Band - Puskesmas Tanah Rubuh |
| 50 | Vsat C-Band - Puskesmas Tanusan |
| 51 | Vsat C-Band - Puskesmas Tembuni |
| 52 | Vsat C-Band - Puskesmas Tofoi |
| 53 | Vsat C-Band - Puskesmas Tuhiba |
| 54 | Vsat C-Band - Puskesmas Urbinasopen |
| 55 | Vsat C-Band - Puskesmas Waho |
| 56 | Vsat C-Band - Puskesmas Waifoi |
| 57 | Vsat C-Band - Puskesmas Warmare |
| 58 | Vsat C-Band - Puskesmas Warwanai |
| 59 | Vsat C-Band - Puskesmas Werba |
| 60 | Vsat C-Band - Puskesmas Weru |
| 61 | Vsat C-Band - Puskesmas Weriar |
| 62 | Vsat C-Band - Puskesmas Yamor |
| 63 | Vsat C-Band - Puskesmas Yembekiri |
| 64 | Vsat C-Band - Puskesmas Yenbekwan |
| 65 | Vsat C-Band - SD Inpres 41 Sorong |
| 66 | Vsat C-Band - SD Inpres Sp Iv Manimeri |
| 67 | Vsat C-Band - SMA Negeri 1 Bintuni |
| 68 | Vsat C-Band - Stasiun Wilker Pertanian Teluk Bintuni |
| 69 | Vsat C-Band - Stasiun Wilker Pertanian Teluk Wondama |
| 70 | Vsat C-Band - UPT Puskesmas Aisandami |
| 71 | Vsat C-Band - UPT Puskesmas Dabatan |
| 72 | Vsat C-Band - UPT Puskesmas Warsambin |
| 73 | Vsat C-Band - UPT Puskesmas Windesi |
| 74 | Vsat C-Band - UPT Puskesmas Yenanas |
| 75 | Vsat C-Band - UPT. Puskesmas Lilinta |
| 76 | Vsat C-Band - UPTD Puskesmas Majaran |
| 77 | Vsat C-Band - UPTD Puskesmas Mega |
| 78 | Vsat C-Band - UPTD Puskesmas Saonek |
| 79 | Vsat C-Band - UPTD Puskesmas Seget |
| 80 | Vsat C-Band - UPTD Puskesmas Segun |
| 81 | Vsat C-Band - UPTD Puskesmas Waigama |
| 82 | Vsat C-Band - UPTD Puskesmas Waisilip |
| 83 | Vsat FO - Kantor DISDIKBUD Sorong |
| 84 | Vsat FO - MTS Al Maarif 2 Sorong |
| 85 | Vsat FO - SCH SMKN 1 Kabupaten Sorong Aimas |
| 86 | Vsat FO - SMA YPK Bethel Aimas |
| 87 | Vsat FO - SMK Modelling Sorong |
| 88 | Vsat FO - SMK YPK Pengharapan Kabupaten Sorong |
| 89 | Vsat FO - SMP Muhammadiyah 2 Mariyai Kabupaten Sorong |
| 90 | Vsat FO - SMP Muhammadiyah Mariyai |
| 91 | Vsat FO - SMP Negeri 1 Aimas |
| 92 | Vsat FO - SMP Negeri 2 Kabupaten Sorong |
| 93 | Vsat FO - SMP YPK Bethel Mutu Mawolokmae Aimas |
| 94 | Vsat FO - SMP YPPK Seminari Petrus Van Diepen Kabupaten Sorong |

| NO | JARINGAN BERGERAK SATELIT BERUPA SISTEM SATELIT VSAT |
|-----------|---|
| 95 | Vsat GS - Air Terjun Miyah |
| 96 | Vsat GS - Air Terjun/Cenderawasih |
| 97 | Vsat GS - Balai Kampung Wambar |
| 98 | Vsat GS - Bandar Udara Ayawasi |
| 99 | Vsat GS - Bandar Udara Kambuaya |
| 100 | Vsat GS - Bandar Udara Kampung Werur |
| 101 | Vsat GS - Coral Garden Desa Wefiani |
| 102 | Vsat GS - Coral Garden, Situs Sejarah |
| 103 | Vsat GS - Dinas Kesehatan Sausapor |
| 104 | Vsat GS - Disnaker Sorong Selatan |
| 105 | Vsat GS - Kampung Kasi |
| 106 | Vsat GS - Kampung Marsi |
| 107 | Vsat GS - Kampung Sibuni |
| 108 | Vsat GS - Kampung Warami |
| 109 | Vsat GS - Kampung Warnyeti |
| 110 | Vsat GS - Kampung Yonsoribo |
| 111 | Vsat GS - Kantor Desa Boiseran |
| 112 | Vsat GS - Kantor Desa Fior |
| 113 | Vsat GS - Kantor Desa Kampung Baru Fak Fak |
| 114 | Vsat GS - Kantor Desa Kriabisa |
| 115 | Vsat GS - Kantor Desa Mambunibuni |
| 116 | Vsat GS - Kantor Desa Mikiran |
| 117 | Vsat GS - Kantor Desa Perwasak |
| 118 | Vsat GS - Kantor Desa Purwahab Tonggo |
| 119 | Vsat GS - Kantor Desa Saharei |
| 120 | Vsat GS - Kantor Desa Sanggaram |
| 121 | Vsat GS - Kantor Desa Saonek |
| 122 | Vsat GS - Kantor Desa Sisir |
| 123 | Vsat GS - Kantor Desa Urat |
| 124 | Vsat GS - Kantor Desa Waisilip |
| 125 | Vsat GS - Kantor Desa Wawarinai |
| 126 | Vsat GS - Kantor Desa Yenanas |
| 127 | Vsat GS - Kantor Desa Yenbuba |
| 128 | Vsat GS - Kantor Distrik Ayau |
| 129 | Vsat GS - Kantor Distrik Bonkawir |
| 130 | Vsat GS - Kantor Distrik Foley |
| 131 | Vsat GS - Kantor Distrik Kofiau |
| 132 | Vsat GS - Kantor Distrik Kokas |
| 133 | Vsat GS - Kantor Distrik Kramongmongga |
| 134 | Vsat GS - Kantor Distrik ManyaiFun |
| 135 | Vsat GS - Kantor Distrik Mare Selatan |
| 136 | Vsat GS - Kantor Distrik Misool Barat |
| 137 | Vsat GS - Kantor Distrik Misool Selatan |
| 138 | Vsat GS - Kantor Distrik Misool Utara |
| 139 | Vsat GS - Kantor Distrik Mubrani |
| 140 | Vsat GS - Kantor Distrik Samate |
| 141 | Vsat GS - Kantor Distrik Teluk Patipi |
| 142 | Vsat GS - Kantor Distrik Waigeo Timur |
| 143 | Vsat GS - Kantor Distrik Waigeo Utara |
| 144 | Vsat GS - Kantor Distrik Warsambin |
| 145 | Vsat GS - Kantor Distrik Wasior |

| NO | JARINGAN BERGERAK SATELIT BERUPA SISTEM SATELIT VSAT |
|-----------|---|
| 146 | Vsat GS - Kantor Distrik Wondiboi |
| 147 | Vsat GS - Kantor Distrik Yenanas |
| 148 | Vsat GS - Kantor Kampung Bonsayor |
| 149 | Vsat GS - Kantor Kampung Kotam |
| 150 | Vsat GS - Kantor Kampung Nezeth |
| 151 | Vsat GS - Kantor Kampung Onim Jaya |
| 152 | Vsat GS - Kantor Kampung Sipat |
| 153 | Vsat GS - Kantor Kampung Tehak Besar |
| 154 | Vsat GS - Kantor Kampung Yumame |
| 155 | Vsat GS - Kantor Kemenag Sorong Selatan |
| 156 | Vsat GS - Kantor Kemenag Tambrauw |
| 157 | Vsat GS - Kantor Klasis Sausapor |
| 158 | Vsat GS - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Teminabuan |
| 159 | Vsat GS - Kantor UPP Kelas III Kokas |
| 160 | Vsat GS - Kediaman Bupati Maybrat |
| 161 | Vsat GS - Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni |
| 162 | Vsat GS - Koramil Aitinyo |
| 163 | Vsat GS - Koramil Ayamaru |
| 164 | Vsat GS - KPU Pegunungan Arfak |
| 165 | Vsat GS - KPU Tambrauw |
| 166 | Vsat GS - Kuliner, Air Panas |
| 167 | Vsat GS - Lapas Perempuan Kelas III Manokwari |
| 168 | Vsat GS - LPKA Kelas II Manokwari |
| 169 | Vsat GS - Ma Baitul Amin |
| 170 | Vsat GS - Madrasah Aliyah Negeri Manokwari |
| 171 | Vsat GS - Mandopi Rimon |
| 172 | Vsat GS - Perpustakaan Rasiei |
| 173 | Vsat GS - Polsek Aitinyo |
| 174 | Vsat GS - Polsek Ayamaru |
| 175 | Vsat GS - Pulau Amsterdam |
| 176 | Vsat GS - Puskesmas Aifat Timur |
| 177 | Vsat GS - Puskesmas Amberbaken |
| 178 | Vsat GS - Puskesmas Ayamaru Timur |
| 179 | Vsat GS - Puskesmas Dum |
| 180 | Vsat GS - Puskesmas Fef |
| 181 | Vsat GS - Puskesmas Karas |
| 182 | Vsat GS - Puskesmas Kebar |
| 183 | Vsat GS - Puskesmas Klasaman |
| 184 | Vsat GS - Puskesmas Kwoor |
| 185 | Vsat GS - Puskesmas Malaimsimsa |
| 186 | Vsat GS - Puskesmas Malanu |
| 187 | Vsat GS - Puskesmas Malawei |
| 188 | Vsat GS - Puskesmas Miyah |
| 189 | Vsat GS - Puskesmas Remu |
| 190 | Vsat GS - Puskesmas Salamkai |
| 191 | Vsat GS - Puskesmas Sausapor |
| 192 | Vsat GS - Puskesmas Senopi |
| 193 | Vsat GS - Puskesmas Sorong |
| 194 | Vsat GS - Puskesmas Sorong Timur |
| 195 | Vsat GS - Puskesmas Syujak |
| 196 | Vsat GS - Puskesmas Wasior |

| NO | JARINGAN BERGERAK SATELIT BERUPA SISTEM SATELIT VSAT |
|-----------|---|
| 197 | Vsat GS - Puskesmas Wernas |
| 198 | Vsat GS - Puskesmas Wondiboi |
| 199 | Vsat GS - Puskesmas Yembun |
| 200 | Vsat GS - RSUD Wondama |
| 201 | Vsat GS - Rumah Sakit Umum Pratama Warmare |
| 202 | Vsat GS - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bintuni |
| 203 | Vsat GS - SD Inpres 09 Oransbari |
| 204 | Vsat GS - SD Inpres 09 Sausapor |
| 205 | Vsat GS - SD Inpres 16 Kalobo |
| 206 | Vsat GS - SD Inpres 33 Subsai |
| 207 | Vsat GS - SD Inpres Wasior |
| 208 | Vsat GS - SD Negeri 14 Ayamaru |
| 209 | Vsat GS - SD Negeri 14 Teminabuan |
| 210 | Vsat GS - SD Negeri 16 Suwiam |
| 211 | Vsat GS - SD Negeri 20 Sire |
| 212 | Vsat GS - SD Negeri 5 Pulau Raam |
| 213 | Vsat GS - SD Negeri Bikar |
| 214 | Vsat GS - SD Negeri Manggurai |
| 215 | Vsat GS - SD Negeri Mapura |
| 216 | Vsat GS - SD Negeri Wabem |
| 217 | Vsat GS - SD YPK Arus |
| 218 | Vsat GS - SD YPK Effata Werur Besar |
| 219 | Vsat GS - SD YPK Emaus |
| 220 | Vsat GS - SD YPK Imanuel Jitmau |
| 221 | Vsat GS - SD YPK Imanuel Werur |
| 222 | Vsat GS - SD YPK Jokte |
| 223 | Vsat GS - SD YPK Kisor |
| 224 | Vsat GS - SD YPK Lachai-Roi Saubeba |
| 225 | Vsat GS - SD YPK Maranatha Kartapura |
| 226 | Vsat GS - SD YPK Persiapan Erok Wero |
| 227 | Vsat GS - SD YPK Pison Fategomi |
| 228 | Vsat GS - SD YPK Rado |
| 229 | Vsat GS - SD YPK Sauf |
| 230 | Vsat GS - SD YPK Segior |
| 231 | Vsat GS - SD YPK Sikhem Bariat |
| 232 | Vsat GS - SD YPK Soroan |
| 233 | Vsat GS - SD YPK Wondamawi |
| 234 | Vsat GS - SD YPPK Aisa |
| 235 | Vsat GS - SD YPPK Bori |
| 236 | Vsat GS - SD YPPK Efata Kocuwer |
| 237 | Vsat GS - SD YPPK Kocuas |
| 238 | Vsat GS - SD YPPK Konja |
| 239 | Vsat GS - SD YPPK Maan |
| 240 | Vsat GS - SD YPPK Mosun |
| 241 | Vsat GS - SD YPPK Santo Petrus Seya |
| 242 | Vsat GS - SD YPPK St. Petrus Ayawasi |
| 243 | Vsat GS - SD, SMP, SMA Serkos |
| 244 | Vsat GS - SD, SMP, SMA Solta Baru |
| 245 | Vsat GS - Sekretariat P3MD Kabupaten Maybrat |
| 246 | Vsat GS - SMA Keguruan Sorong |
| 247 | Vsat GS - SMA LabSchool STKIP Muh. Kabupaten Sorong |

| NO | JARINGAN BERGERAK SATELIT BERUPA SISTEM SATELIT VSAT |
|-----------|---|
| 248 | Vsat GS - SMA Negeri 1 Aifat |
| 249 | Vsat GS - SMA Negeri 1 Aitinyo |
| 250 | Vsat GS - SMA Negeri 1 Inanwatan |
| 251 | Vsat GS - SMA Negeri 1 Sausapor |
| 252 | Vsat GS - SMA Negeri 1 Wondama |
| 253 | Vsat GS - SMA Negeri 3 Mega |
| 254 | Vsat GS - SMA Negeri 4 Klamono |
| 255 | Vsat GS - SMA Negeri 4 Sorong |
| 256 | Vsat GS - SMA Negeri 6 Kabupaten Sorong |
| 257 | Vsat GS - SMA Negeri 7 Raja Ampat |
| 258 | Vsat GS - SMA Negeri 7 Sorong |
| 259 | Vsat GS - SMA Negeri 8 Raja Ampat |
| 260 | Vsat GS - SMA Negeri 9 Kabupaten Sorong |
| 261 | Vsat GS - SMA Negeri Amberbaken |
| 262 | Vsat GS - SMA Negeri Fef |
| 263 | Vsat GS - SMA Negeri Kaitaro |
| 264 | Vsat GS - SMA Negeri Kebar |
| 265 | Vsat GS - SMA Negeri Kokoda |
| 266 | Vsat GS - SMA Negeri Meyado |
| 267 | Vsat GS - SMA Negeri Saengga |
| 268 | Vsat GS - SMA Swasta YPPK St Arnoldus Yansen |
| 269 | Vsat GS - SMA YPK Aitumieri |
| 270 | Vsat GS - SMA YPK Kaibi |
| 271 | Vsat GS - SMK Kesehatan Tambarauw |
| 272 | Vsat GS - SMK Negeri 1 Bintuni |
| 273 | Vsat GS - SMK Negeri 2 Kebar (Bisnis) |
| 274 | Vsat GS - SMK Negeri Ayamaru |
| 275 | Vsat GS - SMK Negeri Tandia |
| 276 | Vsat GS - SMK Perikanan & Kelautan Aitumieri |
| 277 | Vsat GS - SMK YPK Aitumeri |
| 278 | Vsat GS - SMP Abt Sorong |
| 279 | Vsat GS - SMP Advent Sausapor |
| 280 | Vsat GS - SMP Bukit Zaitun Sorong |
| 281 | Vsat GS - SMP Muhammadiyah 2 Mariyai |
| 282 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Aifat |
| 283 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Aifat Timur |
| 284 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Aitinyo |
| 285 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Aitinyo Tengah |
| 286 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Ayamaru Utara |
| 287 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Dum |
| 288 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Inanwatan |
| 289 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Kais Darat |
| 290 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Moswaren |
| 291 | Vsat GS - SMP Negeri 1 Sawiat |
| 292 | Vsat GS - SMP Negeri 10 Sorong |
| 293 | Vsat GS - SMP Negeri 12 Sidey |
| 294 | Vsat GS - SMP Negeri 14 Sorong |
| 295 | Vsat GS - SMP Negeri 2 Aifat |
| 296 | Vsat GS - SMP Negeri 2 Ayamaru |
| 297 | Vsat GS - SMP Negeri 2 Bintuni |
| 298 | Vsat GS - SMP Negeri 2 Raisei |

| NO | JARINGAN BERGERAK SATELIT BERUPA SISTEM SATELIT VSAT |
|-----------|---|
| 299 | Vsat GS - SMP Negeri 2 Raja Ampat |
| 300 | Vsat GS - SMP Negeri 2 Teminabuan |
| 301 | Vsat GS - SMP Negeri 3 Kampung Ani |
| 302 | Vsat GS - SMP Negeri 3 Sorong |
| 303 | Vsat GS - SMP Negeri 4 Makbon |
| 304 | Vsat GS - SMP Negeri 5 Kabupaten Sorong |
| 305 | Vsat GS - SMP Negeri 5 Raja Ampat |
| 306 | Vsat GS - SMP Negeri 6 Oransbari |
| 307 | Vsat GS - SMP Negeri 6 Sorong |
| 308 | Vsat GS - SMP Negeri 7 Sorong |
| 309 | Vsat GS - SMP Negeri 8 Amberbaken |
| 310 | Vsat GS - SMP Negeri 9 Raja Ampat |
| 311 | Vsat GS - SMP Negeri Aisandami |
| 312 | Vsat GS - SMP Negeri Kebar |
| 313 | Vsat GS - SMP Negeri Kokoda Utara |
| 314 | Vsat GS - SMP Negeri Kuri |
| 315 | Vsat GS - SMP Negeri Mega |
| 316 | Vsat GS - SMP Negeri Naikere |
| 317 | Vsat GS - SMP Negeri Satap Meniy |
| 318 | Vsat GS - SMP Negeri Saukorem |
| 319 | Vsat GS - SMP Negeri Sausapor |
| 320 | Vsat GS - SMP Negeri Sibena |
| 321 | Vsat GS - SMP Negeri Tembuni |
| 322 | Vsat GS - SMP Negeri Terpadu Bintuni |
| 323 | Vsat GS - SMP Negeri Wasior |
| 324 | Vsat GS - SMP Negeri Yembun |
| 325 | Vsat GS - SMP Nusantara Sorong |
| 326 | Vsat GS - SMP Perintis Kelapa Dua |
| 327 | Vsat GS - SMP Perintis Sp. II Manimeri |
| 328 | Vsat GS - SMP Perintis Stengkol III |
| 329 | Vsat GS - SMP Satap Inam |
| 330 | Vsat GS - SMP Stella Maris Tofoi |
| 331 | Vsat GS - SMP Tk.Betania Kokoda |
| 332 | Vsat GS - SMP YPK Aitumere |
| 333 | Vsat GS - SMP YPK Jitmau |
| 334 | Vsat GS - SMP YPK Tanah Merah |
| 335 | Vsat GS - SMP YPK Teminabuan |
| 336 | Vsat GS - SMP YPPK Santa Monika |
| 337 | Vsat GS - Tambrauw Ecotourism Center Sausapor |
| 338 | Vsat GS - TIC Aimas |
| 339 | Vsat GS - Tourism Information Center (TIC) Raja Ampat |
| 340 | Vsat GS - Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey |
| 341 | Vsat GS - UPP Oransbari |
| 342 | Vsat GS - Wisata Burung Kampung Klabili |
| 343 | Vsat GS - Wisata Burung Kampung Nanggouw |
| 344 | Vsat Ku-Band - Kantor Bupati Sorong Selatan |
| 345 | Vsat Ku-Band - Puskesmas Klafdalim |
| 346 | Vsat Ku-Band - Puskesmas Klamono |
| 347 | Vsat Ku-Band - Puskesmas Makbon |
| 348 | Vsat Ku-Band - Puskesmas Teminabuan |
| 349 | Vsat Ku-Band - Puskesmas Wayer |

| NO | JARINGAN BERGERAK SATELIT BERUPA SISTEM SATELIT VSAT |
|-----------|---|
| 350 | Vsat Ku-Band - SD Negeri 15 Wermit |
| 351 | Vsat Ku-Band - SD Persiapan 200 Moko |
| 352 | Vsat Ku-Band - SD YPK Haha |
| 353 | Vsat Ku-Band - SD YPK Keyen |
| 354 | Vsat Ku-Band - SD YPK Maranatha Sausapor |
| 355 | Vsat Ku-Band - SD YPK Sion Sungguer |
| 356 | Vsat Ku-Band - SMA Negeri 1 Prafi |
| 357 | Vsat Ku-Band - SMA Negeri 1 Sorong |
| 358 | Vsat Ku-Band - SMA Negeri 1 Warmare |
| 359 | Vsat Ku-Band - SMA Negeri 2 Minyabouw |
| 360 | Vsat Ku-Band - SMA YPK Martin Luther Teminabuan |
| 361 | Vsat Ku-Band - SMK Tunas Rajawali Sorong |
| 362 | Vsat Ku-Band - SMK Yapis Teminabuan |
| 363 | Vsat Ku-Band - SMP GUPPi Salawati |
| 364 | Vsat Ku-Band - SMP Negeri 1 Haha |
| 365 | Vsat Ku-Band - SMP Negeri 1 Teminabuan |
| 366 | Vsat Ku-Band - SMP Negeri 1 Wayer |
| 367 | Vsat Ku-Band - SMP Negeri 5 Warmare |
| 368 | Vsat Ku-Band - SMP Negeri 6 Klamono |
| 369 | Vsat Ku-Band - SMP Negeri 9 Sorong |
| 370 | Vsat Ku-Band - SMP Negeri Seremuk |
| 371 | Vsat Ku-Band - SMP YPK Immanuel Werur |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.

Pembina Utama Madya

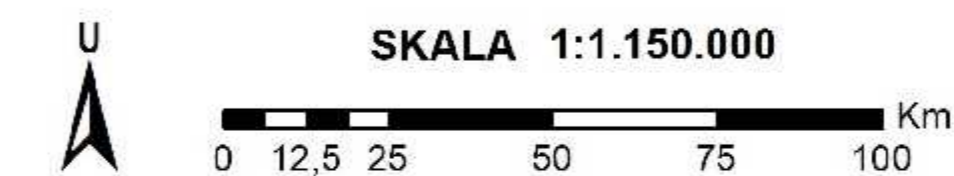
NIP. 19650818 199203 1 022



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------|
| Ibukota Provinsi | Batas Administrasi | Perairan |
| Ibukota Kabupaten/Kota | Batas Kabupaten/Kota | Sisa Pantai |
| | Batas Wilayah Desa/1 unit | Sisa Air |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Irigasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit SPOT 6/7 perekaman Tahun 2016 - 2019, bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
3. RTR Pulau Papua Tahun 2014
4. Peta Alokasi Ruang Perda no.13/2019 RZW/3-K Provinsi Papua Barat
5. Fencialahan data tahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 52S dan 53S

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 – 2041.

KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

| NO | KETERANGAN | SUMBER DATA |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Fash Manokwari | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 2 | Lanal Manokwari | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 3 | Rahlat Lantamal X | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 4 | Kodim-1706 | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 5 | Kodim-1713 | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 6 | Lantamal XIV | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 7 | Kodim-1703 | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 8 | Rahlat Lantamal X | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 9 | Rahlat Lantamal Raja Ampat | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 10 | Rahlat Lantamal X Fani | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 11 | Korem-171 | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 12 | Kodim-1704 | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 13 | Yonif-752 | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 14 | Denzipur-13 | PP No. 68 Tahun 2014 |
| 15 | Kodam XVIII/Kasuari | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 16 | Batalyon 761/KA | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 17 | Kodim 1801/Manokwari | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 18 | Koramil 1801-03/Warmare | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 19 | Koramil 1801-04/Wasior | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 20 | Koramil 1801-05/Anggi | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 21 | Koramil 1801-06/Masni | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 22 | Koramil 1801-07/Windesi | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 23 | Koramil 1801-08/Minyambouw | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 24 | Koramil 1801-09/Tanah Rubuh | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 25 | Koramil 1801-10/Amban | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 26 | Koramil 1801-12/Sururey | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 27 | Kodim 1809/Maybrat | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 28 | Koramil-01/Ayamaru | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 29 | Koramil -04/Aitinyo Barat | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 30 | Koramil-persiapan Kambufatem | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 31 | Koramil Persiapan Mare | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 32 | Koramil persiapan Ayamaru Utara | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 33 | Koramil persiapan Ayamaru Barat | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 34 | MAKOREM 182/JO | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 35 | Makodim 1803/Fakfak | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 36 | Koramil 1803-01/Kota | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 37 | Koramil 1803-02/Kks | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 38 | Koramil 1803-03/Faktim | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 39 | Koramil 1803-04/Karas | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 40 | Koramil 1803-05/Bby | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 41 | Koramil 1803-06/Tomage | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 42 | Koramil 1803-07/K'mongga | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 43 | Ramil Persiapan Wartutin | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 44 | Ramil Persiapan Faktim | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 45 | Ramil Pers. K'mongga | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 46 | Ramil Pers. Teluk Patipi | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 47 | Ramil Pers. Mbahamdara | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 48 | Kodim 1806/Teluk Bintuni | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 49 | Koramil 1806-01/Bintuni | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 50 | Koramil 1806-02/Babo | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 51 | Koramil 1806-03/Merdey | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 52 | Koramil 1806-04/Wamesa | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 53 | Koramil 1806-05/Tomu | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 54 | Koramil 1806-06/Meyado | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 55 | Koramil Persiapan Manimeri | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 56 | Koramil Persiapan Sumuri | Kementerian Pertahanan, 2021 |

| NO | KETERANGAN | SUMBER DATA |
|-----------|--|------------------------------|
| 57 | Koramil Persiapan Aroba | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 58 | Koramil Persiapan Kamundan | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 59 | Koramil Persiapan Dataran Beimes | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 60 | Kodim 1808/Mansel | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 61 | Koramil 1808-02/Oransbari | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 62 | Koramil 1808-03/Momiwaren | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 63 | Koramil 1808-04/Tahota | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 64 | Koramil 1808-05/Dataran Isim | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 65 | Koramil 1808-06/Neney | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 66 | Mako Lantamal XIV Sorong | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 67 | Mako Pasmar 3, Yonmarhanlan XIV | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 68 | Lokasi Armada III, Brigif 4 Pasmar 3 | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 69 | Posal Kaimana (Lanal Kaimana Perpang 46 th 2016) | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 70 | Posal Bintuni | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 71 | Posal Waisai | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 72 | Lanal Manokwari | Kementerian Pertahanan, 2021 |
| 73 | Koramil 1808-01/Ransiki | Kementerian Pertahanan, 2021 |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K. R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.

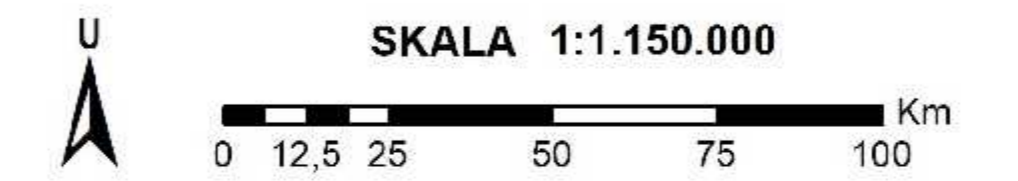
Pembina Utama Madya

NIP. 19650818 199203 1 022



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------|
| | Ibukota Pemerintahan | | Batas Administrasi | | Perairan |
| | Batas Kabupaten/Kota | | Batas Wilayah 1201 Laut | | Grid 1:40000 |

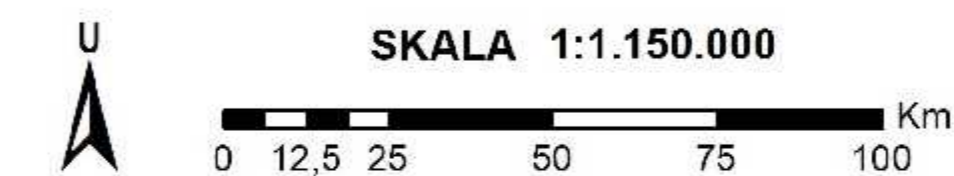
RENCANA POLA RUANG

| Kawasan Lindung | Kawasan Budidaya |
|-----------------|------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Provinsi
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Jaringan Jalan**
 - Jalan Tol
 - Jalan Kelas I
 - Jalan Kelas II
 - Jalan Kelas III
- Batas Administrasi**
 - - - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Wilayah Desa
- Perairan**
 - Laut
 - Danau
 - Sungai
- Penetapan Kawasan Strategis**
 - Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Pertumbuhan Ekonomi
 - Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit SPOT 6/7 perekaman Tahun 2015 - 2019, bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
- RTR Pulau Papua Tahun 2014
- Peta Alokasi Ruang Penda no.13/2019 RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
a. Hengolahan data tahun 2022.

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 52S dan 53S

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 – 2041.

Tabel KKPR Laut Untuk Kegiatan pada Kawasan Peruntukan Lindung

| No | Zona | Kode Zona | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--|
| | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin | | | | | | |
| | | | | | | | (BT) | (LS) | | | | | | | | | |
| 1 | Kawasan Konservasi (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) | KKP3K-01 | | Kabupaten Tambrauw | KKP3K Jeen Womom | | | | 1. perlindungan habitat dan populasi ikan; 2. penangkapan ikan skala kecil dan ramah lingkungan; 3. pariwisata dan rekreasi ramah lingkungan; 4. penelitian, pendidikan dan pengembangan; 5. pengamanan, penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan fungsi potensi kawasan konservasi perairan (patroli pengawasan kawasan konservasi); 6. pengelolaan jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya; 7. alur migrasi biota perairan; 8. pemulihan; dan 9. pemasangan tanda batas kawasan konservasi. | 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; 2. penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dengan menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem wilayah pesisir; 3. semua jenis kegiatan pertambangan (termasuk operasi seismic); 4. melakukan konversi dan menebang vegetasi pantai untuk kegiatan industri dan pemukiman dan/atau kegiatan lain dengan cara yang merusak; 5. melakukan kegiatan menambang/mengambil terumbu karang; 6. pembuangan sampah dan limbah; 7. menangkap biota yang dilindungi; 8. menangkap ikan hias; dan 9. melakukan penebangan mangrove. | 1. budidaya ramah lingkungan; 2. Penelitian dan pendidikan; 3. pemantauan dan evaluasi; 4. pariwisata dan rekreasi; dan 5. pembangunan infrastuktur terbatas yang sesuai dengan peruntukkan, dengan tidak mengubah dan merusak keutuhan ekosistem. | | | | | | |
| | | | | | Zona Inti | 623.69 | 132 33' 51.558" BT | 0 21' 20.177" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 963.31 | 132 28' 2.920" BT | 0 20' 57.125" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 505.52 | 132 49' 39.329" BT | 0 25' 34.809" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.81 | 132 35' 0.566" BT | 0 21' 44.001" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 24.96 | 132 34' 4.305" BT | 0 21' 40.831" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19.22 | 132 34' 4.305" BT | 0 21' 40.831" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.31 | 132 32' 57.442" BT | 0 21' 26.430" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.31 | 132 32' 13.331" BT | 0 21' 19.966" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | Zona Lainnya | 20.65 | 132 43' 16.024" BT | 0 22' 9.139" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 61.67 | 132 40' 9.038" BT | 0 22' 3.535" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | Zona Pemanfaatan Terbatas | 6.25 | 132 51' 4.039" BT | 0 26' 24.749" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.25 | 132 35' 17.882" BT | 0 21' 43.983" LS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.16 | 132 33' 25.461" BT | 0 21' 32.816" LS | | | | | | | | | |
| | 29,547.53 | 132 40' 8.311" BT | 0 22' 20.122" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | KKP3K-02 | | Kabupaten Fakfak | Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Berau | 100,470.47 | 132 27' 39.581" BT | 2 35' 26.441" LS | 1. perlindungan habitat dan populasi ikan; 2. penangkapan ikan skala kecil dan ramah lingkungan; 3. pariwisata dan rekreasi ramah lingkungan; 4. penelitian, pendidikan dan pengembangan; 5. pengamanan, penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan fungsi potensi kawasan konservasi perairan (patroli pengawasan kawasan konservasi); 6. pengelolaan jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya; 7. alur migrasi biota perairan; 8. pemulihan; dan 9. pemasangan tanda batas kawasan konservasi. | 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; 2. penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dengan menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem wilayah pesisir; 3. semua jenis kegiatan pertambangan (termasuk operasi seismic); 4. melakukan konversi dan menebang vegetasi pantai untuk kegiatan industri dan pemukiman dan/atau kegiatan lain dengan cara yang merusak; 5. melakukan kegiatan menambang/mengambil terumbu karang; 6. pembuangan sampah dan limbah; 7. menangkap biota yang dilindungi; 8. menangkap ikan hias; dan 9. melakukan penebangan mangrove. | 1. budidaya ramah lingkungan; 2. Penelitian dan pendidikan; 3. pemantauan dan evaluasi; 4. pariwisata dan rekreasi; dan 5. pembangunan infrastuktur terbatas yang sesuai dengan peruntukkan, dengan tidak mengubah dan merusak keutuhan ekosistem. | | | | | | |
| 3 | | KKP3K-03 | | Kabupaten Fakfak | KKP3K Teluk Nusalasi Van Den Bosch | 248552.41 | 132 40' 52.525" BT | 3 37' 43.817" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZI--01 | | Kabupaten Raja Ampat | Perairan Kepulauan Asia dan Ayau | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZI-01 | | | Zona Inti | 1,003.83 | 131 6' 41.507" BT | 0 22' 20.927" LU | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,295.11 | 131 5' 28.029" BT | 0 28' 12.677" LU | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,710.79 | 130 59' 12.548" BT | 0 20' 58.938" LU | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-02 | | | Zona Pemanfaatan | 530.97 | 131 5' 6.775" BT | 0 23' 15.742" LU | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-03 | | | | 2,427.94 | 131 1' 35.277" BT | 0 25' 11.524" LU | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-04 | | | | 1,006.28 | 130 56' 16.023" BT | 0 26' 26.592" LU | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-05 | | | | 4,399.73 | 131 6' 24.990" BT | 0 37' 24.305" LU | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZPB-01 | | | Zona Perikanan Berkelanjutan | 20,791.07 | 131 9' 0.075" BT | 0 30' 25.226" LU | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZPB-02 | | | | 59,527.78 | 131 14' 28.471" BT | 1 2' 27.592" LU | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZPB-03 | | | | 5,315.50 | 131 14' 28.471" BT | 1 2' 27.592" LU | | | | | | | | | |
| 4 | Kawasan konservasi Perairan | KKP-02 | | | Kabupaten Raja Ampat | Teluk Mayalibit | | | | | | | 1. perlindungan habitat dan populasi ikan; 2. penangkapan ikan skala kecil dan ramah lingkungan; 3. pariwisata dan rekreasi ramah lingkungan; 4. penelitian, pendidikan dan pengembangan; 5. pengamanan, penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan fungsi potensi kawasan konservasi perairan (patroli pengawasan kawasan konservasi); 6. pengelolaan jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya; 7. alur migrasi biota perairan; 8. pemulihan; dan 9. pemasangan tanda batas kawasan konservasi. | 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; 2. penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dengan menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem wilayah pesisir; 3. semua jenis kegiatan pertambangan (termasuk operasi seismic); 4. melakukan konversi dan menebang vegetasi pantai untuk kegiatan industri dan pemukiman dan/atau kegiatan lain dengan cara yang merusak; 5. melakukan kegiatan menambang/mengambil terumbu karang; 6. pembuangan sampah dan limbah; 7. menangkap biota yang dilindungi; 8. menangkap ikan hias; dan 9. melakukan penebangan mangrove. | 1. budidaya ramah lingkungan; 2. Penelitian dan pendidikan; 3. pemantauan dan evaluasi; 4. pariwisata dan rekreasi; dan 5. pembangunan infrastuktur terbatas yang sesuai dengan peruntukkan, dengan tidak mengubah dan merusak keutuhan ekosistem. | | |
| | | KKP-ZI-02 | | | | Zona Inti | 556.23 | 130 37' 31.110" BT | 0 5' 37.762" LS | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-06 | | | | Zona Pemanfaatan | 1,496.22 | 131 2' 32.379" BT | 0 24' 5.784" LS | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-07 | | | | 1,945.26 | 130 56' 15.146" BT | 0 24' 43.983" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-08 | | | | 126 | 130 58' 20.521" BT | 0 21' 10.643" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-09 | | | | 44.79 | 131 3' 35.229" BT | 0 20' 29.573" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-10 | | | | 793.85 | 130 56' 12.821" BT | 0 21' 24.491" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-11 | | | | 3,169.65 | 130 51' 24.531" BT | 0 15' 47.528" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-12 | | | | 634.44 | 130 46' 50.199" BT | 0 10' 23.210" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-13 | | | | 5,596.19 | 130 44' 16.362" BT | 0 12' 37.373" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-14 | | | | 146.31 | 130 43' 46.405" BT | 0 8' 23.930" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-15 | | | | 226.25 | 130 39' 26.510" BT | 0 6' 44.988" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-16 | | | | 48.63 | 130 42' 34.706" BT | 0 5' 59.578" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZPB-04 | | Zona Perikanan Berkelanjutan | | 1,222.48 | 130 46' 26.134" BT | 0 17' 32.678" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZPB-05 | | | | 15,755.10 | 130 59' 50.021" BT | 0 22' 52.346" LS | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZPB-06 | | | | 18,025.41 | 130 45' 41.923" BT | 0 12' 5.48211 LS | | | | | | | | | |
| | | 5 | | KKP-03 | | | Kabupaten Raja Ampat | Selat Dampler | | | | 1. perlindungan habitat dan populasi ikan; 2. penangkapan ikan skala kecil dan ramah lingkungan; 3. pariwisata dan rekreasi ramah lingkungan; 4. penelitian, pendidikan dan pengembangan; 5. pengamanan, penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan fungsi potensi kawasan konservasi perairan (patroli pengawasan kawasan konservasi); 6. pengelolaan jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya; 7. alur migrasi biota perairan; 8. pemulihan; dan 9. pemasangan tanda batas kawasan konservasi. | | | | 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; 2. penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dengan menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem wilayah pesisir; 3. semua jenis kegiatan pertambangan (termasuk operasi seismic); 4. melakukan konversi dan menebang vegetasi pantai untuk kegiatan industri dan pemukiman dan/atau kegiatan lain dengan cara yang merusak; 5. melakukan kegiatan menambang/mengambil terumbu karang; 6. pembuangan sampah dan limbah; 7. menangkap biota yang dilindungi; 8. menangkap ikan hias; dan 9. melakukan penebangan mangrove. | 1. budidaya ramah lingkungan; 2. Penelitian dan pendidikan; 3. pemantauan dan evaluasi; 4. pariwisata dan rekreasi; dan 5. pembangunan infrastuktur terbatas yang sesuai dengan peruntukkan, dengan tidak mengubah dan merusak keutuhan ekosistem. |
| | | | | KKP-ZI-03 | | | | Zona Inti | 4,112.47 | 130 24' 41.929" BT | 0 52' 55.733" LS | | | | | | |
| KKP-ZL-02 | | | | Zona Lainnya | 10,945.67 | 130 52' 3.957" BT | | 0 53' 14.635" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZL-03 | | | | | 2,359.90 | 130 37' 23.055" BT | | 0 34' 30.756" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-17 | | | | Zona Pemanfaatan | 86.43 | 131 5' 13.378" BT | | 1 4' 52.774" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-18 | | | | | 193.96 | 131 7' 8.272" BT | | 1 3' 50.865" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-19 | | | | | 50.85 | 131 8' 12.892" BT | | 1 3' 14.331" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-20 | | | | | 30.76 | 131 5' 9.785" BT | | 1 2' 10.404" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-21 | | | | | 60.44 | 131 8' 19.693" BT | | 0 59' 26.404" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-22 | | | | | 283.51 | 131 8' 22.744" BT | | 0 57' 36.349" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-23 | | | | | 83.47 | 131 6' 32.774" BT | | 0 55' 39.818" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-24 | | | | | 105.82 | 131 4' 24.432" BT | | 0 55' 3.104" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-25 | | | | | 446.95 | 130 50' 57.063" BT | | 0 53' 46.549" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-26 | | | | | 6,645.41 | 130 58' 17.463" BT | | 0 54' 26.323" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-27 | | | | | 21.53 | 130 29' 18.659" BT | | 0 49' 41.412" LS | | | | | | | | | |

| No | Zona | Kode Zona | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|------|------------|----------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin |
| | | | | | | | (BT) | (LS) | | | |
| | | KKP-ZP-28 | | | | 20.07 | 130 40' 5.906" BT | 0 49' 5.271" LS | | | |
| | | KKP-ZP-29 | | | | 72.06 | 130 46' 2.872" BT | 0 48' 56.577" LS | | | |
| | | KKP-ZP-30 | | | | 63.2 | 130 42' 9.124" BT | 0 48' 16.591" LS | | | |
| | | KKP-ZP-31 | | | | 159.73 | 130 48' 57.201" BT | 0 48' 45.128" LS | | | |
| | | KKP-ZP-32 | | | | 2,674.85 | 130 28' 14.031" BT | 0 48' 54.164" LS | | | |
| | | KKP-ZP-33 | | | | 306.63 | 130 44' 47.936" BT | 0 46' 18.778" LS | | | |
| | | KKP-ZP-34 | | | | 3,248.59 | 130 51' 56.545" BT | 0 46' 11.238" LS | | | |
| | | KKP-ZP-35 | | | | 36.08 | 130 36' 18.972" BT | 0 35' 26.493" LS | | | |
| | | KKP-ZP-36 | | | | 68.82 | 130 32' 17.614" BT | 0 34' 44.739" LS | | | |
| | | KKP-ZP-37 | | | | 31,50 | 130 35' 26.911" BT | 0 34' 34.111" LS | | | |
| | | KKP-ZP-38 | | | | 289.98 | 130 35' 26.911" BT | 0 34' 34.111" LS | | | |
| | | KKP-ZP-39 | | | | 17.75 | 130 34' 9.757" BT | 0 33' 15.116" LS | | | |
| | | KKP-ZP-40 | | | | 34.13 | 130 29' 50.950" BT | 0 32' 52.969" LS | | | |
| | | KKP-ZP-41 | | | | 12.38 | 130 37' 0.589" BT | 0 31' 33.146" LS | | | |
| | | KKP-ZP-42 | | | | 26.97 | 130 33' 39.683" BT | 0 31' 13.482" LS | | | |
| | | KKP-ZP-43 | | | | 2,529.07 | 130 42' 9.775" BT | 0 32' 52.977" LS | | | |
| | | KKP-ZP-44 | | | | 887.54 | 130 39' 59.515" BT | 0 30' 1.192" LS | | | |
| | | KKP-ZP-45 | | | | 1,282.01 | 130 33' 5.168" BT | 0 29' 30.368" LS | | | |
| | | KKP-ZP-46 | | | | 69.65 | 130 41' 43.611" BT | 0 27' 0.067" LS | | | |
| | | KKP-ZP-47 | | | | 31,22 | 130 44' 41.738" BT | 0 26' 32.109" LS | | | |
| | | KKP-ZP-48 | | | | 2.99 | 130 26' 59.001" BT | 0 26' 24.219" LS | | | |
| | | KKP-ZP-49 | | | | 310.63 | 130 46' 34.484" BT | 0 26' 26.042" LS | | | |
| | | KKP-ZP-50 | | | | 29,672.31 | 130 21' 18.705" BT | 0 30' 45.922" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-07 | | | Zona perikanan | 16, 163.42 | 130 57' 24.111" BT | 54' 40.265" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-08 | | | Berkelanjutan | 470.31 | 130 30' 6.441" BT | 0 48' 51.497" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-09 | | | | 137,197.15 | 130 44' 39.720" BT | 0 42' 25.481" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-10 | | | | 28,900.43 | 130 36' 45.549" BT | 0 31' 45.837" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-11 | | | | 18,559.59 | 131 7' 43.228" BT | 1 0' 58.818" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-12 | | | | 36,385.83 | 130 38' 29.554" BT | 1 3' 3.901" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-13 | | | | 310.85 | 130 52' 58.174" BT | 0 53' 28.138" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-14 | | | | 3,030.56 | 130 46' 17.222" BT | 0 52' 8.823" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-15 | | | | 922.37 | 130 31' 12.276" BT | 0 49' 35.401" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-16 | | | | 458.16 | 130 34' 37.917" BT | 0 47' 55.911" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-17 | | | | 128.75 | 130 36' 28.324" BT | 0 46' 58.991" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-18 | | | | 272.27 | 130 40' 29.008" BT | 0 46' 32.847" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-19 | | | | 367.53 | 131 0' 58.688" BT | 0 46' 30.737" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-20 | | | | 346.75 | 130 58' 51.567" BT | 0 45' 53.082" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-21 | | | | 7,037.62 | 130 43' 12.625" BT | 0 47' 26.388" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-21 | | | | | 130 43' 12.625" BT | 0 47' 26.388" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-22 | | | | 82.24 | 130 54' 31.612" BT | 0 43' 52.467" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-23 | | | | 129.93 | 130 55' 22.862" BT | 0 43' 46.044" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-24 | | | | 195.03 | 130 51' 56.240" BT | 0 42' 57.236" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-25 | | | | 17,850.45 | 130 43' 36.006" BT | 0 41' 34.732" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-26 | | | | 2,080.82 | 130 36' 4.846" BT | 0 38' 33.475" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-27 | | | | 136.52 | 130 29' 49.729" BT | 0 32' 52.815" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-28 | | | | 290.77 | 130 31' 8.662" BT | 0 31' 20.254" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-29 | | | | 194.6 | 130 43' 30.585" BT | 0 29' 51.772" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-30 | | | | 1,037.73 | 130 21' 27.200" BT | 0 29' 18.089" LS | | | |
| | | | | | | | 130 21' 27.200" BT | 0 29' 18.089" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-31 | | | | 9,730.26 | 130 34' 56.550" BT | 0 32' 48.196" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-32 | | | | 279.62 | 130 47' 0.648" BT | 0 28' 6.666" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-33 | | | | 1,426.52 | 130 28' 39.900" BT | 0 29' 40.940" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-34 | | | | 47.22 | 130 18' 58.045" BT | 0 27' 18.620" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-35 | | | | 1,016.81 | 130 41' 10.713" BT | 0 27' 16.984" LS | | | |
| | | KKP-ZPB-36 | | | | 1,115.10 | 130 43' 7.532" BT | 0 25' 20.438" LS | | | |
| 6 | | KKP-04 | | Kabupaten Raja Ampat | Perairan Kepulauan Misool | | | | | | |
| | | KKP-ZI-04 | | | Zona Inti | 756.33 | 1 55' 10.555" LS | 130 37' 14.104" BT | | | |
| | | KKP-ZP-51 | | | Zona Pemanfaatan | 250.93 | 2 13' 57.903" LS | 130 16' 3.624" BT | | | |
| | | KKP-ZP-52 | | | | 11.11 | 2 13' 41.349" LS | 130 16' 50.484" BT | | | |
| | | KKP-ZP-53 | | | | 317.23 | 2 12' 22.260" LS | 130 16' 35.568" BT | | | |
| | | KKP-ZP-54 | | | | 166.92 | 2 11' 44.313" LS | 130 12' 59.521" BT | | | |
| | | KKP-ZP-55 | | | | 693.25 | 130 28' 19.730" BT | 2 9' 16.384" LS | | | |
| | | KKP-ZP-56 | | | | 35177.37 | 130 34' 21.008" BT | 2 11' 57.721" LS | | | |
| | | KKP-ZP-57 | | | | 1713.89 | 130 20' 29.129" BT | 2 7' 43.678" LS | | | |

| No | Zona | Kode Zona | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | | |
|------------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin | |
| | | | | | | | (BT) | (LS) | | | | |
| | | KKP-ZP-58 | | | | 2569.17 | 130 32' 48.096" BT | 2 6' 35.707" LS | | | | |
| | | KKP-ZP-59 | | | | 574.57 | 130 46' 12.146" BT | 2 2' 7.809" LS | | | | |
| | | KKP-ZP-60 | | | | 378.62 | 130 25' 37.317" BT | 2 1' 25.625" LS | | | | |
| | | KKP-ZP-61 | | | | 34689.74 | 130 53' 2.869" BT | 2 7' 40.172" LS | | | | |
| | | KKP-ZP-62 | | | | 2096.97 | 130 47' 28.013" BT | 1 58' 19.068" LS | | | | |
| | | KKP-ZP-63 | | | | 2546.06 | 130 7' 19.315" BT | 2 7' 57.551" LS | | | | |
| | | KKP-ZPB-37 | | | | Zona Perikanan Berkelanjutan | 22.36 | 130 34' 34.227" BT | | | | 2 15' 15.971" LS |
| | | KKP-ZPB-38 | | | | | 5.21 | 130 30' 49.497" BT | | | | 2 14' 13.559" LS |
| | | KKP-ZPB-39 | | | | | 7.47 | 130 31' 52.014" BT | | | | 2 13' 59.943" LS |
| | | KKP-ZPB-40 | | | | | 1.53 | 130 29' 49.387" BT | | | | 2 13' 34.432" LS |
| | | KKP-ZPB-41 | | | | | 6.13 | 130 29' 38.192" BT | | | | 2 13' 28.824" LS |
| | | KKP-ZPB-42 | | | | | 0.36 | 130 29' 58.287" BT | | | | 2 13' 24.972" LS |
| | | KKP-ZPB-43 | | | | | 0.68 | 130 29' 31.534" BT | | | | 2 13' 21.195" LS |
| | | KKP-ZPB-44 | | | | | 40.15 | 130 29' 3.893" BT | | | | 2 13' 26.414" LS |
| | | KKP-ZPB-45 | | | | | 1.59 | 130 28' 39.327" BT | | | | 2 13' 12.857" LS |
| | | KKP-ZPB-46 | | | | | 128.69 | 130 31' 31.040" BT | | | | 2 13' 33.560" LS |
| | | KKP-ZPB-47 | | | | | 9.62 | 130 36' 8.662" BT | | | | 2 11' 27.479" LS |
| | | KKP-ZPB-48 | | | | | 20.71 | 130 36' 52.934" BT | | | | 2 10' 30.751" LS |
| | | KKP-ZPB-49 | | | | | 67.5 | 130 36' 0.848" BT | | | | 2 10' 32.878" LS |
| | | KKP-ZPB-50 | | | | | 13.39 | 130 56' 20.423" BT | | | | 2 10' 9.235" LS |
| | | KKP-ZPB-51 | | | | | 21.07 | 130 55' 38.671" BT | | | | 2 10' 8.951" LS |
| | | KKP-ZPB-52 | | | | | 177.13 | 130 54' 46.281" BT | | | | 2 9' 14.910" LS |
| | | KKP-ZPB-53 | | | | | 1.95 | 130 55' 52.836" BT | | | | 2 8' 32.790" LS |
| | | KKP-ZPB-54 | | | | | 0.7 | 130 55' 3.788" BT | | | | 2 8' 13.399" LS |
| | | KKP-ZPB-55 | | | | | 13.23 | 130 55' 19.600" BT | | | | 2 8' 18.610" LS |
| | | KKP-ZPB-56 | | | | | 2.37 | 130 54' 32.597" BT | | | | 2 8' 9.112" LS |
| | | KKP-ZPB-57 | | | | | 1.69 | 130 54' 29.921" BT | | | | 2 8' 2.679" LS |
| | | KKP-ZPB-58 | | | | | 1.42 | 130 56' 2.562" BT | | | | 2 7' 49.750" LS |
| | | KKP-ZPB-59 | | | | | 7.34 | 130 54' 28.708" BT | | | | 2 7' 46.461" LS |
| | | KKP-ZPB-60 | | | | | 5.45 | 130 55' 52.967" BT | | | | 2 7' 38.189" LS |
| | | KKP-ZPB-61 | | | | | 2.81 | 130 55' 34.252" BT | | | | 2 7' 30.411" LS |
| | | KKP-ZPB-62 | | | | | 1.53 | 130 26' 9.411" BT | | | | 2 7' 22.504" LS |
| | | KKP-ZPB-63 | | | | | 7.74 | 130 52' 37.897" BT | | | | 2 7' 18.183" LS |
| | | KKP-ZPB-64 | | | | | 57.94 | 130 21' 46.170" BT | | | | 1 57' 1.388" LS |
| | | KKP-ZPB-65 | | | | 259084.88 | 130 31' 30.221" BT | 2 4' 14.815" LS | | | | |
| KKP-ZPB-66 | 667.73 | 130 26' 53.700" BT | 2 6' 55.911" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZPB-67 | 112.99 | 130 25' 15.626" BT | 2 6' 23.450" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZPB-68 | 666.49 | 130 23' 4.211" BT | 2 6' 41.640" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZPB-69 | 893.62 | 130 27' 6.321" BT | 2 3' 10.317" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZPB-70 | 172.68 | 130 27' 29.090" BT | 1 59' 53.684" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZPB-71 | 55.68 | 130 24' 43.711" BT | 1 59' 39.911" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZPB-72 | 164.5 | 130 25' 57.652" BT | 1 59' 45.383" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZPB-73 | 207.11 | 130 27' 1.555" BT | 1 59' 14.727" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZPB-74 | 83.51 | 130 24' 9.471" BT | 1 59' 7.106" LS | | | | | | | | | |
| KKP-ZPB-75 | 3839.62 | 130 24' 27.989" BT | 1 56' 6.770" LS | | | | | | | | | |
| 7 | | KKP-05 | Kabupaten Raja Ampat | Perairan Kepulauan Kofiau-Boo | Zona Pemanfaatan | | | | | | | |
| | KKP-ZP-64 | 1,451.98 | | | | 129 26' 45.227" BT | 1 18' 10.144" LS | | | | | |
| | KKP-ZP-65 | 2,605.62 | | | | 129 57' 47.690" BT | 1 12' 29.878" LS | | | | | |
| | KKP-ZP-66 | 3.43 | | | | 129 23' 42.595" BT | 1 10' 9.078" LS | | | | | |
| | KKP-ZP-67 | 7,215.71 | | | | 129 19' 45.316" BT | 1 9' 2.861" LS | | | | | |
| | KKP-ZP-68 | 857.88 | | | | 129 41' 22.625" BT | 1 15' 50.233" LS | | | | | |
| | KKP-ZPB-76 | Zona Perikanan Berkelanjutan | 125,453.22 | 129 36' 15.059" BT | 1 15' 2.872" LS | | | | | | | |
| 8 | | | KKP-06 | Kabupaten Raja Ampat | Perairan Kepulauan Faam | Zona Pemanfaatan | | | | | | |
| | KKP-ZI-05 | 21,061.04 | 129 41' 34.963" BT | | | | 0 49' 59.030" LS | | | | | |
| | KKP-ZL-04 | 172.04 | 130 25' 11.702" BT | | | | 0 37' 52.818" LS | | | | | |
| | KKP-ZP-69 | 43.57 | 130 18' 16.037" BT | | | | 0 42' 31.721" LS | | | | | |
| | KKP-ZP-70 | 74.20 | 130 16' 38.159" BT | | | | 0 40' 52.746" LS | | | | | |
| | KKP-ZP-71 | 12.58 | 130 18' 33.810" BT | | | | 0 38' 35.097" LS | | | | | |
| | KKP-ZP-72 | 74,358.17 | 129 47' 39.663" BT | | | | 0 45' 39.376" LS | | | | | |
| | KKP-ZP-73 | 5,092.46 | 130 16' 39.342" BT | | | | 0 33' 35.130" LS | | | | | |
| | KKP-ZPB-77 | Zona Perikanan Berkelanjutan | 1.63 | | | | 130 17' 4.040" BT | 0 35' 39.160" LS | | | | |
| | KKP-ZPB-78 | | 4.72 | | | | 130 16' 48.934" BT | 0 35' 32.042" LS | | | | |
| | KKP-ZPB-79 | | 258,575.30 | | | | 130 7' 21.441" BT | 0 40' 50.420" LS | | | | |
| 9 | | KKP-07 | Kabupaten Raja Ampat | | | | SAP Kepulauan Raja Ampat | Zona Inti | 89.78 | | | |
| | KKP-ZI-06 | 352.66 | | 130 18' 50.388" BT | 0 15' 30.233" LS | | | | | | | |

| No | Zona | Kode Zona | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|---|---|------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (BT) | (LS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZI-06 | | | | 730.14 | 130 25' 23.861" BT | 0 16' 23.284" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZI-06 | | | | 647.72 | 130 25' 11.333" BT | 0 22' 48.494" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZI-06 | | | | 868.74 | 130 21' 42.309" BT | 0 17' 27.161" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZI-06 | | | | 51.59 | 130 22' 10.057" BT | 0 15' 57.230" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-74 | | | | 31.66 | 130 21' 43.297" BT | 0 18' 6.715" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-75 | | | | 117.69 | 130 16' 5.395" BT | 0 24' 25.260" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-76 | | | | 691.67 | 130 21' 31.065" BT | 0 22' 13.150" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-77 | | | | 3,434.77 | 130 14' 8.597" BT | 0 21' 27.562" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-78 | | | | 3,290.29 | 130 29' 58.692" BT | 0 19' 19.120" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-79 | | | | 2,718.22 | 130 18' 23.504" BT | 0 24' 25.621" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZP-80 | | | | 1,744.02 | 130 23' 47.857" BT | 0 19' 37.337" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZPB-80 | | | | 40,045.39 | 130 21' 23.697" BT | 0 21' 4.822" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KKP-ZPB-81 | | | | 3,427.17 | 130 18' 8.336" BT | 0 22' 16.326" LS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | KKP-08 | Kabupaten Raja Ampat | | | | SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat | | | | | | | | | | |
| KKP-S-08 | Zona Sasi | | 1,048.82 | 129 52' 31.806" BT | 0 16' 56.727" LU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKP-S-08 | | | 156.29 | 130 7' 55.090" BT | 0 8' 8.372" LU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKP-S-08 | | | 158.83 | 130 13' 18.318" BT | 0 5' 55.195" LU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKP-S-08 | | | 174.83 | 130 15' 28.452" BT | 0 6' 4.156" LU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKP-S-08 | | | 664.94 | 130 1' 3.935" BT | 0 9' 55.458" LU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKP-S-08 | | | | 130 1' 3.935" BT | 0 9' 55.458" LU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKP-ZI-07 | Zona Inti | | 5,969.11 | 129 53' 30.445" BT | 0 18' 45.340" LU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-82 | Zona Pemanfaatan | | 24.85 | 130 14' 51.615" BT | 0 19' 26.542" LS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKP-ZP-83 | | | 260,845.25 | 130 2' 58.000" BT | 0 17' 46.589" LU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | KKP-09 | Kabupaten Kaimana | Kawasan Konservasi Perairan KKPD Kaimana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 70,232.17 | 134 41' 18.742" BT | 4 6' 19.924" LS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 123,179.10 | 134 1' 51.267" BT | 3 52' 9.292" LS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 20,402.88 | 133 47' 3.641" BT | 3 2' 44.584" LS | | | | | | | | |
| 12 | | KKP-10 | Kabupaten Teluk Bintuni | Kawasan Konservasi Perairan Teluk Bintuni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 67,515.77 | 133 46' 46.771" BT | 2 17' 2.472" LS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 | | KKP-11 | Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan | Kawasan Konservasi Perairan KKPD Seribu Satu Sungai Teo Enebikia | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | KKP-12 | Kabupaten Raja Ampat | Kawasan Konservasi Perairan Misool Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | KKP-13 | Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong | Kawasan Konservasi Perairan KKPD Makbon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Kawasan Konservasi Maritim | KKM-01 | Kabupaten Tambrauw | Kawasan konservasi maritim peninggalan perang dunia 2 (kapal dan pesawat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | KKM-02 | Kabupaten Tambrauw | Kawasan konservasi maritim Cargo Okinoyama Maru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | KKM-03 | Kabupaten Manokwari | Kawasan konservasi maritim Cross Wreck Mansinam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Kawasan Lindung Lainnya | CAL-01 | Kabupaten Raja Ampat | CAL Kofiau Boo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | SML-01 | Kabupaten Fakfak | Suaka Margasatwa Laut Sabuda Tutturuga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | TN-01 | Kabupaten Teluk Wondama | Taman Nasional Teluk Cendrawasih | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel KKPR Laut Untuk Kegiatan pada Kawasan Peruntukan Budi Daya

| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|--------------------|--|--------------|---|----------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin |
| 1 | Kawasan Pariwisata | kegiatan wisata alam pantai/ pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut dan wisata olahraga air | KPU-W-BL-03 | Samudera Pasifik | Kabupaten Manokwari | Wisata Alam Bawah Laut Manokwari Barat | 108,83 | 0 53' 18.690" LS | 134 5' 57.584" BT | penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan | 1. semua jenis kegiatan perikanan budidaya; 2. penangkapan ikan dengan alat menetap; 3. pembuangan sampah dan limbah; dan 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap atau yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 1. penelitian dan pendidikan; dan 2. pemantauan dan evaluasi. |
| | | | KPU-W-BL-09 | | | Wisata Alam Bawah Laut Manokwari Barat | 317,61 | 0 54' 51.292" LS | 134 6' 49.831" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-10 | | | Wisata Alam Bawah Laut Manokwari Barat | 226,55 | 0 53' 15.534" LS | 134 4' 43.223" BT | | | |
| | | | KPU-W-OR-03 | | | Wisata Olahraga Air Manokwari Barat | 40,26 | 0 52' 14.584" LS | 134 3' 16.966" BT | | | |
| | | | KPU-W-OR-04 | | | Wisata Olahraga Air Sidey | 837,98 | 0 44' 24.311" LS | 133 31' 47.880" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-41 | | | Wisata Pantai Manokwari Barat | 260,73 | 0 52' 33.475" LS | 134 4' 56.376" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-42 | | | Wisata Pantai Manokwari Barat | 1.129,45 | 0 51' 6.932" LS | 134 6' 53.889" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-43 | | | Wisata Pantai Manokwari Barat | 5.164,18 | 0 45' 3.923" LS | 133 50' 53.608" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-01 | | | Samudera Pasifik | Kabupaten Manokwari Selatan | Wisata Pantai Momi Waren | 1.144,85 | | | |
| | | | KPU-W-P3K-10 | Wisata Pantai Momi Waren | 307,69 | | | 1 36' 21.192" LS | 134 8' 49.629" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-11 | Wisata Pantai Ransiki | 31,22 | | | 1 33 8.072" LS | 134 11' 59.957" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-12 | Wisata Pantai Ransiki | 302,31 | | | 1 32 11.643" LS | 134 12' 27.605" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-13 | Wisata Pantai Oransbari | 384,22 | | | 1 22 2.244" LS | 134 14' 39.821" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-01 | • Samudera Pasifik • Laut Halmaheera | Kabupaten Raja Ampat | Wisata alam bawah laut Waigeo Timur | 253,94 | 0 22 2.666" LS | 131 10' 49.313" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-02 | | | Wisata alam bawah laut Misool Selatan | 302,61 | 2 22 26.203" LS | 130 46' 37.70" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-04 | | | Wisata alam bawah laut Waigeo Timur | 473,36 | 0 23 59.848" LS | 131 12' 20.400" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-05 | | | Wisata alam bawah laut Meos Mansar | 6,15 | 0 26 6.852" LS | 130 33' 17.128" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-06 | | | Wisata alam bawah laut Selat Sagawin | 181,84 | 0 54 52.297" LS | 130 34' 24.964" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-07 | | | Wisata alam bawah laut Selat Sagawin | 301,77 | 0 54 50.544" LS | 130 25 50.804" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-08 | | | Wisata alam bawah laut Selat Sagawin | 117,65 | 0 54 35.865" LS | 130 32' 58.831" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-11 | | | Wisata alam bawah laut Selat Sagawin | 546,61 | 0 54 37.546" LS | 130 28' 57.590" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-12 | | | Wisata alam bawah laut Kota Waisei | 135,09 | 0 27 47.874" LS | 130 51' 28.170" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-13 | | | Wisata alam bawah laut Waigeo Barat Daratan | 735,87 | 0 11 22.910" LS | 130 15' 17.541" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-14 | | | Wisata alam bawah laut Waigeo Barat Daratan | 400,97 | 0 8 13.126" LS | 130 7' 24.957" BT | | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|--------------------|----------|--------------|----------|----------------|---|-----------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin |
| | | | KPU-W-BL-15 | | | Wisata alam bawah laut Waigeo Barat Daratan | 392,01 | 0 6' 32.573" LS | 130 12' 3.477" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-16 | | | Wisata alam bawah laut Waigeo Barat Daratan | 401,27 | 0 54' 37.546" LS | 130 28' 57.590" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-17 | | | Wisata alam bawah laut Waigeo Barat | 5,83 | 0 4' 32.769" LS | 130 10' 27.770" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-18 | | | Wisata alam bawah laut Waigeo Barat | 506,92 | 0 0' 5.388" LS | 130 9' 53.528" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-19 | | | Wisata alam bawah laut Waigeo Barat | 577,57 | 0 1' 30.040" LS | 130 8' 32.000" BT | | | |
| | | | KPU-W-BL-20 | | | Wisata alam bawah laut Meos Mansar | 156,33 | 0 25' 16.638" LS | 130 33' 58.763" BT | | | |
| | | | KPU-W-OR-05 | | | Wisata Olah Raga Air Waigeo Barat Daratan | 405,81 | 0 11' 54.327" LS | 130 17' 17.391" BT | | | |
| | | | KPU-W-OR-06 | | | Wisata Olah Raga Air Waigeo Selatan | 1.435,87 | 0 20' 5.086" LS | 130 37' 14.024" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-03 | | | Wisata Pantai Supnin | 1.853,88 | 0 2' 47.214" LS | 130 36' 51.904" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-18 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 243,51 | 0 10' 35.727" LS | 130 13' 11.637" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-19 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 6,02 | 0 11' 36.951" LS | 130 15' 2.235" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-20 | | | Wisata Pantai Waigeo Selatan | 447,98 | 0 18' 46.661" LS | 130 40' 11.424" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-21 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 574,29 | 0 0' 4.778" LS | 130 7' 36.887" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-22 | | | Wisata Pantai Waigeo Utara | 1.310,70 | 0 3' 23.185" LS | 131 4' 17.335" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-23 | | | Wisata Pantai Kota Waisei | 18,53 | 0 25' 2.252" LS | 130 51' 39.743" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-24 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 1.264,33 | 0 4' 5.821" LS | 130 21' 52.033" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-25 | | | Wisata Pantai Waigeo Timur | 673,57 | 0 14' 49.923" LS | 131 18' 49.285" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-26 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 42,43 | 0 9' 22.819" LS | 130 15' 28.755" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-27 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 14,06 | 0 9' 12.136" LS | 130 15' 56.558" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-28 | | | Wisata Pantai Waigeo Timur | 1.89,74 | 0 8' 57.394" LS | 131 15' 15.135" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-29 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 815,59 | 0 5' 40.418" LS | 130 18' 40.544" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-30 | | | Wisata Pantai Warwarbomi | 392,48 | 0 5' 35.517" LS | 131 10' 16.072" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-31 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 11,69 | 0 4' 44.106" LS | 130 22' 25.615" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-32 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 204,37 | 0 5' 29.954" LS | 130 20' 29.631" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-33 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 18,95 | 0 4' 37.441" LS | 131 8' 59.703" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-34 | | | Wisata Pantai Warwarbomi | 409,77 | 0 6' 32.446" LS | 130 21' 35.580" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-47 | | | Wisata Pantai Waigeo Barat Daratan | 124,32 | 0 10' 29.949" LS | 130 16' 39.647" BT | | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-49 | Laut Seram | Kabupaten Sorong | Wisata Pantai Waigeo Timur | 2.939,55 | 0 21' 29.261" LS | 131 14' 49.012" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-OR-07 | | | Wisata Olah Raga Air Salawati | 54,82 | 1 8' 46.806" LS | 131 10' 44.822" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-15 | | | Wisata Pantai Salawati | 265,67 | 1 9' 12.907" LS | 131 9' 54.462" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-16 | | | Wisata Pantai Salawati | 187,28 | 1 8' 57.370" LS | 131 12' 15.916" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-35 | | | Wisata Pantai Beraur | 364,13 | 1 29' 5.408" LS | 131 30' 25.748" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-36 | | | Wisata Pantai Segun | 687,66 | 1 24' 39.039" LS | 131 20' 40.733" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-37 | | | Wisata Pantai Mayamuk | 137,46 | 1 3' 12.820" LS | 131 14' 28.875" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-44 | | | Wisata Pantai Salawati | 273,10 | 1 11' 6.558" LS | 131 7' 32.643" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-45 | | | Wisata Pantai Salawati | 476,73 | 1 10' 33.713" LS | 131 5' 57.761" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-46 | | | Samudera Pasifik | Kota Sorong | Wisata Pantai Sorong Barat | 228,73 | | | | 0 48' 42.969" LS | 131 15' 37.208" BT | | | |
| | | | KPU-W-P3K-48 | Wisata Pantai Sorong Barat | 167,83 | | | 0 47' 37.924" LS | 131 19' 12.434" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-OR-02 | Laut Seram | Kabupaten Kaimana | Wisata Olahraga Air di Kaimana | 403,82 | 3 40' 32.804" LS | 133 41' 29.734" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-06 | | | Wisata Pantai di Kaimana | 116,30 | 3 40' 22.724" LS | 133 41' 40.571" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-07 | | | Wisata Pantai di Kaimana | 268,58 | 3 39' 31.410" LS | 133 44' 45.759" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-08 | | | Wisata Pantai di Kaimana | 128,55 | 3 36' 35.093" LS | 133 42' 13.510" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-09 | | | Wisata Pantai di Kaimana | 2.768,80 | 3 32' 31.286" LS | 133 39' 18.648" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-OR-01 | Laut Seram | Kabupaten Fak fak | Wisata Olahraga Air Fak fak Barat | 1.418,81 | 2 56' 25.689" LS | 132 14' 40.880" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-02 | | | Wisata Pantai Teluk Patipi | 334,42 | 2 42' 1.620" LS | 132 8' 4.181" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-04 | | | Wisata Pantai di Wartutin | 505,62 | 2 55' 0.821" LS | 132 4' 10.010" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-05 | | | Wisata Pantai di Fak fak | 72,49 | 2 58' 50.216" LS | 132 14' 20.524" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-38 | | | Wisata Pantai di Fak fak Timur | 867,29 | 2 6' 51.708" LS | 132 30' 19.540" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-39 | | | Wisata Pantai di Furwagi | 1.685,69 | 2 47' 46.920" LS | 132 1' 57.516" BT | | | | | | | | |
| | | | KPU-W-P3K-40 | | | Wisata Pantai di Fak fak | 2.869,86 | 2 57' 55.827" LS | 132 14' 24.686" BT | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | Kawasan Pelabuhan | Pelabuhan Umum, Pelabuhan khusus dan pelabuhan perikanan | KPU-PL-DLK-01 | Kabupaten Teluk Wondama | | | | Pelabuhan Aisandami | 13,90 | 2 29' 15.923" LS | 134 32' 32.156" BT | 1. pengembangan pelabuhan dan pelabuhan perikanan; kegiatan bongkar muat barang dan penumpang; kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan dan hasil pembudidayaan; pusat pelaksanaan pembinaan mutu, pengembangan usaha dan pemasaran perikanan; 5. kegiatan tambat labuh; 6. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai kebutuhan pengembangan; 7. kegiatan sektor informal pendukung aktifitas pelabuhan |
| | | | KPU-PL-DLK-02 | Kabupaten Teluk Wondama | Pelabuhan Asem dame | | | 11,00 | 2 51' 39.476" LS | | | | 134 27' 31.144" BT | | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-03 | Kabupaten Teluk Bintuni | Pelabuhan Babo | | | 12,06 | 2 32' 2.578" LS | | | | 133 27' 12.949" BT | | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-04 | Kabupaten Manokwari | Pelabuhan Masni | | | 78,04 | 0 43' 58.119" LS | | | | 133 44' 12.371" BT | | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-05 | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Foley | | | 25,80 | 1 41' 35.834" LS | | | | 130 17' 41.861" BT | | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-06 | Kabupaten Fak fak | Pelabuhan Goras | | | 12,63 | 2 47' 53.860" LS | | | | 132 43' 21.633" BT | | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-07 | Kabupaten Manokwari | Pelabuhan Hompera | | | 19,16 | 0 44' 23.638" LS | | | | 133 33' 46.665" BT | | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-08 | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Kapadiri | | | 11,59 | 0 3' 18.635" LS | | | | 130 43' 19.988" BT | | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-09 | Kabupaten Fak fak | Pelabuhan Maas | | | 5,31 | 3 28' 53.311" LS | | | | 132 43' 19.988" BT | | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-10 | Kabupaten Kaimana | Pelabuhan Lengguru | | | 4,44 | 3 45' 48.518" LS | | | | 134 6' 9.538" BT | | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-11 | Kabupaten Manokwari | Pelabuhan Manokwari | | | 48,30 | 0 51' 54.232" LS | | | | 134 4' 19.061" BT | | | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|--------------------|----------|---------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin |
| | | | KPU-PL-DLK-12 | | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Manyaifun | 2,56 | 0 19' 50.320" LS | 130 13' 6.516" BT | 8. dan pelabuhan perikanan; dan pengembangan aktifitas kepelabuhanan lainnya. | 6. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan. | |
| | | | KPU-PL-DLK-13 | | Kabupaten Manokwari | Pelabuhan Maruni | 24,20 | 0 52' 31.904" LS | 134 3' 5.555" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-14 | | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Mnier | 14,31 | 0 5' 51.925" LS | 131 10' 24.178" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-15 | | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Muarana | 15,98 | 0 9' 55.097" LS | 131 18' 3.774" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-16 | | Kabupaten Manokwari Selatan | Pelabuhan Gunung Botak | 12,94 | 1 38' 33.441" LS | 134 5' 39.510" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-17 | | Kabupaten Tambrauw | Pelabuhan Hokmare | 19,11 | 0 23' 19.569" LS | 132 15' 42.255" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-18 | | Kabupaten Tambrauw | Pelabuhan Kwor | 52,73 | 0 22' 51.683" LS | 132 19' 23.077" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-19 | | Kabupaten Tambrauw | Pelabuhan Sausapor | 23,62 | 0 30' 27.681" LS | 132 4' 50.215" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-20 | | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Waisei | 19,49 | 0 25' 54.665" LS | 130 48' 11.786" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-21 | | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Pulau GAG | 11,28 | 0 26' 28.264" LS | 129 54' 29.753" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-22 | | Kabupaten Teluk Wondama | Pelabuhan Pulau Roon | 17,86 | 2 24' 13.032" LS | 134 33' 49.865" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-23 | | Kabupaten Sorong | Pelabuhan Saget Baru | 24,41 | 1 23' 43.785" LS | 130 58' 9.715" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-24 | | Kabupaten Sorong | Pelabuhan Sailolof | 19,36 | 1 15' 33.750" LS | 130 46' 3.009" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-25 | | Kabupaten Sorong | Pelabuhan Segun | 7,59 | 1 21' 47.922" LS | 131 21' 10.642" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-26 | | Kabupaten Fak fak | Pelabuhan Selasi | 20,01 | 3 16' 44.986" LS | 132 47' 57.253" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-27 | | Kabupaten Kaimana | Pelabuhan Senini | 2,31 | 3 24' 11.373" LS | 133 30' 48.844" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-28 | | Kabupaten Manokwari | Pelabuhan Sowi Marmpa | 16,22 | 0 54' 8.327" LS | 134 2' 35.919" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-29 | | Kabupaten Kaimana | Pelabuhan Susunu | 15,46 | 3 1' 31.430" LS | 133 47' 6.902" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-30 | | Kota Sorong | Pelabuhan Tanjung Kasuari | 13,14 | 0 48' 57.314" LS | 131 14' 5.966" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-31 | | Kabupaten Kaimana | Pelabuhan Teluk Arguni | 5,41 | 3 2' 54.242" LS | 133 52' 25.245" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-32 | | Kabupaten Fak fak | Pelabuhan Karas | 23,87 | 3 28' 9.928" LS | 132 52' 12.570" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-33 | | Kabupaten Kaimana | Pelabuhan Tonggarani | 10,68 | 3 28' 21.606" LS | 133 37' 36.897" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-34 | | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Urbinasopen | 15,14 | 0 22' 9.784" LS | 131 15' 20.692" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-35 | | Kabupaten Tambrauw | Pelabuhan Waibem | 10,86 | 0 28' 24.520" LS | 132 57' 46.485" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-36 | | Kabupaten Tambrauw | Pelabuhan Wanden | 15,02 | 0 33' 57.372" LS | 133 9' 34.490" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-37 | | Kabupaten Fak fak | Pelabuhan Weri | 11,71 | 3 13' 8.214" LS | 132 37' 54.377" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-38 | | Kabupaten Teluk Wondama | Pelabuhan Yamakan | 14,00 | 1 54' 18.267" LS | 134 11' 12.336" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-39 | | Kabupaten Teluk Wondama | Pelabuhan Yambekaki | 12,01 | 0 46' 56.640" LS | 134 13' 30.042" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-40 | | Kabupaten Teluk Wondama | Pelabuhan Yande | 14,15 | 2 21' 49.251" LS | 134 31' 19.218" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-41 | | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Yebekaki | 15,16 | 0 12' 39.151" LS | 131 18' 49.035" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-42 | | Kabupaten Teluk Wondama | Pelabuhan Yoop | 6,19 | 2 32' 56.7834" LS | 134 22' 8.352" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-43 | | Kabupaten Raja Ampat | Pelabuhan Mutus | 1,64 | 0 20' 42.854" LS | 130 20' 49.786" BT | | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|--------------------|----------|---------------|----------|-----------------------------|---|-----------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin |
| | | | KPU-PL-DLK-44 | | Kabupaten Fak fak | Pelabuhan Fak fak | 97,29 | 2 55' 54.817" LS | 132 18' 25.861" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-45 | | Kabupaten Manokwari Selatan | Pelabuhan Oransbari | 13,23 | 1 21' 9.824" LS | 134 16' 14.890" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-46 | | Kabupaten Teluk Wondama | Pelabuhan Wasior | 19,62 | 2 43' 41.329" LS | 134 30' 13.772" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-47 | | Kabupaten Teluk Wondama | Pelabuhan Yamberkiri | 20,79 | 1 49' 25.399" LS | 134 9' 1.407" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-48 | | Kota Sorong | Pelabuhan Sorong | 19.107,09 | 0 56' 18.073" LS | 131 13' 56.019" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-49 | | Kabupaten Kaimana | Terminal Khusus PT Avona Mina Lestari | 71,76 | 3 55' 19.562" LS | 134 25' 9.169" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-50 | | Kabupaten Sorong | Terminal Khusus PT Petrogas (Basin) Kasim Marine Terminal | 29,51 | 1 18' 29.547" LS | 131 1' 28.062" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-51 | | Kabupaten Sorong | Terminal Khusus PT Uni Raya Timber | 9,28 | 1 13; 44.102" LS | 131 9' 0.613" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-52 | | Kabupaten Teluk Bintuni | Terminal Khusus Pelabuhan Industri Kertas | 10,69 | 2 31' 14.952" LS | 133 35' 44.937" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-53 | | Kabupaten Teluk Bintuni | Terminal Khusus Pelabuhan LNG Tangguh | 11,37 | 2 26' 6.982" LS | 133 7' 56.632" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-54 | | Kabupaten Kaimana | Pelabuhan Kaimana | 81,25 | 3 39' 29.187" LS | 133 45' 26.965" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-55 | | Kabupaten Sorong | Terminal Khusus PT Hartawan Indo Timber | 28,01 | 1 7' 25.668" LS | 131 13' 34.396" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-56 | | Kabupaten Teluk Bintuni | Pelabuhan Khusus Petrokimia | 29,29 | 2 33' 16.397" LS | 133 0' 5.109" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-57 | | Kabupaten Fak fak | Terminal Khusus Migas PT PERTAMINA (PERSERO) | 2,59 | 2 55' 28.277" LS | 132 12' 59.196" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-58 | | Kabupaten Sorong | Terminal Khusus PT Hebei Hanjing Investmen | 1,18 | 1 3' 49.040" LS | 131 14' 40.628" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-59 | | Kabupaten Sorong | Terminal Khusus PT Bagus Jaya Abadi | 5,83 | 1 20' 40.092" LS | 131 0' 33.639" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-60 | | Kabupaten Sorong | Terminal Khusus PT JOB dan Pertamina EP | 86,07 | 1 20' 52.908" LS | 130 59' 5.087" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-61 | | Kabupaten Sorong | PT Pertamina Jetty RU VII Kilang Kasim | 5,56 | 1 19' 27.548" LS | 131 0' 43.629" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-62 | | Kota Sorong | Terminal Khusus PT Pro Intertec Indonesia | 18,96 | 1 48' 10.014" LS | 131 17' 38.906" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-63 | | Kabupaten Raja Ampat | Terminal Khusus PT Gag Nikel | 1,42 | 0 29' 47.622" LS | 129 52' 35.180" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-64 | | Kota Sorong | PT Bagus Jaya Abadi | 19,39 | 0 49' 54.641" LS | 131 14' 5.280" BT | | | |
| | | | KPU-PL-DLK-65 | | Kota Sorong | TUKS PT. Strukturindo Tifatama | 1,91 | 0 49' 52.651" LS | 131 13' 53.091" BT | | | |
| | | | KPU-PL-WKO-01 | | Kabupaten Kaimana | Elabuhan Himatota | 1,86 | 3 51' 54.251" LS | 133 55' 23.119" BT | | | |
| | | | KPU-PL-WKO-02 | | Kabupaten Fak fak | Pelabuhan Perikanan | 17,75 | 2 55' 40.186" LS | 132 16' 2.604" BT | | | |


| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|----------------------------|--|---------------|----------|-------------------------|---|-----------|------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Stelah Mendapat Ijin |
| | | | KPU-PL-WKO-03 | | Kabupaten Sorong | Pelabuhan Perikanan | 28,01 | 1 7' 38.016" LS | 131 13' 31.288" BT | | | |
| | | | KPU-PL-WKO-04 | | Kabupaten Manokwari | Pelabuhan Perikanan | 16,76 | 0 52' 31.791" LS | 134 3' 45.383" BT | | | |
| 3 | Kawasan Ekosistem Mangrove | Kawasan Ekosistem Mangrove | KPU-MG-01 | | Kabupaten Raja Ampat | Kawasan Ekosistem Mangrove Waigeo Barat Daratan | 696,99 | 0 6' 28.269" LS | 130 22' 2.781" BT | <ol style="list-style-type: none"> budidaya skala kecil/tradisional dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak keutuhan ekosistem hutan mangrove serta ekosistem di wilayah pesisir; kegiatan penangkapan ikan skala kecil; pariwisata yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan; rehabilitasi mangrove; dan penelitian dan pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir; penangkapan ikan dengan alat yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir; penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir; pembuangan sampah dan limbah; penebangan mangrove; dan pembangunan infrastruktur dan pemukiman. | <ol style="list-style-type: none"> pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pendidikan; dan pemantauan dan evaluasi. |
| 4 | Kawasan Pertambangan | Pertambangan mineral dan pertambangan minyak dangas bumi | KPU-TB-MN-01 | | Raja Ampat | Mineral Surya Pratama PT | 417,41 | 0 16' 38.813" LU | 130 53' 23.073" BT | <ol style="list-style-type: none"> alur pelayaran lokal; perlindungan habitat dan populasi biota; pengerukan dasar laut dengan meminimalkan kerusakan lingkungan; dan kegiatan pertambangan lainnya dengan meminimalkan kerusakan lingkungan. | <ol style="list-style-type: none"> semua jenis kegiatan perikanan budidaya; semua jenis kegiatan pariwisata dan rekreasi; penangkapan ikan; dan pembuangan sampah dan limbah. | <ol style="list-style-type: none"> penangkapan ikan skala tradisional dan bergerak; tempat labuh kapal; tempat alih muat antar kapal; penelitian dan pendidikan; dan monitoring dan evaluasi. |
| | | | KPU-TB-MN-02 | | | Mineal GAG Nikel PT | 7.072,95 | 0 26' 40.567" LS | 129 52' 59.746" BT | | | |
| | | | KPU-TB-MN-03 | | | Mineral Kawei Sejahtera Mining PT | 83,06 | 0 4' 28.325" LS | 130 9' 19.555" BT | | | |
| | | | KPU-TB-MN-04 | | | Mineral Kawei Sejahtera Mining PT | 10,58 | 0 3' 39.189" LS | 130 9' 27.028" BT | | | |
| | | | KPU-TB-MN-05 | | | Mineral Kawei Sejahtera Mining PT | 48,58 | 0 2' 39.253" LS | 130 8' 41.978" BT | | | |
| | | | KPU-TB-MN-06 | | | Mineral Kawei Sejahtera Mining PT | 1.478,83 | 0 4' 28.992" LS | 130 6' 43.826" BT | | | |
| | | | KPU-TB-MN-07 | | | Mineral Kawei Sejahtera Mining PT | 9,05 | 0 2' 2.879" LS | 130 7' 2.742" BT | | | |
| | | | KPU-TB-MN-08 | | | Mineral Kawei Sejahtera Mining PT | 88,79 | 0 1' 36.098" LS | 130 7' 45.146" BT | | | |
| | | | KPU-TB-MN-09 | | | Mineral Kawei Sejahtera Mining PT | 465,56 | 0 1' 10.746" LS | 130 5' 52.272" BT | | | |
| | | | KPU-TB-GM-01 | | Kabupaten Teluk Bintuni | Migas LNG Tangguh | 21.732,87 | 2 22' 7.999" LS | 133 6' 57.600" BT | | | |
| | | | KPU-TB-GM-02 | | Kabupaten Sorong | Migas JOB - Pertamina Petrochina Salawati | 402,96 | 1 33' 15.118" LS | 130 31' 14.160" BT | | | |
| 5 | Kawasan Energi | PLTMG/MG | KPU-EN-G-01 | | Kabupaten Kaimana | PLTG/MG KAIMANA | 6,3 | 03 37 10.50" LS | 133 42' 14.29" BT | <ol style="list-style-type: none"> perlindungan habitat dan populasi biota; kegiatan pembangkit listrik lainnya dengan meminimalkan kerusakan lingkungan; dan | <ol style="list-style-type: none"> semua jenis kegiatan perikanan budidaya; semua jenis kegiatan pariwisata dan rekreasi; penangkapan ikan; pembuangan sampah dan limbah; dan alur pelayaran lokal. | <ol style="list-style-type: none"> penelitian dan pengembangan; dan pemantauan dan evaluasi. |
| | | PLTMG/MG | KPU-EN-G-02 | | Kabupaten Fak Fak | PLTG/MG FAK FAK MPP | 1,7 | 02 55 46.75" LS | 132 10 06.67" BT | | | |
| | | PLTMG/MG | KPU-EN-G-03 | | Kabupaten Manokwari | PLTG/MG MPP MANOKWARI | 4,5 | 00 56 15.10" LS | 134 01 02.31" BT | | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|--------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------------------|---|--------------|--------------------|------------------|--|---|--|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin |
| | | Demersal | KPU-PT-D-01 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Waigeo Barat Daratan | 238.7237 | 130 16' 39.219" BT | 0 11' 50.072" LS | <p>1. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;</p> <p>2. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;</p> <p>3. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;</p> <p>4. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor tempel bermesin kurang dari 25 (dua puluh lima) PK dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai; dan</p> <p>5. penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor dengan alat tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>1. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>2. penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT) pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;</p> <p>3. pembuangan sampah dan limbah;</p> <p>4. segala jenis kegiatan perikanan budidaya;</p> <p>5. penangkapan ikan pada wilayah perairan yang tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang disepakati dalam rangka pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan;</p> <p>6. penangkapan ikan yang melebihi jumlah tangkapan yang dibolehkan; dan</p> <p>7. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>1. penelitian dan pendidikan;</p> <p>2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun serta terumbu karang buatan;</p> <p>3. pariwisata dan rekreasi; dan d. pemantauan dan evaluasi.</p> |
| | | Demersal | KPU-PT-D-02 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Waigeo Barat Daratan | 102.2391 | 130 22' 3.516" BT | 0 4' 36.649" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-03 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Ayau | 6,369.16 | 131 14' 24.629" BT | 0 59' 18.499" LU | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-04 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Selat Sagawin | 42.8788 | 130 28' 19.177" BT | 0 53' 53.963" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-05 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Waigeo Barat Daratan | 6.6794 | 130 14' 27.935" BT | 0 10' 27.273" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-06 | Samudera Pasifik | Kabupaten Manokwari | Demersal Manokwari Barat | 23.2294 | 134 5' 15.530" BT | 0 53' 7.557" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-07 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Salawati Utara | 2,343.25 | 131 8' 12.045" BT | 0 58' 32.878" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-08 | Laut Seram | Kabupaten Sorong | Demersal Salawati Utara, Salawati 9206-102 Sela tan | 4,526.15 | 131 4' 15.050" BT | 1 10' 5.698" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-09 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Kota Waisai | 2,098.60 | 130 49' 24.869" BT | 0 27' 20.842" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-10 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Meos Mansar | 1.8974 | 130 26' 59.849" BT | 0 26' 12.233" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-11 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Meos Mansar, Waigeo Barat 9203-36 Dara tan | 13,353.39 | 130 29' 57.293" BT | 0 23' 42.686" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-12 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Meos Mansar, Waigeo Selatan | 10, 123.5200 | 130 38' 4.289" BT | 0 21' 29.882" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-13 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Sorong | Demersal Beraur | 4,227.56 | 131 39' 18.760" BT | 1 29' 10.571" LS | | | |
| | | Demersal | KPU-PT-D-14 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Demersal Waigeo Barat Daratan | 8.9726 | 130 16' 8.653" BT | 0 10' 37.105" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-01 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis Misool Timur | 55064.9369 | 129 29' 36.642" BT | 1 47' 40.630" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-02 | Laut Seram | Kabupaten Fak fak | Pelagis Teluk Patipi, Kramongmongga, 9205-179 ayauni, Teluk Patipi, Furwagi, 9205-180 Fak fak Barat | 307 ,588. 90 | 132 6' 35.452" BT | 2 36' 23.911" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-03 | Laut Seram | Kabupaten Fak fak | Pelagis Fak fak Timur | 20701.9002 | 132 29'10.174"BT | 3 15' 39.403" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-04 | Laut Seram | Kabupaten Fak fak | Pelagis Fak fak | 4872.42 | 132 13' 27.349" BT | 3 0' 58.198" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-05 | Laut Seram | Kabupaten Fak fak | Pelagis Fakrak Timur Tengah, Fak | 54392.26 | 132 36' 46.498" BT | 3 40' 3.980" LS | | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|--------------------|----------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin |
| | | | | | | fak Timur, Karas, Buruway | | | | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-06 | Laut Seram | Kabupaten Fak fak | Pelagis Teluk Patitpi | 59368.15 | 131 32' 37.046" BT | 2 44' 12.415" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-07 | Laut Seram | Kabupaten Fak fak | Pelagis Fak fak Tengah, Pariwari, Wartutin | 105328.53 | 132 2' 47.498" BT | 3 2' 45.764" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-08 | Laut Aru | Kabupaten Kaimana | Pelagis Buruway | 28,258.70 | 133 36' 31.100" BT | 4 26' 54.945" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-09 | Laut Seram | Kabupaten Fak fak | Pelagis Karas | 1508.24 | 132 32' 52.746" BT | 3 50' 8.612" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-10 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari Selatan | Pelagis Ransiki, Momi Waren | 28,292.91 | 134 18' 12.588" BT | 1 37' 35.020" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-11 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari | Pelagis Manokwari Selatan, Ransiki, Tanah Rubuh | 147,602.36 | 134 17' 27.575" BT | 1 12' 47.518" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-12 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kota Sorong | Pelagis Sorong Kepulauan | 3,902.76 | 131 10' 2.211" BT | 0 52' 40.080" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-13 | Samudera Pasifik, | Kota Sorong | Pelagis Sorong Barat | 1,734.53 | 131 14' 38.612" BT | 0 46' 42.885" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-14 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari | Pelagis Manokwari Utara, Masni, Sidey | 34,637.29 | 133 52' 51.911" BT | 0 34' 9 .324" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-15 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong | Pelagis Kota Waisai, Selat Sagawin, Sorong Kepulauan | 47,408.02 | 131 1' 6.981" BT | 0 39' 15.247" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-16 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Tambrau | Pelagis Abun, Ambarbaken, Kwoor, Sausapor | 147,172.54 | 132 48' 43.680" BT | 0 20' 57.540" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-17 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Tambrau | Pelagis Sausapor, Kwoor, Abun, Ambarbaken | 89,097.08 | 132 33' 30.165" BT | 0 17' 19.580" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-18 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis Waigeo Barat Daratan, Waigeo Barat, Waigeo Barat Kepulauan | 249,118.79 | 129 52' 14.233" BT | 0 8' 21.350" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-19 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari | Pelagis Manokwari Timur | 17,647.36 | 134 14' 45.863" BT | 0 48' 28.561" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-20 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari | Pelagis Manokwari Timur | 9,401.08 | 134 10' 6.727" BT | 0 47' 48.011" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-21 | Laut Aru | Kabupaten Kaimana | Pelagis Teluk Etna | 122,259.22 | 134 18' 47.875" BT | 4 11' 42.280" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-22 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis Misool Selatan | 261,127.56 | 130 22' 44.334" BT | 2 16' 17.520" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-23 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis Kofiau | 56,137.81 | 129 14' 22.693" BT | 1 15' 28.306" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-24 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis Kepulauan Sembilan | 315,221 .82 | 130 1' 55.669" BT | 1 17' 7 .225" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-25 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis Kofiau | 216,852.05 | 129 43' 49.523" BT | 0 58' 35.894" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-26 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Kaimana | Pelagis Kaimana, Buruway | 334,042.40 | 133 23' 23.527" BT | 4 4' 10.855" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-27 | Samudera Pasifik, | Sorong Kepulauan | Pelagis Sarong Kepulauan | 1,047.88 | 131 13' 59.551" BT | 0 49' 4.104" LS | | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|---|---|------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin |
| | | | | Laut Halmahera | | | | | | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-28 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis Ayau, Supnin, Waigeo Utara, Warwabomi, Waigeo Timur, Waigeo Barat | 970,727.20 | 130 54' 48.233" BT | 0 25' 54.100" LU | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-29 | Samudera Pasifik, | Kota Sorong | Pelagis Sorong Barat | 132,034.26 | 131 13' 54.350" BT | 0 32' 47.215" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-30 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Tambrauw | Pelagis Sausapor, Moraid | 38,224.00 | 131 53' 24.699" BT | 0 25' 35.305" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-31 | Samudera Pasifik, | Kota Sorong | Pelagis Sarong Barat | 6,504.25 | 131 20' 55.058" BT | 0 45' 15.121" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-32 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw | Pelagis Manakwari Utara, Masni, Sidey, Mubrani | 94,576.97 | 133 47' 13.699" BT | 0 37' 54.602" LS | | | |
| | | Pelagis | KPU-PT-P-33 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari | Pelagis Manokwari Timur | 132.47 | 134 16' 16.936" BT | 0 43' 9.371" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-01 | Laut Seram | Kabupaten Teluk Bintuni | Pelagis dan Demersal Sumuri | 70,792.67 | 132 52' 32.716" BT | 2 32' 56.641" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-02 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Kata Waisai | 3,331.51 | 130 53' 0.956" BT | 0 26' 54.445" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-03 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Ayau, Supnin, Waigea Utara, Warwabomi, Waigea Timur | 142,063.65 | 131 3' 11.201" BT | 0 7' 26.851" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-04 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Waigeo Barat, Waigeo Barat Daratan | 182,993.09 | 130 13' 4.69 1" BT | 0 5' 47.949" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-05 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Waigeo Barat Kepulauan | 29,013.09 | 129 53' 4.163" BT | 0 26' 30.172" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-06 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari Selatan | Pelagis dan Demersal Momi Waren, Ransiki | 15,834.20 | 134 10' 48.735" BT | 1 36' 28.518" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-07 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari | Pelagis dan Demersal Manokwari Selatan, Tanah Rubuh, Oransbari | 43,989.86 | 134 13' 11.304" BT | 1 17' 26.400" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-08 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Manokwari | Pelagis dan Demersal Perairan Manokwari-Manokwari Selatan | 16,755.76 | 134 5' 51.073" BT | 0 57' 18.785" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-09 | Laut Seram | Kabupaten Teluk Bintuni | Pelagis dan Demersal Bintuni, Kamundan, Weriagar, Tomu | 73,138.58 | 132 56' 6.000" BT | 2 17' 43.027" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-10 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Tambrauw | Pelagis dan Demersal Ambarbaken | 24,666.95 | 133 10' 0.447" BT | 0 31' 43.418" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-11 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Tambrauw | Pelagis dan Demersal Abun, Sausapor, Kwoor | 58,515.58 | 132 11' 51.384" BT | 0 23'31.102"LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-12 | Laut Aru | Kabupaten Kaimana | Pelagis dan Demersal Kaimana | 7,686.79 | 133 48' 4.935" BT | 3 46' 25.791" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-13 | Laut Aru | Kabupaten Kaimana | Pelagis dan Demersal Teluk Etna | 20,565.65 | 134 45' 0.338" BT | 4 17' 14.314" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-14 | Laut Aru | Kabupaten Kaimana | Pelagis dan Demersal Teluk Etna | 27 ,586.39 | 134 23' 50.336" BT | 3 59' 26.267" LS | | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Kegiatan | Kode | Lokasi | | | Luas (Ha) | Koordinat | | Pemanfaatan Ruang | | |
|----|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--|---|------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi | | Long (X) | Lat (Y) | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan Setelah Mendapat Ijin |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-15 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Selat Sagawin | 1,726.25 | 130 32' 44.392" BT | 0 57' 23. 798" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-16 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Kepulauan Sembilan | 174,321.94 | 130 26' 54.869" BT | 1 38' 40.621" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-17 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Kofiau | 12,420.61 | 129 34' 54.105" BT | 1 7' 5.656" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-18 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Kofiau | 35,137.53 | 129 47' 58.734" BT | 1 3' 46.154" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-19 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Selat Sagawin | 16,357.37 | 130 27' 6.452" BT | 0 56' 29.128" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-20 | Laut Aru | Kabupaten Kaimana | Pelagis dan Demersal Buruway, Kambrau, Teluk Arguni Bawah, Kaimana | 67,022.62 | 133 34' 30.569" BT | 3 29' 44.083" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-21 | Laut Aru | Kabupaten Kaimana | Pelagis dan Demersal Kaimana | 7,413.23 | 133 45' 45.403" BT | 3 45' 6.810" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-23 | Laut Seram | Kabupaten Teluk Bintuni | Pelagis dan Demersal Aranday | 11,899.47 | 133 7' 20.061" BT | 2 19' 28.379" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-24 | Laut Seram | Kabupaten Teluk Bintuni | Pelagis dan Demersal Sumuri | 1,743.47 | 133 3' 31.006" BT | 2 24' 26.057" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-25 | Laut Seram | Kabupaten Teluk Bintuni | Pelagis dan Demersal Aroba | 127,129.62 | 133 30' 50.711" BT | 2 26' 21.415" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-26 | Samudera Pasifik, | Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw | Pelagis dan Demersal Manokwari Utara, Masni, Sidey, Mubrani | 89,995.67 | 133 41' 13.140" BT | 0 41' 27.921" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-27 | Laut Seram | Kabupaten Teluk Bintuni | Pelagis dan Demersal Sumuri | 6,157.19 | 133 13' 43.527" BT | 2 21' 0.646" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-28 | Laut Seram | Kabupaten Teluk Bintuni | Pelagis dan Demersal Bintuni | 14,841.54 | 133 25' 30.368" BT | 2 14' 30.980" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-29 | Laut Seram | Kabupaten Fak fak | Pelagis dan Demersal Teluk Patipi | 37,496.74 | 131 38' 27.064" BT | 2 38' 46.391" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-30 | Samudera Pasifik | Kabupaten Tambrauw | Pelagis dan Demersal Abun | 10,952.05 | 132 56' 15.443" BT | 0 24' 10.025" LS | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-31 | Samudera Pasifik, Laut Halmahera | Kabupaten Raja Ampat | Pelagis dan Demersal Ayau | 9 ,697.85 | 131 0' 11. 198" BT | 0 30' 11.030" LU | | | |
| | | Pelagis dan Demersal | KPU-PT-PD-32 | Laut Seram | Kabupaten Sorong | Pelagis dan Demersal Salawati Utara, Salawati Selatan, Seget, Segun, Beraur | 731,886.82 | 130 59' 39.308" BT | 1 36' 25.022" LS | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 - 2041

**PETA PERATURAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT**

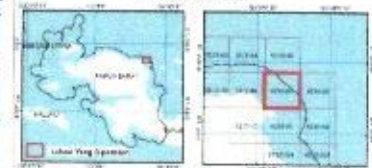
Lokasi: 0215-01



SKALA 1 : 50.000

Proyeksi: UTM
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84)

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

| | |
|--|--|
| Administrasi | Sistem Transportasi |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kotamadya ● Kabupaten ● Desa ● Desa Kelurahan ● Desa ● Desa | <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelabuhan Regional ○ Pelabuhan Lokal ○ Pelabuhan Lokal ○ Pelabuhan Perikanan ○ Pelabuhan Perikanan ○ Pelabuhan Perikanan |
| Perairan | Wilayah Strategis Nasional (WSN) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Selat ○ Selat ○ Selat ○ Selat ○ Selat | <ul style="list-style-type: none"> ■ WSN ■ WSN ■ WSN ■ WSN ■ WSN |
| Atmosfer Ruang | Atmosfer Ruang |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Kawasan Strategis Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Kawasan Strategis Nasional |

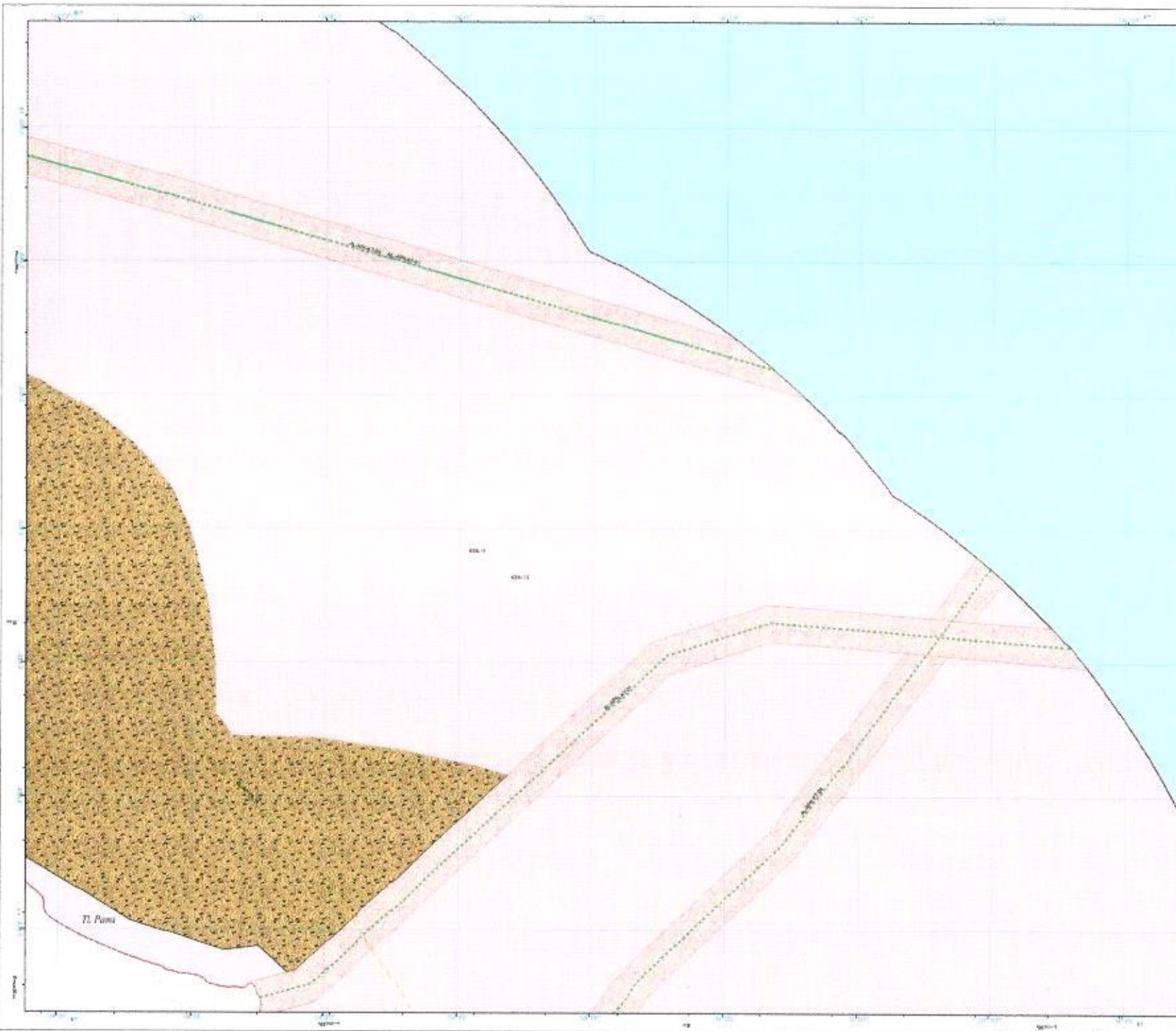
KETERANGAN RUMAH & SUMBER PETA

Situs: [Address]

Penyusun: [Name]

Revisi: [Date]

... [Additional details about the map's creation and sources]



LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN
 2022-2041

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN RTRW PROVINSI PAPUA BARAT

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| | | | | I | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| PERWUJUDAN WILAYAH ADAT/WILAYAH KHUSUS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mengidentifikasi, memetakan dan menetapkan wilayah adat yang ada di Provinsi Papua Barat | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan, • Bappeda, • ATR/BPN, • Dinas Kehutanan, • Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang • Mitra Pembangunan | | | | | | | | | |
| 2 | Menyusun regulasi untuk pendaftaran peta-peta wilayah adat | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ATR/BPN, • Biro Hukum Provinsi Papua Barat, • Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan, • Bappeda, • Dinas Kehutanan, • Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang • Mitra Pembangunan | | | | | | | | | |
| 3 | Membangun model pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati oleh masyarakat adat | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, ATR/BPN, Dinas Kehutanan, • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|----------------------|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | sesuai dengan kearifan lokasi dan peraturan yang berlaku | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 4 | Menyusun regulasi-regulasi di daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Biro Hukum Provinsi Papua Barat, • Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan, • Bappeda, • Dinas Kehutanan, • Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 5 | Mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Semua OPD • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 6 | Perlindungan terhadap situs-situs budaya | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Mitra Pembangunan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | yang terkait langsung dengan peradaban masyarakat adat | | SAH | | | | | | | |
| 7 | Mendorong rencana tata ruang budaya secara spesifik dalam rencana tata ruang kabupaten/kota | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 8 | Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 9 | Fasilitasi kerjasama atau kemitraan antara MHA dan Lembaga Pemerintah dan swasta | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 10 | Penguatan kearifan lokal dan MHA dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 11 | Pengusulan dan penetapan MHA baru | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 12 | Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan | Provinsi Papua Barat | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---|---|-------------|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | prasarana kelembagaan MHA | | | • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI | | | | | | | | | | |
| A | Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan bandar udara primer | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 2 | Peningkatan kapasitas pelabuhan laut utama | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 3 | Pengembangan pasar induk regional | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 4 | Peningkatan kualitas kesehatan (RSU Tipe A) | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 5 | Perbankan internasional dan nasional swasta maupun pemerintah | Kota Sorong | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi • Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 6 | Penguatan sektor industri perdagangan dan jasa | Kota Sorong | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|-------------|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 7 | Peningkatan kualitas pendidikan sampai pada tingkatan perguruan tinggi/universitas | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kemenetrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 8 | Peningkatan hubungan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan jaringan transportasi. | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Mitra Pembangunan | | | | | | |
| 9 | Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi perkotaan | Kota Sorong | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mitra Pembangunan TELKOM, Kantor Pos | | | | | | |
| 10 | Peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan raya | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 11 | Pembangunan terminal penumpang Tipe A | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 12 | perluasan pelabuhan | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|-------------|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Sorong | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 13 | Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sebesar 30% dari kawasan terbangun | Kota Sorong | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| B | Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | | | | | | | | | |
| B1 | PKW Manokwari | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kapasitas bandar udara Rendani dengan skala pelayanan sekunder | Manokwari | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, | | | | | | |
| 2 | Peningkatan kapasitas pelabuhan laut pengumpan | Manokwari | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, | | | | | | |
| 3 | Pengembangan pasar induk regional | Manokwari | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 4 | Pengembangan Kawasan Agropolitan | Manokwari | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 5 | Peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan | Manokwari | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|-----------|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | dan pariwisata. | | | Daya Mineral, • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | | |
| 6 | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan | Manokwari | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Pendidikan, • Dinas Pendidikan, • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 7 | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan | Manokwari | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Kesehatan, • Dinas Kesehatan | | | | | | |
| 8 | Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik (PLTD, PLTMh dan PLTU) | Manokwari | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | • PLN, • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 9 | Pembangunan lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya | Manokwari | APBN, APBD Provinsi dan Dana Lain yang SAH | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 10 | Pembangunan sistem mitigasi bencana alam terutama gempa bumi, tsunami dan banjir | Manokwari | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, • Dinas Pendidikan, • BMKG, • Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | |
| 11 | Peningkatan | Manokwari | APBN dan APBD | Dinas Pekerjaan Umum | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|-----------|---------------------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan | | Provinsi | dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 12 | Pembangunan terminal penumpang Tipe B | Manokwari | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, • Dinas Perhubungan, • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 13 | Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sebesar 30% dari kawasan terbangun | Manokwari | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan, • Dinas Lingkungan Hidup; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| B2 | PKW Fak fak | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Peningkatan kapasitas bandara udara (sekunder) | Fak fak | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, • Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 2 | Peningkatan kapasitas pelabuhan laut pengumpan | Fak fak | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, • Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 3 | Pengembangan Kawasan Agropolitan | Fak fak | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, • Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |
| 4 | Pengembangan pusat pertumbuhan baru di Bombray | Fak fak | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 5 | Pengembangan | Fak fak | APBN dan APBD | Dinas Perdagangan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---------|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | pasar induk | | Provinsi | | | | | | | |
| 6 | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan | Fak fak | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 7 | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan | Fak fak | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan | | | | | | |
| 8 | Pembangunan lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya | Fak fak | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | | | | | | |
| 9 | Peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan | Fak fak | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 10 | Pembangunan terminal penumpang Tipe B | Fak fak | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 11 | Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat | Fak Fak | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup; dan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---------|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | sebesar 30% dari kawasan terbangun | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| B3 | PKW Ayamaru (Maybrat) | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan Peningkatan kapasitas bandara udara (sekunder) | Ayamaru | APBN DAN APBD PROVINSI | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 2 | Pengembangan pasar induk | Ayamaru | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 3 | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan | Ayamaru | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kemenetrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 4 | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan | Ayamaru | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kemenetrian Kesehatan, Dinas Kesehatan | | | | | | |
| 5 | Pembangunan lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya | Ayamaru | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | | | | | | |
| 6 | Peningkatan kapasitaas Pembangkit Listrk (PLTD,PLTMh | Ayamaru | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | dan PLA) | | | | | | | | | |
| 7 | Peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. | Ayamuru | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , • Dinas Kelautan dan Perikanan , • Dinas Kehutanan, • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | | |
| 8 | Peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 9 | Pembangunan terminal penumpang Tipe B | Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, • Dinas Perhubungan, • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 10 | Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sebesar 30% dari kawasan terbangun | Ayamuru | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan, • Dinas Lingkungan Hidup; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| C | Pengembangan Pust Kegiatan Lokal (PKL) | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan dan pemantapan fungsi lembaga keuangan perbankan, koperasi dan | Teminabuan, Aimas, Kaimana, Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | lembaga perkreditan lainnya | Ransiki dan Anggi | | | | | | | | |
| 2 | Pembangunan dan pemantapan fasilitas kesehatan (puskesmas pembantu dan fasilitas penunjang lainnya). | Teminabuan, Aimas, Kaimana, Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, Ransiki dan Anggi | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kemenetrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, • Dinas Pendidikan, • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 3 | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan | Teminabuan, Aimas, Kaimana, Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, Ransiki dan Anggi | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kemenetrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, • Dinas Pendidikan, • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 4 | Peningkatan kualitas pasar induk kabupaten | Teminabuan, Aimas, Kaimana, Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, Ransiki dan Anggi | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | |
| 5 | Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata daerah. | Teminabuan, Aimas, Kaimana, Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, Ransiki dan Anggi | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , • Dinas Kelautan dan Perikanan , • Dinas Kehutanan, • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | | |
| 6 | Peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan | Teminabuan, Aimas, Kaimana, Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, Ransiki dan Anggi | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 7 | Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelabuhan laut | Teminabuan, Aimas, Kaimana, Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, Ransiki dan Anggi | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 8 | Pengembangan dan peningkatan kapasitas bandara udara | Teminabuan, Aimas, Kaimana, Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, Ransiki dan Anggi | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 9 | Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber energi listrik | Teminabuan, Aimas, Kaimana, Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, Ransiki dan Anggi | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 10 | Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat | Teminabuan, Aimas, Kaimana, | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup; dan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| sebesar 30% dari kawasan terbangun | | Bintuni, Waisai, Raisei, Fef, Aifat, Ransiki dan Anggi | | • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| D Perwujudan Sistem Transportasi Provinsi | | | | | | | | | | |
| D1 Transportasi Darat | | | | | | | | | | |
| SISTEM JARINGAN JALAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Jalan | Seluruh Wilayah Provinsi | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 2 | Pemeliharaan dan perbaikan jalan. | Seluruh Wilayah Provinsi | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 3 | Pengembangan Jalan Arteri Primer | <ul style="list-style-type: none"> • Klamono (Kab. Sorong) - Bts. Kab. Sorong Selatan; • Bts. Kab. Sorong Selatan – Kambuaya (Kab. Maybrat); • Jln. Yos Sudarso (Sorong); • Jln. A. Yani (Sorong); • Jln. Basuki Rahmat (Sorong); • Bts. Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | I | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | <p>Sorong - Aimas (Km.18) Kab. Sorong - Klamono (Kab. Sorong);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kambuaya - Susumuk (Kab. Maybrat); • Susumuk - Kumurkek (Kab. Maybrat); • Kumurkek - Ayamasi - Snopy (Kab. Tambrau); • Snopy (Kab. Tambrau) - Kebar (Kab. Tambrau) - Prafi (Kab. Manokwari); • Prafi - Warmare - Maruni (Kab. Manokwari); • Maruni - Bts. Kota Manokwari; • Jln. Siliwangi (Manokwari); • Jln. Yos Sudarso | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | (Manokwari); • Jln. Merdeka (Manokwari); • Jln. Trikora (Manokwari); • Jln. Drs. Esau Sesa (Manokwari); • Jln. Sudirman (Manokwari); • Maruni (Manokwari) – Oransbari (Mansel); • Oransbari – Ransiki (Mansel); • Ransiki – Mameh (Mansel); • Ambuni – Tandia (Teluk Wondama); • Simpang Goro - Batas Provinsi Papua Barat; • Mameh – Windesi; dan • Windesi – Ambuni. | | | | | | | | |
| 3 | Pengembangan Jalan Kolektor Primer 1 | Seluruh Kabupaten Kota | APBN dan APBD Provinsi | • Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|---|------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 4 | Pengembangan Jalan Kolektor Primer dua (JKP 2) | Seluruh Kabupaten Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 5 | Pengembangan terminal barang direncanakan menyatu dengan terminal penumpang tipe B. | <ul style="list-style-type: none"> • Terminal Kota Sorong di Kota Sorong; • Terminal Wosi di Kabupaten Manokwari; • Terminal Tumburuni di Kabupaten Fak fak; • Terminal Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan; • Terminal Tangkoca di Kabupaten Kaimana; • Terminal Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan; • Terminal Tambraw di Kabupaten Tambraw;da | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Terminal Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni. | | | | | | | | |
| 6 | Pengembangan Jembatan timbang | <ul style="list-style-type: none"> Sowi di Kabupaten Manokwari | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 7 | Pengembangan Jembatan | <ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kabupaten Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| SISTEM JARINGAN JALUR KERETA API | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan jaringan kereta api antar kota | <ul style="list-style-type: none"> Sorong – Sorong Selatan – Bintuni – Manokwari | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan, PT KAI | | | | | | |
| 2 | Pengembangan Stasiun Kereta Api | <ul style="list-style-type: none"> Stasiun Sorong; Stasiun Aimas; Stasiun Pertamina; Stasiun Maladopok; Stasiun Saluk; Stasiun Klमित; Stasiun Germakolo; | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan, PT KAI | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | I | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Stasiun Ayamaru; • Stasiun Kambuaya; • Stasiun Fan; • Stasiun Susumuk; • Stasiun Aifat; • Stasiun Aimau; • Stasiun Bintuni; • Stasiun Koranoe; • Stasiun Mindaha; • Stasiun Momi; • Stasiun Ransiki; • Stasiun Oransbari; • Stasiun Warkapi; • Stasiun Rendani; • Stasiun Andai; dan • Stasiun Manokwari. | | | | | | | | | |
| TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Lintas penyeberangan antar provinsi, | Kota Sorong, Fak fak, Manokwari | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, • Dinas Perhubungan | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|---|---|------------------------|---|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Sorong – Fak fak - Wahai • Manokwari – Biak • Manokwari - Nabire | | | | | | | | | |
| 2 | Pengembangan Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Sorong – Seget • Seget – Mogem • Seget - Terminabuan | Kota Sorong, Kab. Sorong, Sorong Selatan | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, • Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 3 | Pengembangan Pelabuhan sungai dan danau | <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Sorong di Kota Sorong; • Pelabuhan Fak fak di Kabupaten Fak fak • Pelabuhan Inanwatan di Kabupaten Sorong Selatan; • Pelabuhan Babo di Kabupaten Teluk Bintuni; • Pelabuhan | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, • Dinas Perhubungan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Gunung Botak di Kabupaten Manokwari Selatan; • Pelabuhan Segun di Kabupaten Sorong; • Pelabuhan Yahadian di Kabupaten Sorong Selatan; • Pelabuhan Puragi di Kabupaten Sorong Selatan; • Pelabuhan Matemani Kais di Kabupaten Sorong Selatan; • Pelabuhan Sungai Kasuweri di Kabupaten Sorong Selatan; • Pelabuhan Kalitami di Kabupaten Sorong Selatan; • Pelabuhan | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Aranday di Kabupaten Teluk Bintuni; • Pelabuhan Tembuni di Kabupaten Teluk Bintuni; • Pelabuhan Tafereh di Kabupaten Teluk Bintuni; • Pelabuhan Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni; • Pelabuhan Aroba di Kabupaten Teluk Bintuni; • Pelabuhan Arguni Bawah di Kabupaten Fak fak; • Pelabuhan Bahumia di Kabupaten Kaimana; • Pelabuhan Kaimana di Kabupaten Kaimana; | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Lengguru di Kabupaten Kaimana; • Pelabuhan Kambrau di Kabupaten Kaimana; • Pelabuhan Maidan; • Pelabuhan Wunini; • Pelabuhan Sokuwa; • Pelabuhan Tobu-tobu; • Pelabuhan Minamo; • Dermaga Anggi Gidi di Kabupaten Pegunungan Arfak; • Dermaga Anggi Gida di Kabupaten Pegunungan Arfa; dan • Dermaga danau uter di Kabupaten Maybrat. | | | | | | | | |
| 4 | Pengembangan Pelabuhan penyeberangan | <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Waigeo di Kabupaten | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan, • Dinas Perhubungan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Raja Ampat; • Pelabuhan Klademak di Kota Sorong; • Pelabuhan Arar di Kabupaten Sorong; • Pelabuhan Manokwari di Kabupaten Manokwari; • Pelabuhan Fak-fak di Kabupaten Fak fak; • Pelabuhan Kokas di Kabupaten Fak fak; • Pelabuhan Foley di Kabupaten Raja Ampat; • Pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama; • Pelabuhan Salawati di Kabupaten Raja Ampat; • Pelabuhan Batanta di | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Kabupaten Raja Ampat; • Pelabuhan Kaimana di Kabupaten Kaimana; • Pelabuhan Inanwatan di Kabupaten Sorong Selatan; dan • Pelabuhan Aranday di Kabupaten Teluk Bintuni. | | | | | | | | |
| D2 | Transportasi Laut | | | | | | | | | |
| PELABUHAN LAUT | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan pelabuhan utama | Palabuhan Sorong di Kota Sorong | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 2 | Pengembangan pelabuhan Pengumpul | <ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Fak fak di Kabupaten Fak fak; Pelabuhan Arar di Kabupaten Sorong; Pelabuhan Kaimana di Kabupaten Kaimana; Pelabuhan Manokwari di | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--|------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Kabupaten Manokwari; • Pelabuhan Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan; • Pelabuhan Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni; dan • Pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama. | | | | | | | | |
| 3 | Pengembangan Pelabuhan Pengumpan | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 4 | Pengembangan Terminal Umum | <ul style="list-style-type: none"> Terminal umum arar di Kabupaten Sorong; dan Terminal umum Seget Baru di Kabupaten Sorong. | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 5 | Pengembangan Terminal Khusus | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 6 | Pengembangan pelabuhan | Kota Sorong, Kabupaten | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | perikanan | Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak fak, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | |
| ALUR PELAYARAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Alur-pelayaran umum dan perlintasan | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 2 | Pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 3 | Menetapkan sistem rute | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 4 | Menetapkan tata cara berlalu lintas | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 5 | Menetapkan daerah labu jangkar sesuai dengan | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|--|---|------------------------|---|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | kepentingannya | | | | | | | | | |
| 6 | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 7 | Meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 8 | Memasang tanda batas dan rambu pelayaran | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 9 | Melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran | Seluruh Kabupaten dan Kota | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan | | | | | | |
| D3 | Transportasi Udara | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan bandar udara pengumpul sekunder | <ul style="list-style-type: none"> Rendani di Kabupaten Manokwari; Domine Eduard Osok di Kota Sorong. | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 2 | Pengembangan bandar udara Pengumpul Tersier | Marinda di Kabupaten Raja Ampat | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 3 | Pengembangan bandar udara Pengumpan | <ul style="list-style-type: none"> Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni; | APBN dan APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | I | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Babo di Kabupaten Teluk Bintuni; • Utarom di Kabupaten Kaimana; • Inanwatan di Kabupaten Sorong Selatan; • Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan; • Ayawasi di Kabupaten Sorong Selatan; • Merdey di Kabupaten Teluk Bintuni; • Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak; • Kambuaya di Kabupaten Maybrat; • Werur di Kabupaten Tambrau; • Kebar di Kabupaten | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Tambrauw; • Torea/Fak fak baru di Kabupaten Fak fak; • Wasior/Wasi or baru di Kabupaten Teluk Wondama; • Segun di Kabupaten Sorong; • Abreso di Kabupaten Manokwari Selatan; • Kabare di Kabupaten Raja Ampat; • Lenmalas di Kabupaten Raja Ampat; • Reni di Kabupaten Raja Ampat; dan • Dorekar di Kabupaten Raja Ampat. | | | | | | | | |
| E | Perwujudan Sistem Jaringan Energi | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan jaringan gas dan minyak bumi | • Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Terminal | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, • BUMN | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | I | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | LPG Proyek Tangguh LNG Train 3 di Kabupaten Teluk Bintuni; <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Terminal Petrogas Basin di Kabupaten Sorong • Jaringan jaringan minyak dan gas bumi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pipa Gas LNG Tangguh (Vorwata A); b. Pipa Gas LNG Tangguh (Vorwata B); dan c. Pipa Gas Bawah Laut PT Petrogas di Kabupate | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | n Sorong; d. Karim – Arar di Kabupaten Sorong; e. Pipa JOB Pertamina Petrochina Salawati di Kabupaten Sorong; f. Pipa Pertamina (Aset V Papua) di Kabupaten Sorong; g. Pipa Petrochina Internasional (Bermuda) di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong; dan h. Pipa BP Berau Kabupaten Teluk Bintuni. | | | | | | | | |
| 2 | Jaringan infrastruktur pembangkit | Seluruh Wilayah Kabupaten | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | tenaga listrik | Kota | SAH | | | | | | | |
| 3 | Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik | Seluruh Wilayah Kabupaten Kota | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN | | | | | | |
| 4 | Pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> PLN | | | | | | |
| 5 | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |
| 6 | Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik | <ul style="list-style-type: none"> Kabel Listrik Bawah Laut dari Tg. Tagopah di Kabupaten Teluk Bintuni; Kabel Listrik Bawah Laut Kota Sorong; dan Kabel Listrik Sorong – Waisai di Kota Sorong. | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | PLN | | | | | | |
| 6 | Pengembangan Gardu Listrik | <ul style="list-style-type: none"> Aimas di Kabupaten Sorong; Sorong di Kabupaten Sorong; Manokwari | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | PLN | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | di Kabupaten Manokwari; • Prafi di Kabupaten Manokwari; • Rufey di Kota Sorong; dan • Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan. | | | | | | | | |
| F | Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan jaringan tetap termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | PT. TELKOM | | | | | | |
| 2 | Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial meliputi pengembangan Telkom, PALAPA RING TIMUR dan kabel fiber optic (Saukorem) | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | PT. TELKOM | | | | | | |
| 3 | Jaringan bergerak seluler di Provinsi Papua Barat berupa: • Sistem seluler atau wireles | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas Komunikasi dan Informasi, • PT. TELKOM dan • SWASTA | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | berupa gelombang dengan frekuensi tertentu <ul style="list-style-type: none"> • Tower BTS di seluruh Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 4 | Pengembangan jaringan bergerak satelit, meliputi: sistem satelit (vsat) <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan jaringan telekomunikasi sistem mikro digital untuk melayani PKN, PKW, PKNS, PKL dan • Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam Kawasan strategis | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | PT. TELKOM | | | | | | |
| 5 | Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | PT. TELKOM | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| yang tersebar dan terpencil utamanya pada kawasan perbatasan dan kawasan prioritas | | | | | | | | | | |
| G Perwujudan Sistem Jaringan Sumberdaya Air | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan sumber daya air | | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN, APBD | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| G1 Jaringan Irigasi | | | | | | | | | | |
| 1 | D.I Kewenangan Nasional | <ul style="list-style-type: none"> D.I Aimasi CS meliputi DI Aimasi dan DI Prafi di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari; D.I Oransbari di Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan D.I Wariori di Distrik Masni Kabupaten Manokwari; | APBN | Balai Wilayah Sungai | | | | | | |
| 2 | D.I Kewenangan Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> D.I Bomberay di Kabupaten Fak fak; | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | I | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • D.I Prafi di Kabupaten Manokwari; • D.I Muturi di Kabupaten Teluk Bintuni; • D.I Klasafat di Kabupaten Sorong; • D.I KLasagum di Kabupaten Sorong; • D.I Majaran di Kabupaten Sorong; • D.I Majener di Kabupaten Sorong; • D.I Makbusun di Kabupaten Sorong; • D.I Mariyat di Kabupaten Sorong; • D.I Matawolot di Kabupaten Sorong; dan • D.I | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Waigo/ Mosw aren di Kabupaten Sorong Selatan. | | | | | | | | |
| 3 | D.I Kewenangan Kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> • D.I Mbima Jaya di Kabupaten Fak fak; • D.I Kassi di Kabupaten Manokwari; • D.I Waijan di Kabupaten Raja Ampat; • D.I Kalobo di Kabupaten Raja Ampat; • D.I Waibu di Kabupaten Raja Ampat; • D.I Waimeci di Kabupaten Raja Ampat; • D.I Aimas di Kabupaten Sorong; • D.I Modan II/ Malaos di Kabupaten Sorong; • D.I Sisipan di Kabupaten Sorong; | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|---|---|------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | I | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • D.I Klamalu di Kabupaten Sorong; • D.I Klamono di Kabupaten Sorong; • D.I Makbalim di Kabupaten Sorong; • D.I Makotyamsa di Kabupaten Sorong; • D.I Malawele di Kabupaten Sorong; • D.I Malawili di Kabupaten Sorong; dan • D.I Modan I/ Walal di Kabupaten Sorong. | | | | | | | | | |
| G2 | Sistem Pengendalian Banjir diarahkan di seluruh Kabupaten Kota | Seluruh wilayah Kabupaten Kota | APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah, • Dinas Lingkungan Hidup, • Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | | |
| G3 | Bangunan SDA | Seluruh | APBD Prov | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | wilayah Kabupaten Kota | | Bencana Daerah, • Dinas Lingkungan Hidup, • Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| H | Perwujudan sistem jaringan prasarana | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN, APBD | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| H1 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan sistem jaringan perpipaan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, • PDAM dan masyarakat | | | | | | |
| 2 | Pembangunan SPAM | | | | | | | | | |
| H2 | Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan | | | | | | |
| 2 | Perencanaan pengelolaan secara regional dan terpadu | Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong dan Kota Sorong | | | | | | | | |
| H3 | Sistem Jaringan Persampahan Wilayah Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan | | | | | | |
| 1 | Manajemen pengelolaan persampahan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan | | | | | | |
| 2 | Penyediaan | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | sarana dan prasarana persampahan | | | • Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 3 | Pengembangan TPA Regional | | | | | | | | | |
| 4 | Pengembangan TPA pada masing-masing Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI | | | | | | | | | | |
| A | Perwujudan Kawasan Lindung | | | | | | | | | |
| A1 | Badan Air | | | | | | | | | |
| 1 | inventarisasi badan air; | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup; • Dinas Kehutanan; • Bappeda; • Balai Besar Wilayah Sungai; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 2 | penyusunan dan penetapan baku mutu air; | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup; • Dinas Kehutanan; • Bappeda; • Balai Besar Wilayah Sungai; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 3 | pencegahan dan penanggulangan pencemaran air; | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD PROVINSI DAN APBD KABUPATEN/KOTA | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup; • Dinas Kehutanan; • Bappeda; • Balai Besar Wilayah Sungai; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 4 | pemeliharaan dan pemulihan mutu air | Seluruh Wilayah Perencanaan | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup; • Dinas Kehutanan; • Bappeda; | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Papua Barat | | <ul style="list-style-type: none"> Balai Besar Wilayah Sungai; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 5 | memelihara daerah tangkapan air | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kehutanan; Bappeda; Balai Besar Wilayah Sungai; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 6 | peningkatan daya tampung badan air | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kehutanan; Bappeda; Balai Besar Wilayah Sungai; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 7 | pengelolaan sampah dan air limbah dimulai dari sumbernya di daerah tangkapan air | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kehutanan; Bappeda; Balai Besar Wilayah Sungai; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 8 | upaya peningkatan kualitas air dari hulu dan hilir | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kehutanan; Bappeda; Balai Besar Wilayah Sungai; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 9 | pengecahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kehutanan; Bappeda; | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Balai Besar Wilayah Sungai; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 10 | peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di sekitar badan air | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kehutanan; Bappeda; Balai Besar Wilayah Sungai; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 11 | pengendalian pemanfaatan badan air. | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kehutanan; Bappeda; Balai Besar Wilayah Sungai; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| A2 | Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya | | | | | | | | | |
| 1 | peningkatan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan | | | | | | |
| 2 | percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | yang dapat di gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan | | | | | | | | | |
| 3 | Pengembangan jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan | | | | | | |
| 4 | Penelitian dan pendidikan mengenai pengelolaan kawasan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan, • Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air;dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 5 | Pembangunan unit-unit monitoring dan | Seluruh Wilayah Perencanaan | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | pengawasan sumberdaya hutan | Papua Barat | SAH | • Dinas Kehutanan | | | | | | |
| 6 | Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi masyarakat disekitar kawasan kehutanan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan | | | | | | |
| 7 | percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan | | | | | | |
| 8 | pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan gambut | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan | | | | | | |
| 9 | meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan hutan lindung dan kawasan gambut | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan | | | | | | |
| A3 | Kawasan Perlindungan Setempat | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan perlindungan setempat | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup, Dinas kehutanan, dan Bappeda | | | | | | |
| 2 | Rehabilitasi dan pemeliharaan lahan pada kawasan perlindungan setempat | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup, Dinas kehutanan, dan Bappeda | | | | | | |
| 3 | Pembangunan sarana dan prasarana penyelamatan dan pengelolaan kawasan di kawasan perlindungan setempat | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup, Dinas kehutanan, dan Bappeda | | | | | | |
| 4 | Deliniasi kawasan lindung di kawasan perlindungan setempat | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup, Dinas kehutanan, dan Bappeda | | | | | | |
| 5 | Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan perlindungan setempat | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup, Dinas kehutanan, dan Bappeda | | | | | | |
| 6 | meningkatkan peran serta masyarakat adat | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan perlindungan setempat | | | | <p>Hidup,</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, dan Bappeda | | | | | | |
| A4 | Perwujudan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | |
| 1 | pengukuhan dan pemeliharaan batas wilayah | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 2 | penataan dan pengkajian kawasan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 3 | Inventarisasi potensi kawasan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 4 | Pembebasan lahan-lahan yang termasuk dalam kawasan lindung | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 5 | Pengembangan dan pemeliharaan jalan patroli dalam kawasan yang terakomodir dalam blok/ zona khusus | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 6 | Pengembangan pusat informasi suaka alam dan pelestarian alam serta kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 7 | Pengembangan model pengelolaan basis | Seluruh Wilayah Perencanaan | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | data kawasan dan kearifan lokal seperti pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat, learning dan riset centre | Papua Barat | SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 8 | Pengembangan dan pemeliharaan menara pengintai dan pos-pos penjagaan di kawasan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 9 | Pengembangan kegiatan pengamanan melalui pola kemitraan bersama masyarakat adat dan para pihak | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 10 | Penanggulangan dan pengendalian perambahan hutan, illegal logging, illegal wildlife dan trade serta kebakaran | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | hutan | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 11 | Penyusunan pemetaan kawasan dan potensi Kawasan Suaka Alam dan kawasan perlindungan alam serta kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 12 | Pengembangan institusi konservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam serta kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 13 | Pengembangan pola kemitraan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kawasan yang mengakomodir prinsip berkelanjutan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 14 | meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan konservasi | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan, • Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Bappeda | | | | | | |
| 15 | Promosi dan pengembangan pola kerjasama penelitian dan pengembangan program yang relevan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan, • Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Bappeda | | | | | | |
| 16 | Pengembangan pola kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kawasan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan, • Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Bappeda | | | | | | |
| 17 | Pengembangan pola kemitraan dalam penyelenggaraan sarana dan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan, • Balai Besar Badan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | prasarana kawasan | | | <ul style="list-style-type: none"> Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 18 | Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan kawasan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 19 | Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi konservasi yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 20 | Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 21 | Mengintegrasikan | Seluruh | APBN &/ APBD | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | dan mensinergikan fungsi kawasan dengan pembangunan di wilayah pesisir dan di pulau-pulau kecil | Wilayah Perencanaan Papua Barat | Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | Lingkungan Hidup dan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan, • Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Bappeda | | | | | | |
| 22 | Memberdayakan kelompok social budaya dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan, • Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Bappeda | | | | | | |
| 23 | Mengendalikan aktivitas penangkapan ikan skala kecil dizona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan konservasi | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan, • Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Bappeda | | | | | | |
| 24 | Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di kawasan konservasi | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan, • Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| 25 | Melindungi serta melestarikan sumberdaya dan ekosistemnya melalui pengendalian pemanfaatan di kawasan konservasi | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bappeda | | | | | | |
| A5 | Kawasan Lindung Geologi | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan pemetaan dan zonasi kawasan karst | 1. Kabupaten Fak Fak; 2. Kabupaten Kaimana; 3. Kabupaten Manokwari; | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 2 | mengevaluasi secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona luhan (mata air dan sungai). | 4. Kabupaten Maybrat; 5. Kabupaten Raja Ampat; dan 6. Kabupaten Tambrau. | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 3 | perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang di kategorikan sebagai eksokarst | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--------|---------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | maupun endokarst. | | | | | | | | | |
| 4 | perlindungan sistem hidrogeologi karst yang ada | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 5 | perlindungan terhadap morfologi karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari aspek/ sudut pandang lain seperti misalnya antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 6 | meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan lindung geologi | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| A6 | Kawasan Ekosistem Mangrove | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | pelestarian dan konservasi pada ekosistem Mangrove yang masih asli atau mendekati kondisi asli | 1. Kabupaten Fak Fak; | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 2 | kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan dikembangkan untuk budidaya ramah lingkungan dan pariwisata | 2. Kabupaten Kaimana; 3. Kabupaten Manokwari; 4. Kabupaten Manokwari Selatan; 5. Kabupaten Raja Ampat; | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 3 | audit lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan khususnya yang menyebabkan hilangnya mangrove | 6. Kabupaten Sorong; 7. Kabupaten Sorong Selatan; 8. Kabupaten Tambrauw; 9. Kabupaten Teluk Bintuni; | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 4 | pengelolaan untuk perlindungan dan konservasi pada kawasan mangrove yang berfungsi sebagai jalur hijau | 10. Kabupaten Teluk Wondama; dan 11. Wilayah laut. | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 5 | Pengelolaan ekosistem Mangrove berbasis masyarakat | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--------|---------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | (Community Based Management) | | | | | | | | | |
| 6 | menetapkan moratorium penebangan kayu mangrove | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 7 | meningkatkan produksi mangrove melalui teknologi | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 8 | menjalin kerjasama rehabilitasi kawasan ekosistem Mangrove | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 9 | meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada ekosistem Mangrove. | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 10 | Pengembangan pemanfaatan dilakukan dengan mempertimbangan aspek ekologis dan aspek teknis | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | lainnya khususnya lingkungan | | | | | | | | | |
| 11 | Perlindungan hutan mangrove sebagai daerah pengasuhan, pemijahan dan perlindungan biota | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 12 | Menjamin fungsi ekologis mangrove dalam migrasi biota | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 13 | melakukan rehabilitas dan restorasi hutan mangrove | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| B | Perwujudan Peruntukkan Budi Daya | | | | | | | | | |
| B1 | Perwujudan Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | |
| 1 | Sesuai dengan ragam hutan produksi yang tinggi maka perlu penerapan peraturan (sistem silvikultur dan aturan pengelolaan lainnya) yang berbeda | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan swasta | | | | | | |
| 2 | peningkatan produktivitas hutan yang | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan swasta | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung serta upaya restorasi/ agroforestry sebagai wujud pemulihan ekosistem/ lahan kritis | | | | | | | | | |
| 10 | Pengelolaan kawasan hutan produksi secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanandan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |
| 11 | meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan hutan produksi | | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanandan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |
| B2 | Perkebunan Rakyat | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perkebunan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|-------------------|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | perkebunan rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan | | | | | | | | | |
| 10 | Peningkatan manajemen pengairan | | | | | | | | | |
| 11 | kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir | | | | | | | | | |
| B2 | Perwujudan Kawasan Pertanian | | | | | | | | | |
| 1 | Kawasan Tanaman Pangan | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan kawasan Agropolitan (padi) terletak di Kabupaten Manokwari, yaitu Prafi, Masui, dan Sidey | Manokwari | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi • Kementerian Pertanian • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, • Peternakan dan Ketahanan | | | | | | |
| - | Pencetakan sawah baru pada | Kab. Sorong, Kab. | APBN &/ APBD Provinsi &/ | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Pekerjaan Umum | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | kawasan potensi yang didukung dengan ketersediaan kondisi lahan serta sistem pengairan | Manokwari, Kab. Fak fak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Raja Ampat, Kab. Manokwari Selatan | Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan | | | | | | |
| - | Pengembangan pertanian perkotaan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan | | | | | | |
| - | Pengembangan pertanian organik | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan | | | | | | |
| - | Penerapan mekanisme mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi | | | | | | | | | |
| - | penetapan kawasan pertanian pangan khususnya lahan pertanisan sawah irigasi sebagai Kawasan Pertanian Pangan | <ul style="list-style-type: none"> Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Kementerian ATR/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Berkelanjuta (KP2B); | | | <ul style="list-style-type: none"> Peternakan dan Ketahanan | | | | | | |
| - | Pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B yang akan diatur lebih dalam Peraturan Bupati/walikota pada masing-masing kabupaten dan kota | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Kementerian ATR/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan | | | | | | |
| 2 | Kawasan Hortikultura | | | | | | | | | |
| - | Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk hortikultura | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan | | | | | | |
| - | Terjalannya kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan kawasan Agropolitan Pegunungan Arfak berbasis Hortikultura (Pertanian Sayuran Dataran Tinggi di Distrik Anggi) | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan industri | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---------------|---|---|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|------|------|------|--|--|
| | | | | | I | | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan | | | | | | | | | | | |
| - | Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan tani | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kawasan Perkebunan | | | | | | | | | | | |
| - | peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan Swasta | | | | | | | | |
| - | Rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan | | | | | | | | | | | |
| - | Intensifikasi komoditi perkebunan | | | | | | | | | | | |
| - | Pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan | | | | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan Swasta | | | | | |
| - | Diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | budidaya tanaman | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Peternakan Swasta | | | | | | |
| - | Peningkatan manajemen pengairan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan Swasta | | | | | | |
| - | pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan profesional | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan Swasta | | | | | | |
| - | Pengelolaan kawasan perkebunan secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan Swasta | | | | | | |
| 4 | Kawasan Peternakan | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan peternakan berbasis ternak unggulan | Kab. Tambrauw, Kab. Fak fak dan Kab. Teluk | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | I | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | komoditi (Perdes, Perbub atau Perda) | | | | | | | | | | |
| 6 | meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan pertanian | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan Swasta | | | | | | | |
| B4 | Kawasan Perikanan | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Kawasan Sentra Produksi & Pengolahan Perikanan Tangkap | Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Tambrauw, Kab. | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | | | | | | | |
| 2 | Pembangunan Kawasan Andalan/Unggulan | Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. | | | | | | | | | |
| 3 | Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat | Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana, dan Kab. Teluk Wondama | | | | | | | | | |
| 4 | Pengembangan Industri Perikanan | Kab. Teluk Wondama dan Kota Sorong | | | | | | | | | |
| 5 | menetapkan alur yang dilindungi untuk | Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan dan | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | meminimalkan dampak pencemaran | | | | | | | | | |
| 3 | Pemantapan kerjasama pengelolaan PLTG/PLTMG antara pemerintah, masyarakat, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya | | | | | | | | | |
| B6 | Kawasan Peruntukkan Industri | | | | | | | | | |
| 1 | pengembangan Kawasan Peruntukan Industri | <ul style="list-style-type: none"> Kawasan peruntukan Industri di Kabupaten Fak Fak; Kawasan peruntukan Industri Maruni di Kabupaten Manokwari ; Kawasan peruntukan Industri Arar di Kabupaten Sorong; dan Kawasan peruntukan | APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | Dis. PU dan Penataan Ruang | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | n Industri Teluk Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni. | | | | | | | | |
| 2 | <p>Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), kebutuhan kegiatan Fisik Pembangunan SIKIM di Provinsi Papua Barat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan landscape dan jalan lingkungan di dalam sentra • Pembangunan gedung standar tempat produksi • Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sederhana • Pembangunan ruang pameran produk - produk IKM • Kantor pengelola | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | sentra | | | | | | | | | |
| 3 | Pengelolaan kawasan peruntukkan industri secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menunjang terwujudnya kawasan pemanfaatan yang berkelanjutan dan lestari | <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Fak Fak Kabupaten Manokwari Kabupaten Sorong Kabupaten Teluk Bintuni | APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | | | | | | |
| 4 | meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada pengembangan kawasan peruntukkan industri | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | | | | | | |
| 5 | Pengembangan ekonomi hijau - biru | Provinsi Papua Barat | ABNN dan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Badan Riset Inovasi Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kajian Pengembangan ekonomi hijau - biru | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | bisnis plan • Hilirisasi produk industry hijau-biru | | | • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | | | | | | |
| B7 | Kawasan Pariwisata | | | | | | | | | |
| 1 | Upaya pemasaran pariwisata | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | | |
| - | Penggalian objek wisata baru berbasis alam di seluruh ekosistem Kelautan di sekitar Pulau Papua untuk wisata laut dan Ekosistem Hutan dan Pantai untuk wisata | | | | | | | | | |
| - | Penyusunan rencana induk pariwisata daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat | | | | | | | | | |
| 2 | Pengembangan paket wisata Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | | |
| - | Pengembangan promosi wisata dan peningkatan atraksi-atraksi | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | wisata | | | | | | | | | |
| - | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung | | | | | | | | | |
| - | Reorientasi kegiatan kepariwisataan yang ramah lingkungan | | | | | | | | | |
| 3 | Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional <ul style="list-style-type: none"> • KPPN Sorong dan sekitarnya • KPPN Raja Ampat dan sekitarnya • KPPN Teluk Bintuni dan sekitarnya • KPPN Manokwari dan sekitarnya • KPPN Peg. Fak fak-Kumafa dan sekitarnya • KPPN Teluk Cenderawasih dan sekitarnya | Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Fak Fak, Kab. Teluk Wondama | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreati • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan • Swasta | | | | | | |
| 4 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional <ul style="list-style-type: none"> • DPN Sorong- | Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Manokwari dan Kab. Fak | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreati • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan • Swasta | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|----------------|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Raja Ampat dan sekitarnya • DPN Manokwari-Fak fak dan sekitarnya | fak | | | | | | | | |
| 5 | Pengembangan pariwisata Raja Ampat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata nasional (KSPN), dengan sintesa kebutuhan infrastruktur meliputi: • Dukungan Akses jalan menuju obyek wisata, bandara dan pelabuhan penyeberangan • Dukungan pengaman pantai dan banjir di perkotaan Waisal • Dukungan air bersih untuk pariwisata • Dukungan IPLT untuk resot-resort wisata dan | Kab Raja Ampat | APBN &/ APBD Provinsi &/ Dana Lain yang SAH | • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreati • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Swasta | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | kualitas infrastruktur (drainase, sampah dan sistem pengendalian banjir) | | | | | | | | | |
| 10 | meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada pengembangan kawasan pariwisata | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | | |
| 11 | Meningkatkan daya Tarik dan destinasi wisata | | | | | | | | | |
| 12 | Meningkatkan manajemen kepariwisataan | | | | | | | | | |
| 13 | Mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir | | | | | | | | | |
| B8 | Perwujudan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Penataan Ruang | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota , OTSUS | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |
| 2 | Pengembangan Sistem Informasi | | APBN &/ APBD Provinsi dan | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Penataan Ruang | | APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 3 | Pengelolaan Kawasan Khusus | | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota , OTSUS | | | | | | | |
| 4 | Penataan permukiman | | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 5 | Pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat | | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 6 | Penetapan Peraturan Daerah Terkait Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat | | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan rencana tata ruang perkotaan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |
| 8 | Pengembangan Kota Baru | Kota Sorong | APBN, Badan Usaha, dan Swasta) | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BUMN, Swasta | | | | | | |
| 9 | Penataan kawasan permukiman di kawasan lindung | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 10 | Pembangunan fasilitas pelayanan penunjang kawasan pemukiman | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, | | | | | | |
| 11 | Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 12 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana & prasarana | Seluruh Wilayah Perencanaan Papua Barat | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, | | | | | | |
| 13 | Pengintensifan dan peningkatan sistem utilitas | | | | | | | | | |
| 14 | meningkatkan pemenuhan perumahan layak bagi masyarakat adat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat | | | | | | | | | |
| 15 | mengembangkan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai | | | | | | | | | |
| 16 | menyediakan | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | I | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4 | Merevitalisasi sarana prasarana pelabuhan | <ul style="list-style-type: none"> Ampat; Kabupaten Sorong; | | | | | | | | |
| 5 | Meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan | <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Sorong Selatan; Kabupaten Tambrauw; | | | | | | | | |
| 6 | Mengatur dan membina, mengembalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan kepelabuhan | <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Teluk Bintuni; Kota Sorong. | | | | | | | | |
| 7 | Meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran | | | | | | | | | |
| B10 Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar | <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Fak Fak; Kabupaten Kaimana; | APBN &/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan | | | | | | |
| 2 | Pembatasan penggunaan lahan yang mempunyai arti penting untuk kepentingan hankam atau kegiatan yang memiliki intensitas tinggi | <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Manokwari ; | | Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Kerja Migas di Kabupaten Sorong (Distrik Klamono, Distrik Klaili, Distrik Salawati Selatan, Distrik Salawati, dan Selat Sele) dan Kabupaten Raja Ampat (Distrik Salawati Utara). | | | | | | | | | |
| 6 | Perwujudan Kawasan Pariwisata | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Wisata Bahari Teluk Triton Pengembangan Wisata Kota Manokwari di Teluk Sawaibu Danau Anggi Wisata religi dan budaya Agrowisata Kinam | Kabupaten Kaimana Kabupaten Manokwari Kabupaten Pegunungan Arfak Kabupaten Manokwari (Pulau Mansinam) Kabupaten | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Eenergi Sumber Daya Mineral Swasta | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| <ul style="list-style-type: none"> fungsi (regulasi) Revitalisasi kawasan baik yang berbentuk bangunan maupun pengembangan kawasan sekitarnya secara terbatas (buffer zone) | | | | | | | | | | |
| 2 | Wilayah Lingkar Manokwari | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata (hotel, agen wisata, taman parkir, dan lain) Perbaikan agenda pariwisata Papua Barat untuk lebih mengenalkan potensi sosial budaya Melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan situs sejarah masuknya injil di tanah Papua | (Wawi, Pasir Putih, Pulau Mansinam, Gunung Meja, Anggori dan Pantai Petrus Kafiari) di Kabupaten Manokwari | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota &/ Dana Lain yang SAH | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Peninggalan purbakala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | |
| Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| 1 | Kawasan Geopark | • Kawasan | APBD Provinsi | • Dinas Kehutanan, | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Cagar Alam Waigeo Timur, Cagar Alam Waigeo Barat, Cagar Alam Pulau Misool, Cagar Alam Selat Sagawin, Cagar Alam Pulau Salawati di Kawasan Perairan Kepulauan Raja Ampat | | | | | | | | | |
| 2 | Koridor Mahkota Permata Tanah Papua | <ul style="list-style-type: none"> koridor Konservasi Taman Pesisir JeenWomom, Cagar Alam Tambrau Utara, Cagar Alam Tambrau Selatan, Cagar Alam Pegunungan Arfak, Cagar Alam Teluk Bintuni, dan Keanekaragaman hayati rumput Kebar. | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> pemantapan kawasan; | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> pembentukan lembaga pengelola/unit; | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> penyelenggaraan pengelolaan kawasan; | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> program kemitraan; | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> pemberdayaan masyarakat. | | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Kawasan ini tersebar di Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Teluk Bintuni | | | | | | | | | |
| 3 | Taman Wisata Alam Gunung Meja | Kabupaten Manokwari | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan Dan Perikanan , Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |
| | • pemantapan kawasan; | | | | | | | | | |
| | • pembentukan lembaga pengelola/unit; | | | | | | | | | |
| | • penyelenggaraan pengelolaan kawasan; | | | | | | | | | |
| | • program kemitraan; | | | | | | | | | |
| | • pemberdayaan masyarakat. | | | | | | | | | |
| 4 | Kawasan Geopark Mesozoik Mawi (Gunung Botak) | Kabupaten Manokwari Selatan | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan Dan Perikanan , Balai Besar Badan Konservasi Sumber | | | | | | |
| | • pemantapan kawasan; | | | | | | | | | |
| | • pembentukan lembaga pengelola/unit; | | | | | | | | | |

| PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|------|------|------|------|--|
| | | | | I | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • penyelenggaraanp engelola kawasan; • program kemitraan; • pemberdayaanma syarakat. | | | <ul style="list-style-type: none"> • Daya Air • Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | | |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Geopark Pegunungan Arfak • pemantapan kawasan; • pembentukan lem bagapengelola/ unit; • penyelenggaraanp engelola kawasan; • program kemitraan; • pemberdayaanma syarakat. • Pelestarian kawasan; dan • Pelarangan alih fungsi kawasan. | Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Manokwari Selatan | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup, • Dinas Kelautan Dan Perikanan , • Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air • Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | | | | | | |

Sumber :Rencana 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.

Pembina Utama Madya

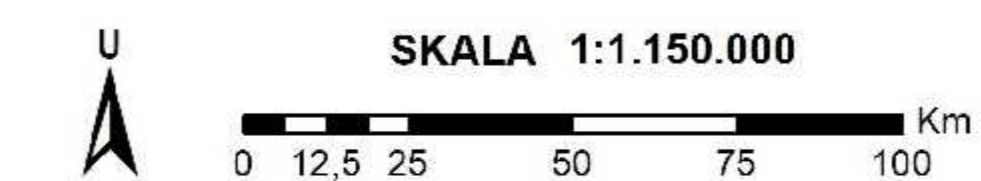
NIP. 19650818 199203 1 022



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

**PETA KAWASAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah 12 Mila Laut
- Garis Pantai
- Dangkal Air

Kawasan Pembangunan Berkelanjutan

- Kelestarian Hutan
- Ketahanan Pangan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit SPOT 6/7 perekaman Tahun 2016 - 2019, bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
- RTR Pulau Papua Tahun 2014
- Peta Lokasi Ruang Penda no.13/2019 RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
b. Hengolahan data tahun 2022.

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 52S dan 53S

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - UMLA Kabupaten/Kota
 - Batas Wilayah Desa/ Kelurahan
- Perairan**
 - Garis Pantai
 - Medan Air

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Hutan Produksi
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - Kawasan Perkebunan Rakyat
 - Kawasan Pertanian
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Permukiman
 - Kawasan Transportasi
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)**
- Kawasan Ancangan Pendaratan dan I epas I andas
 - Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
 - Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
 - Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
 - Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
 - Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
 - Landasan Penerbangan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Data Satebit SRTM 30" dengan Tahun 2010 - 2019, bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
- Peta Dasar yang telah terkonversi dari Raster Informasi Geospasial (RIK) tahun 2021.
- RTR Pulau Papua Tahun 2015.
- Peta Alokasi Ruang Perda no.13/2019/RZVP-3/K Provinsi Papua Barat.
- Keputusan Menteri/LHK No SK.9620/Menlit-PKL/WH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan Pengubahan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2020.
- Pengolahan data tahun 2022.

Ditulis:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai pembagian batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 52S dan 53S

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

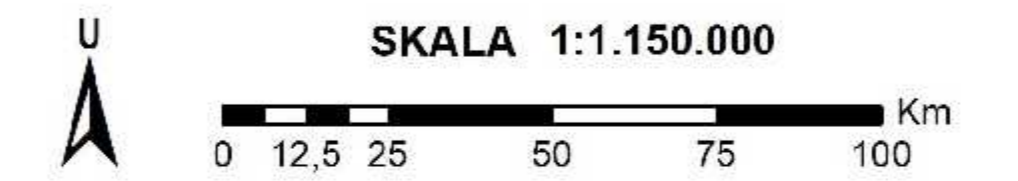
DOMINGGUS MANDACAN





LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------|
| Ibukota Provinsi | Batas Administrasi | Perairan |
| Ibukota Kabupaten/Kota | Batas Kabupaten/Kota | Sisa Pantai |
| | Batas Wilayah Desa | Lautan Air |

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Hutan Produksi
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
 - Kawasan Perkebunan Rakyat
 - Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Data Sateit SPOT 6/7 cakupan Tahun 2018 - 2019, bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
2. Peta Dasar yang telah terlokasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. RTR Pulau Papua Tahun 2014
4. Peta Alokasi Ruang Penda no. 13/2019/RZMP-3-K Provinsi Papua Barat
5. Keputusan MenLHK No SK 8620/MenHK-PTL/KUHPLA 2110/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perencanaan Pengalokasian Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2030
6. Pengolahan data tahun 2022

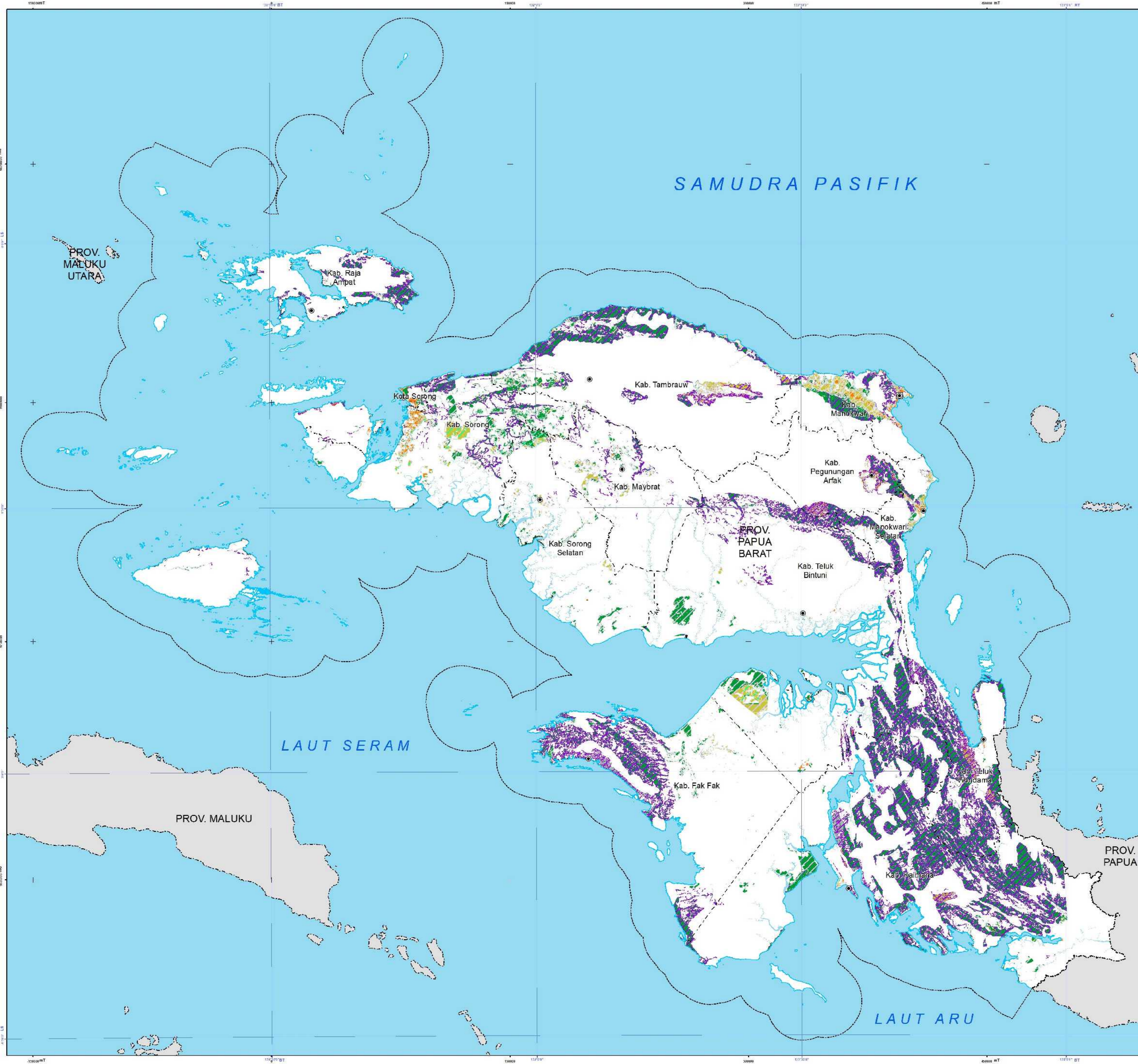
Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berbasis di Zona UTM 53S dan 2008

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

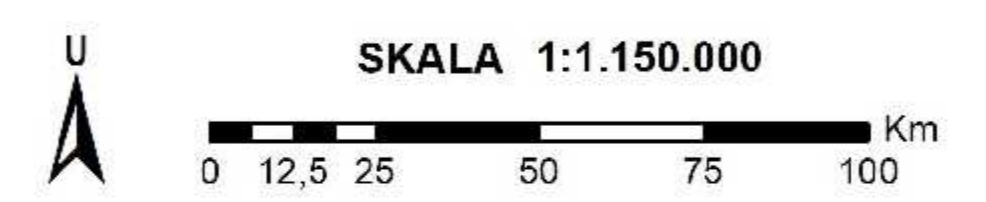




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041**

**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan : Kota Jayapura
- Batas Administrasi : Garis Hitam
- Perairan : Garis Biru
- Batas Kabupaten/Kota : Garis Dotted
- Batas Wilayah Zona Laut : Garis Dashed

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|--|--|
| Kawasan Budi Daya | Kawasan Perikanan |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Risikonya | Kawasan Perikanan/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian | Kawasan Perikanan |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertambangan dan Energi | Kawasan Perumahan dan Industri |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata | Kawasan Pariwisata |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman | Kawasan Perumahan |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi | Kawasan Transportasi |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan | Kawasan Perumahan dan Keamanan |

- Kawasan Rawan Bencana**
- Kawasan Rawan Bencana Tipe I: Kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana gempa bumi.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe II: Kawasan yang berisiko sedang terhadap bencana gempa bumi.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe III: Kawasan yang berisiko rendah terhadap bencana gempa bumi.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe IV: Kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana banjir.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe V: Kawasan yang berisiko sedang terhadap bencana banjir.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe VI: Kawasan yang berisiko rendah terhadap bencana banjir.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe VII: Kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana tanah longsor.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe VIII: Kawasan yang berisiko sedang terhadap bencana tanah longsor.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe IX: Kawasan yang berisiko rendah terhadap bencana tanah longsor.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe X: Kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana tsunami.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe XI: Kawasan yang berisiko sedang terhadap bencana tsunami.
 - Kawasan Rawan Bencana Tipe XII: Kawasan yang berisiko rendah terhadap bencana tsunami.

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Data Sektoral SRT 677 (sekitaran Tahun 2018 - 2019) bersumber dari Lembaga Berwenang dan Analisa Nasional (L2-AN).
2. Peta Dasar yang telah dilakukan dari Raster Informasi Geospasial (RIK) tahun 2021.
3. RTR Pulau Papua Tahun 2014.
4. Peta Alokasi Ruang Perda no.13/2019/RZVP-3/K Provinsi Papua Barat.
5. Keputusan ManLHK No SK.862/Menlit-PTL/KU/PLA.110/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2020.
6. Pengolahan data tahun 2022.

Ditulis dan
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai partisipasi batas administrasi
- Koordinat berdasar di Zona UTM 53S dan 53S

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| Ibukota Kabupaten/Kota | Batas Provinsi | Garis Pantai |
| | Batas Kabupaten/Kota | Ikutan Air |
| | Batas Wilayah Desa | |

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Lindung**
- BA Badan Air
 - PPM Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 - PKP Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman
 - KK Kawasan Konservasi
 - KKP Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman
 - PS Kawasan Perlindungan Setempat
 - LG Kawasan Lindung Geologi
 - EM Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Budi Daya**
- HP Kawasan Hutan Produksi
 - HPK Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
 - HPKP Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
 - PK Kawasan Perkebunan Rakyat
 - P Kawasan Pertanian
 - PKR Kawasan Perikanan
 - PPK Kawasan Pariwisata
 - PM Kawasan Permukiman
 - PT Kawasan Transportasi
- Kawasan Cagar Budaya**
- KB Kawasan Cagar Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Cite Satelit SPOT-GT periode Tahun 2010-2019, bersumber dari Lembaga Survei dan Antariksa Nasional (LAPAN).
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- RTR Pulau Papua Tahun 2014
- Peta Alokasi Ruang Perda no. 13/2019 RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
- Keputusan Menteri LHK No. SK.062/2019/Min-LHK/PKTK/UKH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengalokasian Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2020
- Pengolahan data tahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai perubahan batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 52E dan 53E

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN





LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan: Ibu kota Provinsi, Ibu kota Kabupaten/kota
- Batas Administrasi: Dalam Provinsi, Dalam Kabupaten/kota, Dalam Wilayah (Daerah) lain
- Perairan: Gula Pantai, Hutan Air

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Hutan Produksi
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
 - Kawasan Perkebunan Rakyat
 - Kawasan Pertanian
 - Kawasan Pertanian/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Permukiman
- Kawasan Resapan Air**
- Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Data Dasar POCIT 57 pemukiman Tahun 2010 - 2010, bersumber dari Lembaga Pemetaan dan Aerasi Nasional (LAPAN)
- Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- RTR Pulau Papua Tahun 2014
- Peta Alokasi Ruang Pada no. 13/2019 RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
- Keputusan Menteri LHK No SK 6622/MenLHK-PAT/KUH/P.A.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pangukutan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2020
- Pengolahan data tahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Koordinat berada di Zona UTM 53S dan 63S

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN





LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Wilayah Desa
- Perairan**
 - Daerah Pantai
 - Daerah Air

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Hutan Produksi
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertambangan dan Energi
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi
 - Kawasan Perkebunan Rakyat
 - Kawasan Pertanian
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Pertambangan dan Energi
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Permukiman
 - Kawasan Transportasi
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Kawasan Sempadan**
- Sempadan Pantai
 - Sempadan Pipa/Kabel
 - Sempadan Situ, Llanau, Embung, dan Waduk
 - Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Data Satebit SPOT 6/7 sebulan Tahun 2019 - 2010, bersumber dari Lembaga Pemetaan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
- Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Raster Informasi Geospasial (RIG) tahun 2021
- RTR Pulau Papua Tahun 2014
- Peta Alokasi Ruang Perda no. 13/2019 RZWP-3K Provinsi Papua Barat
- Keputusan Menteri H.K. No SK. 8620/Menhk-PT/KU/-/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang "Perencanaan Pengalokasian Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2020"
- Pengalokasian data tahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat beraca di Zona UTM 52S dan 53S

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN





LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Wilayah Desa
- Perairan**
 - Daerah Pantai
 - Ikutan Air

RENCANA POLA RUANG

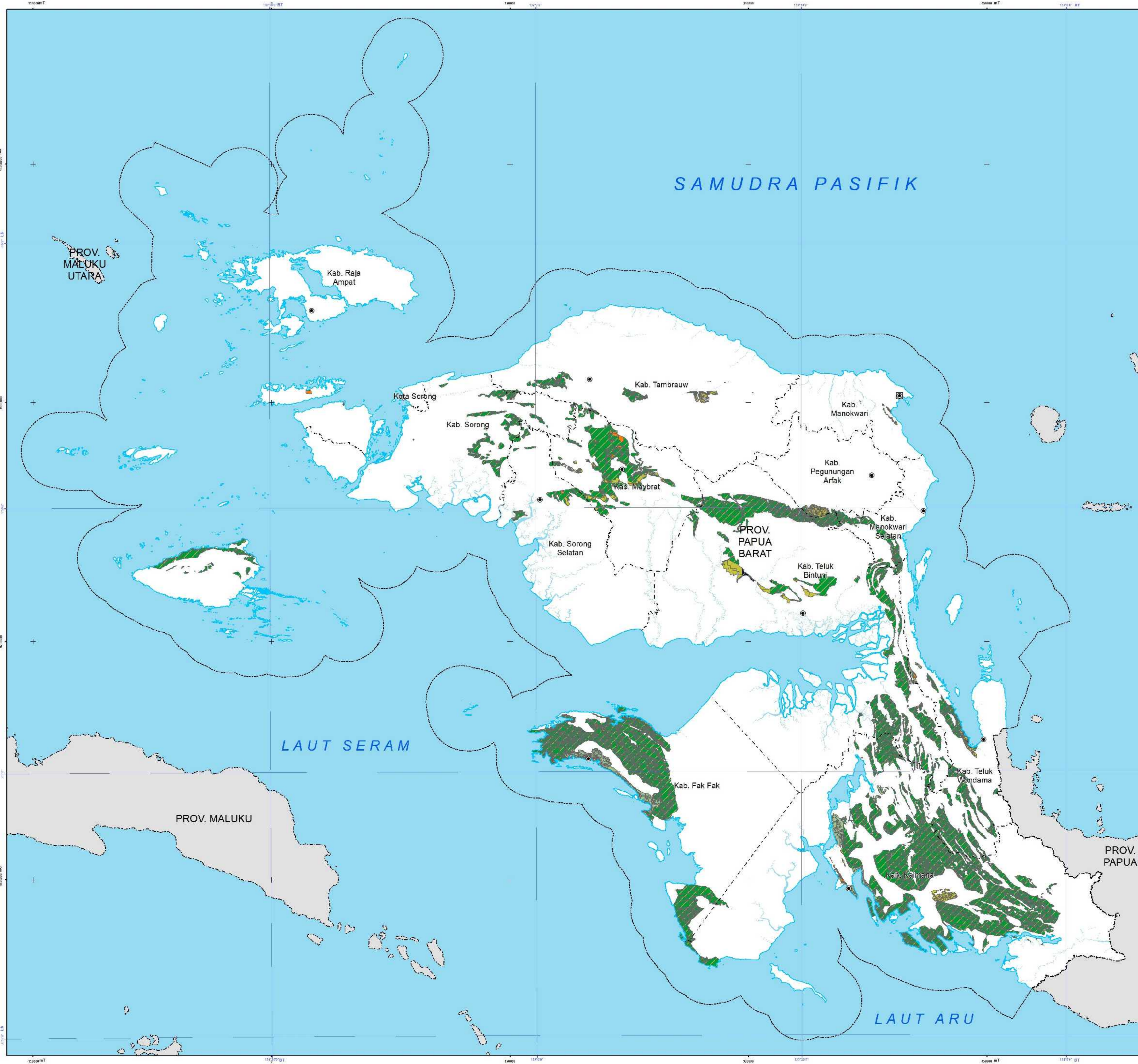
- Kawasan Lindung**
 - Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya/Kawasan Permukiman
 - Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya/Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Budi Daya**
 - Kawasan Hutan Produksi
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
 - Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
 - Kawasan Pertanian
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Permukiman
 - Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan**
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**
- Citra Satelit SPOT 6/7 pelekaman Tahun 2010 - 2019 bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
 - Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021;
 - RTR Pulau Papua Tahun 2014;
 - Peta Alokasi Ruang Rende no.13/2019/RZWP-3/K Provinsi Papua Barat;
 - Keputusan Menteri K No SK 8620/Men/KP/PT/KU/PA/2/02021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengalokasian Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Samosir dengan Tahun 2020;
 - Pengalokasian data tahun 2022.

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 52S dan 53S

GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

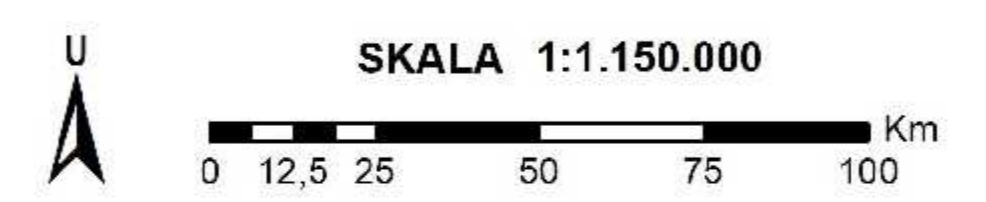




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KARST



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Desa/ Kelurahan
- Perairan
- Gaki Pantai
- Hutan Air

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi
- Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertanian/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Karst

- Kawasan Karst

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Cite Satelit GPO 07 periode Tahun 2010 - 2019, bersumber dari Lembaga Survei dan Antariksa Nasional (LAPAN).
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. RTR Papua Tahun 2014
 4. Peta Alokasi Ruang Perda No. 13/2019 RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
 5. Keputusan Menteri LHK No. SK.062/2019/Min-LHK/PK/TKUHP/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2020
 6. Pengolahan data tahun 2022
- Catatan:
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai perubahan batas administrasi
 - Koordinat berada di Zona UTM 52E dan 53E

GUBERNUR PAPUA BARAT

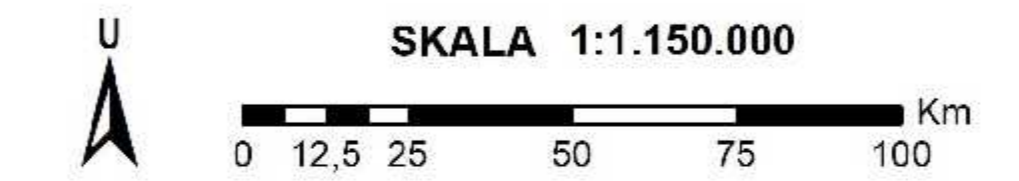
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| Ibukota Kabupaten/Kota | Batas Kabupaten/Kota | Garis Pantai |
| | Batas Wilayah (Desa/RT) | Kawasan Air |

RENCANA POLA RUANG

| | |
|--|---|
| Kawasan Lindung | Kawasan Hutan Produksi |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertambangan dan Energi | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertambangan dan Energi |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata |
| Kawasan Konservasi | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman |
| Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi |
| | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | Kawasan Perkebunan Rakyat |
| | Kawasan Pertanian |
| | Kawasan Perikanan |
| | Kawasan Pertambangan dan Energi |
| | Kawasan Peruntukan Industri |
| | Kawasan Pariwisata |
| | Kawasan Permukiman |
| | Kawasan Transportasi |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

| |
|---|
| Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara |
|---|

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

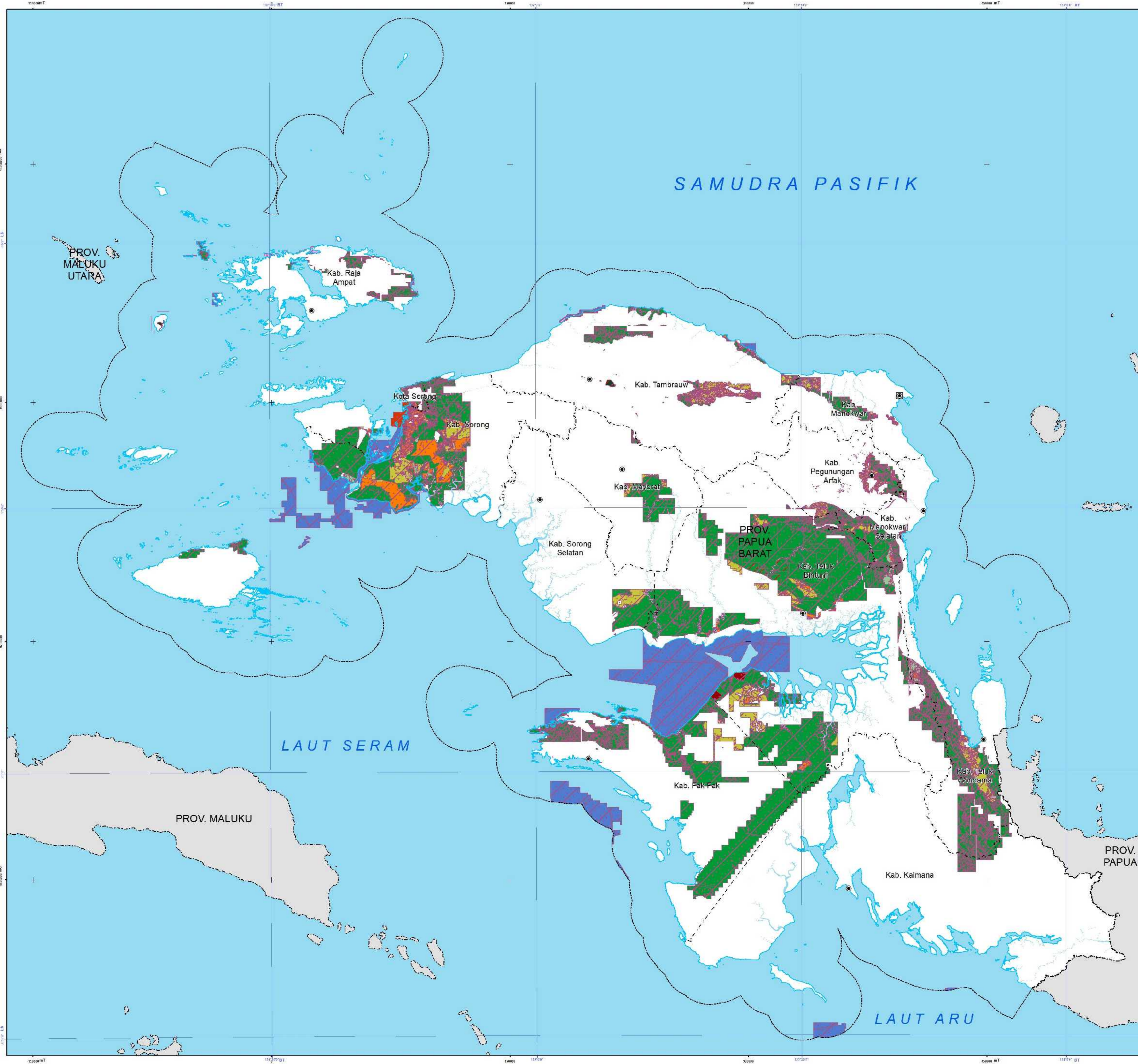
1. Data Satebit SPOT G7 periode Tahun 2010 - 2019, bersumber dari Lembaga Pemetaan dan Analisa Nasa (LAPAN).
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi di Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
3. RTR Papua Tahun 2014
4. Peta Alokasi Ruang Renda no. 13/2015 RZWP-3K Provinsi Papua Barat.
5. Keputusan Menteri No. SK.8820/Menlit-PTUK/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengakuan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2020
6. Pengolahan data tahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai perubahan batas administrasi
- Koordinat berada di Zone UTM 53S dan 53E

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN





LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN MIGRASI SATWA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| Ibukota Provinsi | Batas Administrasi | Perairan |
| Ibukota Kabupaten/Kota | Batas Kabupaten/Kota | Kawasan Air |
| | Batas Wilayah 1:500.000 | |

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Lindung**
- Kawasan Konservasi
 - Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Hutan Produksi
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Perlambangan dan Energi
 - Kawasan Pariwisata
- Kawasan Migrasi Satwa**
- Kawasan Migrasi Satwa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit SPOT 5/7 perekaman Tahun 2016 - 2019, bersumber dari Lembaga "Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
- Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- RTD Peta: Papua Tahun 2014
- Peta Alokasi Ruang Perda No. 13/2019 RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
- Keputusan Menteri LHK No. SK 6620/1-enhk-PKTUKUHP/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2020
- Pengolahan data tahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zone UTM 53G dan 53J

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN





LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| Ibukota Provinsi | Batas Administrasi | Perairan |
| Ibukota Kabupaten/Kota | Batas Kabupaten/Kota | Garis Pantai |
| | Batas Wilayah (1:50000) | Hutan Air |

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Lindung**
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 - Kawasan Konservasi
- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Hutan Produksi
 - Kawasan Pertambangan dan Energi
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan**
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**
- Cite Satellite SPOT 07 pemukiman tahun 2010 - 2019, bersumber dari Lembaga Survei dan Antariksa Nasional (LAPAN).
 - Peta Dasar yang telah terakuis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
 - RTR Pulau Papua Tahun 2014
 - Peta Alokasi Ruang Perda no 13/2019 RZVP-3/K Provinsi Papua Barat
 - Keputusan MestLHK No SK 0320/16en HK-PT/KUJHP/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengalokasian Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2020
 - Pengolahan data tahun 2022.

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai perubahan batas administratif
- Koordinat berada di Zona UTM 528 dan 536

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

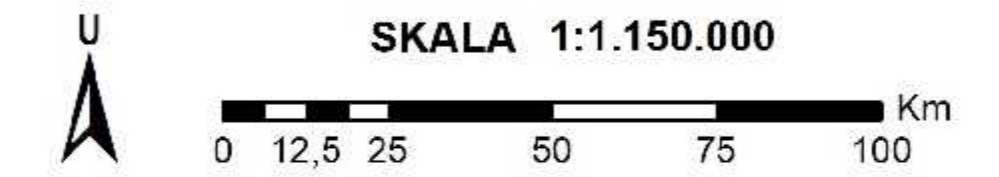
DOMINGGUS MANDACAN





LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2041

PETA LOKASI PULAU SAIN DAN PULAI PIYAI
YANG BERBATASAN DENGAN PROVINSI MALUKU UTARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibu kota Provinsi
 - Ibu kota Kabupaten/Kota
- Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Wilayah 12 Mila Laut
 - ▨ Batas Zona Maritim
- Perairan**
 - ~ Cara Peral

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

- Badan Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Transportasi
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi/Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman
- Kawasan Konservasi/Kawasan Transportasi
- Kawasan Konservasi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Budidaya

- ★ Lokasi Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertanian/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Transportasi/Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Data Sateelit EO1T 97 tanggal 2016 - 2019, sumber dari 1 lembaga Pertambangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. RTR Pulau Papua Tahun 2014
4. Peta Alokasi Ruang Perda no.13/2019 RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
5. Keputusan Menteri HK No SK 8623/Menhk-PT/KU-PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat Sampai dengan Tahun 2020
6. Pengalihan data tahun 2021

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 53S dan 53E

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

